

**ALASAN KEBIJAKAN ARAB SAUDI MELAKUKAN BLOKADE  
TERHADAP QATAR**

**SKRIPSI**



**Disusun oleh**

**RIZZA SETIA OCTAVIARIE**

**NIM 071511233013**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUBUNGAN  
INTERNASIONAL**

**DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**SEMESTER GENAP  
2019/2020**

**ALASAN KEBIJAKAN ARAB SAUDI MELAKUKAN BLOKADE  
TERHADAP QATAR**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan  
Studi S-1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Airlangga

Disusun oleh

**RIZZA SETIA OCTAVIARIE**

**NIM 071511233013**

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SEMESTER GENAP

2019/2020

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul :

**“Alasan Dibalik Kebijakan Pemutusan Hubungan Diplomatik Oleh Negara Arab  
Saudi Terhadap Qatar”**

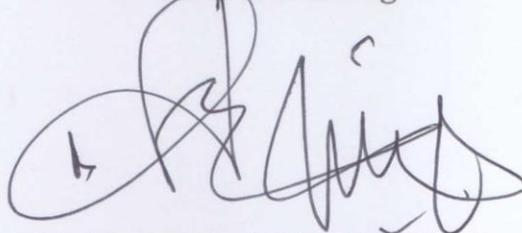
Disusun oleh

**RIZZA SETIA OCTAVIARIE**

**NIM 071511233013**

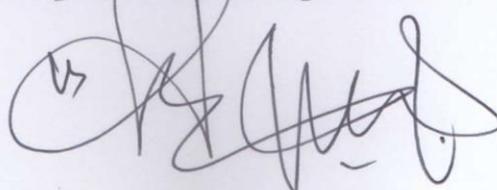
Disetujui untuk diujikan di hadapan Komisi Penguji  
Surabaya, 31 Mei 2019

**Dosen Pembimbing**



**M. Muttaqien, S.IP., MA., Ph.D**  
**NIP 19730130 199903 1 001**

**Mengetahui,  
Ketua Departemen Hubungan Internasional**



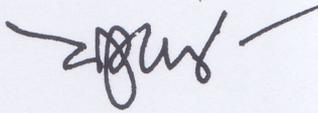
**M. Muttaqien, S.IP., MA., Ph.D**

**HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Komisi Penguji pada hari  
Jumat, 31 Mei 2019, pk1 09.00  
Di Ruang Sidang Cakra Buana Catur Matra, Gedung C  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Airlangga Surabaya

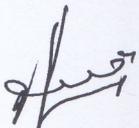
Komisi Penguji

Ketua,



**Drs. Wahyudi Purnomo, M. Phil**  
NIP. 19560921 198810 1 001

**Anggota I**



**Dra. Lilik Salamah M.Si**  
NIP. 19560507 198601 2 001

**Anggota II**



**Dr. Phil. Siti Rokhmawati, S.IP./MIR.**  
NIP. 19791025 200 604 2 001

## HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi skripsi ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan / atau universitas lain dan tidak pernah di publikasikan / ditulis oleh individu selain penyusun kecuali bila dituliskan dengan format kutipan (langsung atau tidak langsung) dalam isi skripsi.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 8 Juli 2019



**Rizza Setia Octaviarie**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan pada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **“Alasan Dibalik Kebijakan Pemutusan Hubungan Diplomatik Oleh Negara Arab Saudi Terhadap Qatar”** Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam tesis ini, tetapi penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi siapa saja yang membacanya. Dalam penyusunan tesis ini, penulis telah memperoleh banyak bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Penulis juga telah menerima saran maupun kritik yang dapat membuat tesis ini menjadi lebih baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan karunianya yang tak terhingga hingga saat ini.
2. Mamaku, perempuan yang membaktikan semua daya, tenaga, kemampuan dan hidupnya untuk keluarganya dan orang-orang disekitarnya. Terimakasih untuk segala sesuatu yang telah Mama lakukan buat aku dan segala doa tengah malam yang selalu Mama panjatkan tanpa jeda untuk keberhasilan anak-anakmu. Terimakasih. Terimakasih. Terimakasih.
3. M. Muttaqien, S.IP., MA., Ph.D\_ selaku dosen pembimbing dan kepala departmen Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Hubungan Internasional Universitas Airlangga yang telah banyak memberikan petunjuk, meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran dalam membimbing saya untuk menyelesaikan skripsiku ini.
4. Drs. Wahyudi Purnomo, M. Phil, Dr. Phil. Siti Rokhmawati, S.IP./ MIR. selaku dosen penguji ketua dan anggota penguji. Terima kasih atas waktu, bimbingan, arahan, kritik dan saran, serta wejangan yang telah diberikan kepada penulis.
5. Seluruh staf pengajar Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Airlangga yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu berharga kepada penulis.

6. Segenap angkatanku, 2019/2020 yang telah menemani sejak awal kuliah dan menemani hari-hari menempuh perkuliahan, nemenin bercanda, nemenin ngejurnal, nemenin hingga titik ini yang ga sanggup aku sebutin satu persatu.

Surabaya, 8 Juli 2019

Penulis

**DAFTAR ISI**

	Halaman
Sampul Depan .....	i
Sampul Dalam.....	ii
Pernyataan Orisinalitas.....	iii
Ucapan Terima Kasih.....	vi
Ringkasan.....	v
Summary .....	vii
Abstrak .....	viii
Abstract .....	xi
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel .....	xiii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Tinjauan Pustaka.....	9
1.5 Kerangka Pemikiran .....	14
1.6 Hipotesis .....	17
1.7 Metodologi Penelitian .....	18
1.7.1 Operasionalisasi Konsep.....	18
1.7.1.1 Blokade .....	18
1.7.1.2 Agresivitas Politik.....	21
1.7.1.3 Konsep Pemikiran.....	25
1.7.2 Tipe Penelitian .....	25
1.7.3 Jangkauan Penelitian.....	25
1.7.4 Tekhnik Pengumpulan Data.....	25
1.7.5 Tekhnik Analisa Data .....	25
1.7.6 Sistematika Penelitian.....	26
<b>BAB II      DINAMIKA HUBUNGAN ARAB SAUDI DAN QATAR</b>	
2.1 Dinamika Hubungan Arab Saudi dan Qatar.....	27
<b>BAB III      PERANAN PEMIKIRAN IKHWANUL MUSLIMIN DALAM KEBIJAKAN QATAR YANG DIANGGAP ARAB SAUDI DAPAT MENGANCAM STABILITAS KAWASAN TIMUR TENGAH</b>	
3.1 Kebijakan Qatar Yang Dinilai Arab Saudi Mengancam Keamanan Kawasan.....	38
3.1.1 Penerimaan Qatar Terhadap Ikhwanul Muslimin .....	40
3.1.2 Al Jazeera Sebagai Media Kritik terhadap Arab Saudi .....	42

3.1.3	Kerjasama Qatar dan Iran dalam Perspektif Arab Saudi .....	48
-------	--	----

<b>BAB IV</b>	<b>PERBEDAAN DASAR PEMIKIRAN IKHWANUL MUSLIMIN YANG DIANUT OLEH QATAR DAN PEMIKIRAN SALAFI OLEH ARAB SAUDI</b>	
4.1	Ikhwanul Muslimin dan Qatar .....	60
4.1.1	Sikap Ikhwanul Muslimin terhadap Demokratisasi.....	63
4.1.2	Sikap Qatar Terhadap Fenomena Arab Spring di Beberapa Negara.....	64
4.1.3	Analisis Kebijakan Qatar yang Dipengaruhi oleh Pemikiran Ikhwanul Muslimin.....	73
4.2	Salafi dan Arab Saudi.....	76
4.2.1	Sikap Salafi Terhadap Proses Demokratisasi.....	77
4.2.2	Respon Arab Saudi Terhadap Fenomena Arab Spring di Beberapa Negara .....	79
4.2.3	Analisis Kebijakan Arab Saudi Yang Dipengaruhi Oleh Pemikiran Salafi .....	86
4.3	Konklusi .....	88
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>94</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>

## DAFTAR AKRONIM

Aramco	: <i>Arabian American Oil Company</i>
CNN	: <i>Cable News Network</i>
FJP	: <i>Freedom Justice Party</i>
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
GCC	: <i>Gulf Cooperation Council</i>
IAEA	: <i>International Atomic Energy Agency</i>
IM	: <i>Ikhwanul Muslimin</i>
IRIB	: <i>Islamic Republic of Iran Broadcasting</i>
ICRO	: <i>Islamic Culture Relation Organization</i>
IMEX	: <i>International Merchantile Exchange</i>
JI	: <i>Jamaah Islamiyah</i>
LNG	: <i>Liquid Natural Gas</i>
NPT	: <i>Non Proliferation Treaty</i>
OKI	: <i>Organisasi Kerjasama Islam</i>
QNA	: <i>Qatar News Agency</i>
UEA	: <i>Uni Emirat Arab</i>
WAAKS	: <i>We Are All Khaled Said</i>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1	: Riwayat Hubungan Arab Saudi dan Qatar tahun 1995-2017	37
Tabel 2	: Penurunan Harga Minyak Pada tahun 2014	69

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	: Statistik Topik dan Jenis Pemberitaan Al Jazeera Terhadap Saudi Saat Konflik	45
Grafik 2	: Kecenderungan Pemberitaan Al Jazeera Terhadap Saudi Saat Konflik	46
Grafik 3	: Produksi dan Konsumsi Minyak Mentah Global 2011-2017	52

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1	: Realisasi Keputusan Pemutusan Hubungan Diplomatik Arab Saudi dan Qatar	4
Gambar 2	: Hubungan antara Struktur Normatif dan Perilaku Negara	16
Gambar 3	: Negara yang Memutuskan Hubungan diplomatik dengan Qatar	39
Gambar 4	: Perbandingan GDP Arab Saudi dan Qatar	40
Gambar 5	: Ladang Gas Bersama Qatar dan Iran	49
Gambar 6	: Yusuf Al Qoordhowi dan Emir Qatar	61
Gambar 7	: Menlu Qatar Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani	62
Gambar 8	: Peristiwa Bakar Diri Mohammed Boauzizi	66
Gambar 9	: Demonstrasi Tunisia Memprotes Pemerintahan Rezim Ben Ali yang Dipicu Peristiwa Bakar Diri Mohammed Boauzizi	67
Gambar 10	: Pidato Pengunduran Diri Presiden Tunisia Ben Ali	68
Gambar 13	: Pidato Pengunduran Diri Presiden Mesir Hosni Mubarak	69
Gambar 15	: Wael Ghanim Aktivis Revolusi Mesir	80
Gambar 16	: Tampilan Laman Facebook “We Are All Khaled Said”	80
Gambar 17	: Revolusi People Power di Mesir	81

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang blokade yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap Qatar dikarenakan *Qatar News Agency* (QNA-Kantor Berita Qatar) ditenggarai diretas oleh pihak yang tidak diketahui dengan membuat sebuah *running text* yang seolah-olah mengesankan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani memuji pihak Hamas; menganjurkan persahabatan dengan Iran; dan merekomendasikan hubungan baik dengan Israel. Sikap keras yang dilakukan oleh Arab Saudi ini tentunya memiliki latar belakang motivasi Arab Saudi khususnya yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri tentunya pasti didasari kepentingan nasional yang pastinya memiliki alasan yang kuat untuk melindungi, mempertahankan kekuasaan serta keamanan teritorial. Peneliti melihat ada aspek-aspek struktur dan identitas yang berada dibalik keputusan yang dilakukan Arab Saudi dengan mengambil tindakan blokade terhadap Qatar. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa adanya perbedaan identitas ideologi dibelakang aktor negara. Antara lain kedekatan Qatar dengan organisasi Ikhwanul Muslimin dan negara Iran menyebarkan revolusi Islam menjadi penyebab utama yang membuat Arab Saudi melakukan tindakan tersebut. Aktivitas Qatar dan Ikhwanul Muslimin saat mengambil kebijakan-kebijakan luar negeri Qatar berkaitan dengan rentetan momentum Arab Spring, campur tangan Qatar di kantor berita Al Jazeera memberikan pengaruh besar dalam bagaimana Arab Saudi memandang bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Qatar akan melemahkan stabilitas kawasan.

Kata Kunci : Arab Saudi, Qatar, Blokade, Salafi, Ikhwanul Muslimin

## ABSTRACT

This study discusses the blockade carried out by Saudi Arabia against Qatar because the Qatar News Agency (QNA-Qatar News Agency) is suspected of being hacked by unknown parties by making a running text that impresses the Emir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani praising the Hamas party; advocating friendship with Iran; and recommend good relations with Israel. This hard attitude taken by Saudi Arabia certainly has a motivational background for Saudi Arabia, especially those related to foreign policy, of course, certainly based on national interests, which certainly has strong reasons to protect, maintain territorial power and security. The researcher saw that there were aspects of the structure and identity behind the decisions made by Saudi Arabia by taking blockade actions against Qatar. In this study it was found that there were differences in ideological identity behind state actors. Among other things, the closeness of Qatar with the Muslim Brotherhood organization and the Iranian nation spreading the Islamic revolution was the main cause that made Saudi Arabia take such actions. The activities of Qatar and the Muslim Brotherhood when taking Qatari foreign policies relating to the Arab Spring momentum, Qatar's intervention in Al Jazeera news agency had a major influence on how Saudi Arabia viewed that policies carried out by Qatar would weaken regional stability.

**Keywords: Saudi Arabia, Qatar, Blockade, Salafi, Muslim Brotherhood**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 LATAR BELAKANG**

Pada 23 Mei 2017, *Qatar News Agency* ditenggarai diretas oleh pihak yang tidak diketahui dengan membuat sebuah *running text* yang seolah-olah mengesankan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani memuji pihak Hamas; menganjurkan persahabatan dengan Iran; dan merekomendasikan hubungan baik dengan Israel.

Pada waktu yang sama muncul *tweet* dari kantor berita QNA yang menyatakan bahwa Qatar menuduh Arab sedang merencanakan penentangan pada Qatar kemudian menginstruksikan penarikan semua duta besar dari Doha. Meskipun *tweet* tersebut langsung dihapus, namun kerusakan diplomatik yang ditimbulkannya tak terelakkan. Saluran satelit di Arab Saudi berulang kali menayangkan cuplikan berita tersebut, dan semakin meningkatkan suhu politik.

Dinamika isu semakin bergulir, ditandai dengan Bahrain memutuskan hubungan dengan Qatar pada 5 Juni 2017, kemudian disusul beragam kejadian lainnya antara lain maskapai penerbangan yang berbasis di Abu Dhabi, Etihad Airways dan maskapai yang berbasis di Dubai, Emirates, membekukan semua penerbangan dari dan ke Doha, mulai Selasa pagi menutup penerbangan ke Qatar, yang direspon Kemenlu Qatar sebagai tindakan yang merusak kedaulatan<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40160534> akses pada 27 Juni 2019

Disusul dengan Yaman memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar sebagai bentuk dukungan ke Arab. Mengikuti Emirates dan dan Etihad, maskapai penerbangan FlyDubai, Saudi Airlines, Air Arabia membatalkan semua penerbangan ke Doha.

Pukul 2 siang, Arab Saudi menutup perbatasan darat dan laut dengan Qatar. Kemudian Mesir memanggil para duta besarnya pulang dari Qatar dan memberi waktu mereka 48 jam untuk meninggalkan Doha. Selanjutnya pukul 4 sore waktu setempat, pelabuhan Fujairah UEA meolak semua kapal-kapal berbendera Qatar untuk berlabuh, hal ini menyebabkan suplai bahan makanan dari Iran terhambat menjadi 12 jam perjalanan karena harus menempuh jalur yang lebih panjang. Kemudian, Kantor berita milik Qatar Al Jazeera di Arab Saudi juga ditutup. Pukul 7.30 malam Kementerian Penerbangan Sipil Mesir mengumumkan bahwa zona udara Mesir ditutup bagi Qatar<sup>2</sup>.

Pada hari selanjutnya 6 Juni 2017, pukul 1 dinihari Menlu Qatar Syaikh Muhammad Bin Abdulrahman Al Thani menyampaikan di Al Jazeera bahwa akan mengadakan dialog secara terbuka dengan pihak Arab Saudi untuk membendung krisis. Presiden Erdogan juga turun tangan menghubungi pemimpin negara-negara Teluk, Rusia, Kuwait dan Arab Saudi untuk meredakan tensi ketegangan dan mengutamakan kepentingan perdamaian dan stabilitas regional.

Menyadari kondisi yang kian memanas, akhirnya dengan mediasi dari Kuwait, pihak negara-negara Teluk mengajukan daftar tuntutan pada Qatar yang berisi 13 tuntutan, yakni ; (1) Agar Qatar membatasi hubungan diplomatik dengan

---

<sup>2</sup> Nurwijoyo, Agung, dkk. Tensi DiplomatiK Kawasan Teluuk : Pemutusan Hubungan DiplomatiK dan Isolasi Negara-negara Teluk Terhadap Qatar, 2017

Iran, mengeluarkan anggota Garda Revolusi Iran dari Qatar dan menghentikan kerjasama gabungan militer dengan Iran, berhubungan dengan Iran hanya perdagangan sesuai dengan sanksi AS dan internasional yang ditetapkan, (2) Memutuskan semua hubungan dengan kelompok teroris Ikhwanul Muslimin, (3) Menghentikan siaran Al Jazeera, (4) Menutup kantor berita yang didanai oleh Qatar, secara langsung maupun tak langsung, termasuk *Arabi21*, *Rassd*, *Al Araby Al-Jadeed*, dan *Middle East Eye*, (5) Mengakhiri kerjasama militer gabungan dengan Turki di Qatar, (6) Menghentikan semua bentuk sarana pendanaan untuk individu, kelompok atau organisasi yang telah dituduh sebagai teroris oleh negara Arab Saudi, UEA, Bahrain, Mesir dan AS, (7) Menyerahkan tokoh teroris dan individu yang dicari oleh pihak Arab Saudi, UEA, Mesir dan AS, membekukan aset mereka, informasi tempat tinggal dan gerakan pendanaan teroris, (8) Akhiri campur tangan Qatar dengan permasalahan negara berdaulat, (9) Menghentikan kontak dengan semua pihak oposisi politik di Arab Saudi, UEA, Bahrain dan Mesir, kemudian menyerahkan semua dokumen yang merinci kontak Qatar sebelumnya dan dukungan yang ditujukan pada pihak tersebut, (10) Membayar reparasi dan kompensasi atas hilangnya nyawa dan kerugian-kerugian yang disebabkan oleh kebijakan Qatar dalam beberapa tahun terakhir, (11) Mensejajarkan diri dengan negara-negara Teluk dan negara Arab lainnya secara militer, politik, sosial dan ekonomi sesuai dengan kesepakatan yang dicapai dengan Arab Saudi pada tahun 2014, (12) Menyetujui semua tuntutan dalam waktu 10 hari setelah diserahkan kepada Qatar, namun daftar ini tidak menentukan apa yang dilakukan oleh negara-negara penuntut jika Qatar menolak

mematuhinya, (13) Menyetujui audit bulanan untuk tahun pertama setelah menyetujui tuntutan, kemudian dilakukan perkuartal setelah tahun kedua selama 10 tahun akan dilakukan pemantauan kepatuhan terhadap Qatar<sup>3</sup>.

**Gambar 1**  
**Realisasi Keputusan Pemutusan Hubungan Diplomatik Arab Saudi dan Qatar**



Sumber : Al Haramain

Konsekuensi dari kondisi ini salah satunya adalah timbulnya gangguan transportasi jalur umrah ke Mekkah yang melalui Qatar. Selain itu, Warga Qatar yang melakukan pernikahan dengan warga negara Arab Saudi juga mengalami kebingungan, sebab muncul wacana pengusiran warga Qatar dari negara-negara tersebut dalam waktu 14 hari<sup>4</sup>.

Saudi Arabi merealisasikan keputusan pemutusan hubungan diplomatik tersebut dengan melarang warganya untuk pergi ke Qatar, baik bermukim ataupun

<sup>3</sup> <https://kumparan.com/ahmad-rifai/daftar-tuntutan-negara-negara-arab-terhadap-qatar>, akses pada 19 Agustus 2018

<sup>4</sup> Affan, Ramli. "Krisis Qatar, Keruntuhan Proxy dan Ikhwanisme Indonesia". Jaringan Survey Inisiatif. 2017

melintasi Qatar, bagi warga Arab Saudi yang bermukim di Qatar dan para wisatawan Arab Saudi harus segera meninggalkan Qatar dalam waktu 14 hari, demikian pula sebaliknya warga Qatar yang tinggal di Arab Saudi wajib meninggalkan Qatar dalam waktu 14 hari, namun Kerajaan Saudi tetap memberikan komitmennya untuk tetap memberikan pelayanan dan kemudahan bagi jamaah haji dan umrah bagi warga Qatar<sup>5</sup>.

Menghadapi kondisi ini pemerintah Qatar, Kementerian Dalam Negeri Qatar merespon dengan merilis bantahan resmi dan membentuk tim investigasi dengan meminta bantuan badan keamanan Inggris dan FBI sebagai pihak yang netral dan mengawasi pelaksanaan investigasi. Dari hasil penyelidikan *preliminary report*, ditemukan adanya bukti peretasan yang dilakukan dengan teknologi tinggi dengan memanfaatkan *cyber bug* yang telah ditanam pada situs QNA sejak April 2017<sup>6</sup>.

Berbekal temuan tersebut, Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed Abdulrahman Al-Thani dalam Konferensi Pers di Doha pada 6 Juni 2017 menyatakan bahwa Qatar akan menyikapi hal ini dengan tidak akan memperburuk situasi, serta memilih menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan di meja negosiasi<sup>7</sup>.

Sementara nagara lain di kawasan Timur Tengah misalnya Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu menyatakan sikap sangat menyesalkan keretakan

---

<sup>5</sup> <http://serambiharamain.com/realisasi-keputusan-pemutusan-hubungan-diplomasi-saudi-terhadap-qatar/> akses pada 19 Agustus 2018

<sup>6</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41217175> akses pada 27 Juni 2019

<sup>7</sup> Haryono, Willy. 2017. dalam [\[http://internasional.metrotvnews.com/dunia/Rb1OzY1K-qatar-tegaskan-akan-menahan-diri-di-tengah-kisruh-diplomatik\]](http://internasional.metrotvnews.com/dunia/Rb1OzY1K-qatar-tegaskan-akan-menahan-diri-di-tengah-kisruh-diplomatik) Diakses pada 28 Maret 2018

hubungan Qatar dengan negara-negara Arab lainnya dan menyerukan agar kedua belah pihak melakukan perundingan. Turki juga menawarkan bantuan untuk membantu menengahi konflik ini<sup>8</sup>.

Sementara dari negara Eropa, Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson menghimbau agar negara-negara Teluk yang melakukan blokade pada Qatar untuk mencabutnya, dan mengutamakan dialog semeja untuk menyelesaikan konflik ini. Johnson juga menyampaikan harapan besar pada Kuwait untuk bisa menjadi penengah dalam masalah ini<sup>9</sup>.

Sementara itu dampak konflik Qatar ini tentunya memiliki dampak bagi negara-negara Uni Eropa, sebab Qatar merupakan pengeksport LNG dunia, dan mencakup sepertiga suplai LNG internasional, dimana *buyer* LNG Qatar tersebar mulai Jepang, Korea Selatan, India dan beberapa negara Uni Eropa seperti Inggris, Spanyol dan Polandia<sup>10</sup>. Hingga saat pengiriman LNG Qatar ke negara-negara *buyer* ini memang masih belum terpengaruh, sebab rute laut melalui Oman dan Iran masih bisa diakses untuk pengiriman 80 juta ton LNG Qatar.

Kemampuan dan mandiri secara finansial membuat Qatar memiliki kebijakan politik luar negeri yang cenderung “*open minded dan independent*” dan

---

<sup>8</sup> Tempo.co. 2017. dalam [<https://dunia.tempo.co/read/881828/krisis-diplomatik-qatar-negara-arab-turki-siap-menengahi>] Diakses pada 28 Maret 2018

<sup>9</sup> Maulana, Victor. 2017. dalam [<https://international.sindonews.com/read/1219075/43/inggris-serukan-saudi-cs-cabut-blokade-qatar-1499582297>] Diakses pada 29 Maret 2018

<sup>10</sup> Sindo, 2017. dalam [<https://economy.okezone.com/read/2017/06/15/320/1716868/krisis-qatar-akan-hantui-pasar-energi-uni-eropa>] Diakses pada 29 Maret 2018

lebih banyak mengandalkan *soft power*, misalnya melalui media pendidikan, budaya, pariwisata, ekonomi, dan beragam bantuan filantropi kemanusiaan<sup>11</sup>.

Kemampuan Qatar melakukan diplomasi dengan beragam pihak ini menjadikan Qatar sebagai mediator konflik-konflik yang disegani. Antara lain Qatar membantu menjadi mediator konflik di Lebanon, mediator konflik yang terjadi di Maroko hingga Sahara Barat, mediator dalam Perang Darfur melawan pemerintahan di Khartoum, Qatar juga berperan mengembalikan Hamas dari aliansi Rusia-Suriah-Iran ke Turki-Mesir<sup>12</sup>.

Namun di lain pihak, sikap luar negeri Qatar ini justru membuat negara-negara tetangga cemas dan marah karena dianggap mencampuri urusan internal negara lain, dan tidak selaras dengan kepentingan negara-negara kawasan. Qatar dinilai melanggar kode etik norma dan tata nilai regional yang telah dibangun Saudi Arabia di wilayah Teluk. Terutama dukungan Qatar pada gerakan Ikhwanul Muslimin, Hamas, faksi-faksi bersenjata di Libya dan Suriah yang justru ditentang oleh UEA dan Saudi Arabia<sup>13</sup>.

Bagaimanapun hubungan diplomatik ini memang membawa implikasi ekonomi bagi berbagai pihak di negara-negara Teluk, sebab perdagangan ekonomi Qatar dengan negara-negara Teluk tersebut mencapai USD 11 miliar pada kuartal

---

<sup>11</sup> <https://www.nytimes.com/2019/04/04/fashion/qatar-luxury-fashion-national-museum-blockade.html> akses pada 27 Juni 2019

<sup>12</sup> <https://dunia.tempo.co/read/889491/tiga-rahasia-diplomasi-qatar-hingga-jadi-kuat> akses pada 27 Juni 2019

<sup>13</sup> Ibid

tahun 2017<sup>14</sup>, khususnya Uni Emirat Arab dan Bahrain sebab mereka menyumbang nilai transaksi 86% dari total kerjasama dagang dengan pihak Qatar.

Tak hanya itu saja, pada minggu pertama blokade Qatar, bagi Arab Saudi, imbas paling terasa adalah harga minyak dunia yang melorot ke angka USD 46,5/barell saat konflik mencuat, saat blokade diumumkan harga minyak naik menjadi 48,3 perbarell, hal ini ditenggarai karena banyaknya pipa minyak Aramco (*Arabian American Oil Company*) milik Saudi Arabia yang melintasi Qatar, sehingga sedikit banyak konflik ini mengganggu jalur distribusi minyak tersebut<sup>15</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menekankan pada bagaimana latar belakang motivasi Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar. Sebuah keputusan, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri tentunya pasti di dasari dengan kepentingan nasional yang pastinya memiliki alasan yang kuat untuk melindungi, mempertahankan kekuasaan serta keamanan teritorial.

Kebijakan luar negeri adalah sebuah bentuk interaksi yang terjadi antar negara karena di dalamnya terdapat tindakan dan juga respon dari tindakan tersebut. Dalam proses memutuskan kebijakan di luar negeri, elemen paling utama pastinya adalah pemimpinnya, sebab pemimpin adalah aktor utama yang menjadi *driven* kebijakan suatu negara, namun selain pemimpin, ada aktor-aktor politik lainnya, misalnya negara-negara lain, kebijakan internasional, pers, atau pada abad ini bentuk-bentuk kekuatan ekonomi suatu negara juga bisa menjadi *driven*

---

<sup>14</sup> <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2981162/saudi-cs-putusan-hubungan-diplomatik-ekonomi-qatar-terguncang> diakses pada 20 Agustus 2018

<sup>15</sup> <https://tirto.id/imbas-ekonomi-putusnya-hubungan-diplomatik-saudi-qatar-cp5d> diakses pada 20 Agustus 2018

tertentu dalam memutuskan kebijakan luar negeri mereka. Maka latar belakang dan motivasi Arab Saudi dengan kebijakan luar negerinya melakukan blokade terhadap Qatar ini sangat menarik untuk dikaji.

## **I.2 RUMUSAN MASALAH**

Melalui penelitian ini, peneliti merumuskan masalah sesuai dengan paparan diatas adalah :

“Mengapa Arab Saudi memutuskan untuk melakukan blokade terhadap Qatar pada tahun 2017?”

## **I.3 TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti latar belakang negara Arab Saudi ataupun negara-negara lain di wilayah Teluk melakukan blokade secara laut, darat, dan udara terhadap negara Qatar. Sebab blokade yang dilakukan oleh Arab Saudi ini memberi kesan sewenang-wenang, dan memberi dampak negatif bagi kondisi sosial, ekonomi, kedua belah negara.

## **I.4 TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian ini, peneliti akan melakukan peninjauan pada tulisan-tulisan yang berkaitan dengan identitas dan kebijakan luar negeri, terutama kebijakan luar negeri yang diambil oleh Arab Saudi. Sebab ketika membahas Qatar dan Arab Saudi terdapat suatu relasi antara negara dan agama yang saling berkaitan, khususnya relasi yang berkaitan dengan kelompok-kelompok radikal agama yang dihindari oleh Arab Saudi sebagai pemimpin GCC (*Gulf Cooperation Council*),

selama ini GCC memang dikenal memiliki latar belakang Islam fundamentalis yang kuat, juga kepentingan terhadap Eropa dan Amerika. Negara barat sebagai negara industri adalah buyer utama produk minyak dari anggota GCC. Diantara anggota GCC juga diikat oleh perjanjian, dimana setiap anggota GCC dilarang untuk mendukung kelompok, individu personal, termasuk memberikan bantuan dalam bentuk apapun yang mengancam kondisi keamanan dan stabilitas negara-negara GCC.

Berikut akan disajikan beberapa tinjauan penelitian dari Khalil E Jahsan dengan tulisan "*The Crisis In Gulf Relations Old Rivaries, New Ambition*" (2017), kemudian tulisan kedua milik Irnad K Harb "*Why Qatar? Explaining Contentious Issues*" (2017) dan tulisan dari Joe Macaroon "*Analysis of the 13 Demands*" (2017) untuk memetakan keadaan antara Arab Saudi dan Qatar untuk melihat dinamika yang terjadi.

Sementara dari negara lain yang juga bisa dijadikan salah satu rujukan adalah pemutusan hubungan diplomatik antara Iran dan Kanada dalam tulisan Mark Hitcock "*Iran: The Coming Crisis: Radical Islam, Oil, and The Nuclear Threat*" (2006) untuk menelaah alasan sebuah negara melakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan mitranya.

Menurut kajian dari Khalil E. Jahsan akar utama dari krisis ini, berawal sejak tahun 1995 ketika politik luar negeri Qatar yang fleksibel dan dinamis memberikan negara tersebut kesempatan untuk memiliki hubungan yang lebih cair dan seimbang dengan negara-negara lainnya. Qatar juga membina hubungan yang sangat baik dengan Rusia, khususnya karena antara Qatar dan Rusia sama-

sama bergabung di IMEX (*International Merchantile Exchange*) sebagai negara-negara importir gas di dunia.

Tak hanya itu saja, Qatar juga memiliki kerjasama dengan Rusia dalam hal kerjasama militer khususnya yang berkaitan dengan teknologi modern, sementara pada saat yang sama Qatar juga melakukan belanja senjata di perlengkapan militer buatan AS<sup>16</sup>. Sementara di dalam negerinya, Qatar memiliki pola kebijakan yang bisa dikatakan radikal bagi negara-negara di Timur Tengah tersebut, misalnya cara Qatar memberikan peran dan kesempatan bagi perempuan di ruang publik, liberalisasi akses pendidikan, serta hosting kampus satelit dari universitas-universitas terkemuka di Amerika Serikat.

Tak hanya itu, emir Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa juga menyumbangkan dana pribadi bagi pembangunan gereja-gereja Kristen di negaranya. Khalil E. Jahsan menilai apapun motif tersembunyi dari Arab Saudi, ini adalah upaya Arab Saudi untuk mengarahkan Qatar agar mau dan tunduk sesuai dengan kesepakatan negara-negara Teluk lainnya sehingga tidak menimbulkan ancaman potensial di antara negara di Timur Tengah tersendiri.

Sementara Irnad K Harb justru melihat dari aspek lainnya, ia menilai hal utama yang membuat ketegangan antara Qatar dan Arab Saudi karena kedekatan Qatar dengan tokoh Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir, yang memiliki ideologi dan menentang prinsip yang banyak dianut oleh negara-negara Teluk. Sementara Qatar justru bertindak sebaliknya, bentuk dukungan Qatar pada organisasi ini adalah pemberian hak istimewa pada Syeikh Yusuf Qordhowi sehingga memiliki

---

<sup>16</sup> Jahnsan E, Khalil. Crisis in The Gulf Cooperation Council. Arab Center Washington DC. 2017

keleluasaan untuk menyampaikan ideologi-ideologi Ikhwanul Muslimin ke seluruh dunia melalui jaringan televisi yang dimiliki Qatar yakni Al-Jazeera.

Joe Macaron memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menilai konflik Timur Tengah antara Arab Saudi dan Qatar ini, ia menilai yang menjadi sorotan dari Arab Saudi, khususnya adalah hubungan mesra yang terjalin antara Qatar dan Iran. Selama ini Qatar dan Iran sebagai negara eksportir gas terbesar, mereka banyak terlibat kerjasama dalam IMEX, antara Qatar dan Iran juga terlibat kerjasama dalam "*sharing field*" lapangan gas terbesar milik Qatar di North Field, mereka juga menjadi pelopor OPEC-GAS sebagai kelompok negara-negara importir gas alam.

Pembahasan mengenai Arab Saudi dan Qatar ini tentunya masih memiliki beragam latar belakang dan penyebab apabila kita menilik penulis-penulis lainnya yang pada umumnya seringkali menggunakan perspektif realisme dalam tulisannya untuk menilai situasi konflik yang berkembang antara Arab Saudi dan Qatar.

Oleh karenanya penulis melihat bahwa penelitian ini akan melihat dari perspektif konstruktivisme. Konstruktivisme meyakini bahwa struktur-struktur yang meyakini seluruh manusia lebih banyak ditentukan oleh *shared ideas* atau gagasan-gagasan yang diyakini bersama daripada kekuatan material, kedua adanya kepercayaan bahwa identitas ataupun kepentingan dari para aktor-aktor tidak hanya ditentukan oleh motif, alasan, ataupun kepentingan mereka, namun juga dibentuk oleh interaksi-interaksi antar individu dalam lingkungan di sekitarnya, baik berupa kondisi struktur sosial, keadaan ekonomi keragaman

budaya atau hal lainnya. Konstruktivisme kurang lebih meyakini kondisi dimana dunia sosial adalah bukan sesuatu yang “*given*” atau terberikan yang hukum-hukumnya didapat melalui penelitian ilmiah dan bisa dijelaskan melalui teori ilmiah.

Meninjau lebih lanjut, sementara dari aspek konstruktivisme dapat dilihat bagaimana Qatar dikonstruksikan sebagai negara yang “mendukung terorisme” oleh Saudi Arabia, Qatar memang memberikan dukungan kepada Ikhwanul Muslimin semenjak tahun 2011, sejak tahun 1960-an bahkan Yusuf Al Qordhawi, pemimpin dari Ikhwanul Muslimin tinggal dan memiliki kewarganegaraan di Qatar. Tak hanya itu, Qatar juga memberikan kesempatan yang luas pada Ikhwanul Muslimin menggunakan Al Jazeera media televisi milik Qatar untuk menyebar luaskan pandangannya tentang organisasi maupun aspek-aspek lainnya.

Dari beragam tinjauan literatur ini, peneliti melihat hanya sebuah gambaran yang luas lingkupnya sehingga para penulis tersebut berlebihan dalam memberikan gambaran-gambaran tentang hubungan antara Arab Saudi dan Qatar dan beberapa gambaran lain sebagai pembanding untuk melihat bagaimana negara lain melakukan pemutusan hubungan politik pada negara lainnya, dan sebenarnya terdapat faktor yang lebih dominan dalam mendorong kebijakan-kebijakan politik yang diambil Arab Saudi dalam blokade Qatar ini.

Peneliti menilai pada beberapa aspek, terdapat kurangnya analisis-analisis pada aspek internal untuk melihat sudut pandang Arab Saudi. Apalagi selama ini Arab Saudi dikenal sebagai pemimpin para negara-negara Teluk. Oleh karena itu, aspek penting ini sebagai suatu analisa yang akan digunakan oleh peneliti untuk

melakukan pemetaan dan analisa terhadap motivasi Saudi Arabia melakukan blokade terhadap Qatar, dan bagaimana dampak bagi negara-negara Teluk tersebut ke depannya karena adanya kondisi ini.

## **I.5 KERANGKA PEMIKIRAN**

Pada bagian ini, peneliti akan berusaha menjabarkan mengenai teori yang digunakan untuk menjelaskan fenomena peristiwa blokade Qatar oleh Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya. Pada penelitian ini teori yang digunakan akan lebih mempertajam pada teori kebijakan luar negeri yang berperspektif terhadap konstruktivisme. Terdapat kajian pada hubungan internasional yang dilakukan untuk melakukan analisa terhadap blokade yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap Qatar ini.

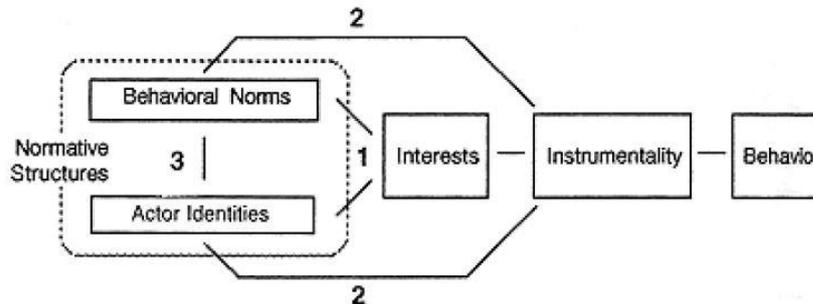
Dalam hal ini, kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara, perumusan suatu kebijakan luar negeri dari aktor tidak dapat lepas dari norma-norma serta identitas serta akibat dari kebijakan luar negeri oleh suatu negara. Sebagai pelopor yang memahami pengkonstruksian sosial pada kebijakan oleh luar negeri, Alexander Wendt menjadikan studi hubungan internasional sebagai interaksi simbolik dalam bentuk perilaku kebijakan suatu negara. Hal mendasar dari teori Alexander Wendt menyatakan bahwa suatu perilaku negara tidak bisa terlepas dari konteks internal maupun eksternal dalam negara tersebut.

Meninjau lebih lanjut, norma menjadi sebuah alasan yang bisa dilihat pada kebijakan-kebijakan luar negeri dalam sebuah negara. Norma dipandang sebagai suatu bentuk respon terhadap kondisi yang ada, dan menjadi kebiasaan dari suatu

negara. Menurut Paul Kowert dan Jeffrey Legro, antara norma dan identitas terdapat perbedaan, norma perilaku dipandang sebagai bentuk isi dari suatu kebudayaan / norma yang memiliki muatan politik internasional. Norma juga menjadi cermin dari arah kebijakan internal dalam suatu negara. Antara identitas dan norma saling berperan dalam membentuk suatu kepentingan ataupun instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Contoh konkrit dari hal ini adalah Qatar sebagai sebuah negara dengan politik luar negeri yang terbuka dan independen. Kemudian, proyeksi dari norma tersebut dapat dilihat dari bagaimana Qatar banyak menerabas hal-hal yang secara rahasia umum dianggap tabu oleh negara-negara Teluk, antara lain hubungan mesra Qatar dengan Iran, suaka yang diberikan Qatar pada Yusuf Al-Qordhowi sebagai pemimpin Ikhwanul Muslimin.

Proyeksi dari sebuah norma dalam suatu negara biasanya juga menjadi sebuah instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuannya, sehingga dalam kondisi Qatar ini kita melihat bagaimana Qatar lebih banyak menggunakan lobi-lobi diplomatik saat menyikapi blokade dengan Arab Saudi dan negara-negara Dewan Teluk lainnya. Berikut adalah diagram yang dipaparkan oleh Paul Kowert dan Jeffrey Legro untuk memetakan kondisi norma dalam hubungan internasional.

Gambar 3 Hubungan antara Struktur Normatif dan Perilaku Negara

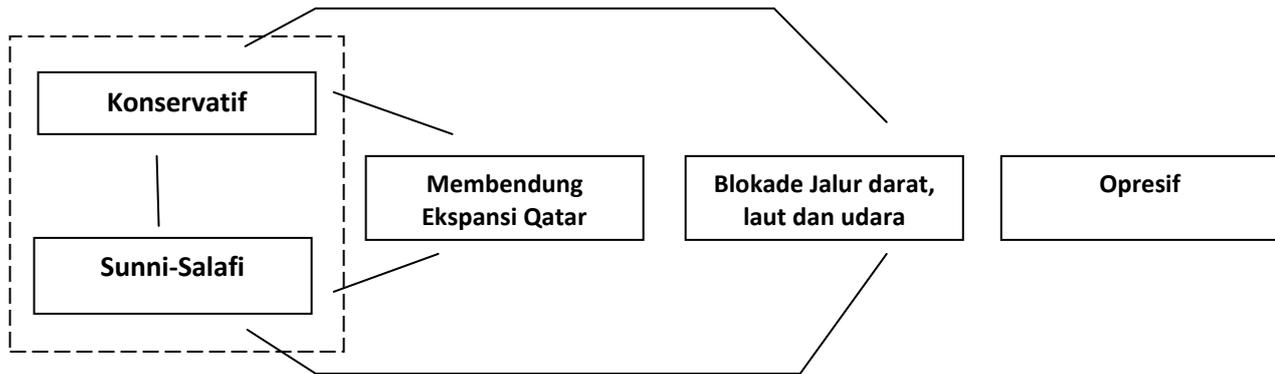


Sumber : Paul Kowert and Jeffrey Legro, *The Culture of National Security : Norms and Identity in World Politics* (New York Columbia University Press, 1966)

Dari gambar ini terlihat bagaimana bentuk mekanisme faktor normatif dari kebijakan luar negeri suatu negara, hal tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, antar lain yaitu : (1) Norma perilaku dan identitas dari aktor negara tersebut menjadi penentu kepentingan apa yang ingin dicapai oleh subjek tersebut, (2) pada saat yang sama, struktur normatif yang terdiri dari identitas dan norma perilaku menentukan instrumen yang harus diprioritaskan oleh negara tersebut, sebab suatu negara memiliki kecenderungan memilih sebuah instrumen yang sesuai dengan sejarah ataupun sesuai dengan kebutuhannya. Hingga, hal ini akhirnya menjadi suatu perilaku negara terkait. Terakhir, (3) antara norma dan perilaku akhirnya saling membentuk antara satu dengan yang lainnya saling menyesuaikan.

Maka untuk memetakan situasi berikut akan diaplikasikan dalam diagram berikut:

**Gambar 2**  
**Skema Hubungan Struktur Normatif Arab Saudi dan Kebijakan Luar Negeri**



Dalam kasus blokade yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap Qatar ini dapat dilihat adanya kesamaan dengan teori-teori normatif kebijakan negara oleh Paul Kowert dan Jeffrey Lego. Hal tersebut terlihat pada gambar bagaimana Arab Saudi memiliki struktur-struktur normatif yang terdiri dari identitas mereka sebagai ketua negara GCC dan norma perilakunya.

Identitas sebagai anggota berpengaruh dalam GCC, kemudian secara normatif Arab Saudi diamini sebagai tetua di kalangan negara-negara Teluk menjadikan Arab Saudi memiliki kuasa untuk melakukan tindakan terhadap negara lain. Arab Saudi terkenal sebagai negara yang sangat konservatif, hal ini berlaku pula dengan kebijakan luar negerinya, Arab Saudi tidak menginginkan perubahan-perubahan terhadap teritorial di negara-negara karena adanya usaha federasi atau yang lainnya. Arab Saudi juga berusaha keras melakukan upaya penangkalan terhadap paham-paham yang bersifat revolusioner yang banyak disebarkan negara-negara pan Arab.

## **I.6 HIPOTESIS**

Dengan memahami latar belakang masalah dan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang diajukan antara lain faktor yang menjadi pendorong pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi dengan melakukan blokade terhadap Qatar karena peningkatan agresivitas politik Qatar yang dapat mengancam stabilitas keamanan Kawasan Timur Tengah. Dalam hal ini, posisi politik Qatar di belakangnya didukung oleh Ikhwanul Muslimin yang cenderung moderat berseberangan dengan kebijakan-kebijakan anggota GCC lain, khususnya Arab Saudi yang cenderung dipengaruhi pemikiran salafi sehingga menimbulkan keresahan pada negara tersebut.

## **I.7 METODOLOGI PENELITIAN**

### **1.7.1 Operasionalisasi Konsep**

#### **1.7.1.1 Blokade**

Menurut Phillips Jeffrey Drew, suatu blokade adalah “*an action of war that directed to the exercise of economic pressure on an adversary*”, atau blokade diartikan sebagai bentuk perang namun menggunakan tekanan dari aspek ekonomi. Blokade muncul berawal dari istilah militer dimana berarti adalah bentuk operasi dalam militer secara agresif untuk mencegah kapal atau pesawat terbang atau transportasi apapun dari udara, laut dan darat dari semua negara musuh ataupun negara netral dilarang untuk memasuki ataupun keluar dari zona tersebut saat berada di bawah kendali suatu aktor negara<sup>17</sup>. Tujuan utama dari

---

<sup>17</sup> Drew, Phillips Jeffrey. “An Analysis of The Legality of Maritime Blockade in The Context of Twenty-First Century Humanitarian Law”. Queen University. Ontario, Canada, 2012

blokade adalah melumpuhkan perekonomian, sehingga segala bentuk aspek perdagangan akan mengalami hambatan saat suatu negara sedang di blokade.

Ciri-ciri tindakan blokade yang diterapkan pada era modern ini, fokus sebuah tindakan blokade biasanya pada pembatasan terhadap ekonomi negara. Ciri kedua biasanya ditandai dengan pembatasan wilayah teritorial darat, laut dan udara terhadap negara yang di blokade, misalnya pemblokadean jalur laut biasanya kapal-kapal negara yang memblokade ditempatkan agak jauh dari pantai, sehingga dalam blokade tidak ada bentuk kontak senjata. Ciri ketiga ditandai dengan jangkauan wilayah yang di blokade adalah keseluruhan kota, sehingga memiliki efek keterbatasan yang signifikan bagi sebuah negara. Sejauh ini, strategi blokade era modern memang lebih menasar pada sektor ekonomi industri dari negara, sebab jika diamati tidak banyak negara yang tidak memiliki kemandirian sumber daya alam, bahan bakar, ataupun makanan. Sehingga blokade dalam aspek perdagangan tentu saja jangan mengganggu mereka<sup>18</sup>.

Dalam beberapa waktu terakhir, blokade yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap Qatar terlihat melalui tuduhan terhadap oleh koalisi negara-negara Teluk yang dipimpin oleh Arab Saudi mendanai teroris dan sektarian grup yang didukung oleh Iran, termasuk di dalamnya Ikhwanul Muslimim; Hamas; ISIS; dan Al Qaeda sehingga dianggap bisa membahayakan stabilitas kawasan.

Pemutusan hubungan diplomatik tersebut diikuti dengan penutupan wilayah udara, laut dan darat oleh delapan negara, yaitu Saudi, UAE, Bahrain, Mesir, Yemen, Libya sebelah timur, Maldives dan Mauritius. Boikot politik dan

---

<sup>18</sup> Ibid

ekonomi ini dianggap sebagai bagian dari hukuman agar Qatar merubah kebijakan negerinya selaras dengan kepentingan dengan negara-negara yang terhimpun dalam GCC.

### **I.7.1.2 Agresivitas Politik**

Secara umum, agresivitas menurut Baron berkowitz maupun Aronson dalam Watts menyatakan adalah tingkah laku individu yang ditunjukkan untuk melukai atau mencelakakan individu yang tidak menginginkan datangnya tingkah laku tersebut<sup>19</sup>. Sementara Schneiders dalam Barnes mendefinisikan agresi sebagai suatu bentuk respon yang mencari pengurangan ketegangan dan frustasi melalui perilaku yang banyak menuntut, memaksa dan mengusai orang lain<sup>20</sup>. Kemudian Moore dan Fine dalam Dennen mendefinisikan agresi sebagai tingkah laku kekerasan secara fisik ataupun secara verbal terhadap individu lain ataupun terhadap objek-objek<sup>21</sup>.

Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi Qatar yang terlihat melalui industri gas Qatar yang telah berhasil memakmurkan negara ini kemudian menjadi *driven* dari kebijakan luar negeri Qatar. Berdasarkan kondisi tersebut bisa dikatakan kebijakan luar negeri Qatar ini sangatlah agresif yang mana dengan menggunakan uang hasil penjualan sumber daya alamnya Qatar berupaya meningkatkan prestise negaranya di mata dunia internasional.

---

<sup>19</sup> Watts, Meredith W., Are There Typical Age Curves in Political Behavior: The Age Invariance Hypothesis and Political Socialization. *Political Psychology*, 20, 477-523. 1999,

<sup>20</sup> Barnes, Samuel, Max Kaase, et al., *Political Action: Mass Participation in Five Western Democracies*. Beverly Hills, CA: Sage Publications. 1979.

<sup>21</sup> Dennen, JMG Van Der.; "Problems in the Concepts and Definitions of Aggression, Violence, and Some Related Terms". University of Groningen. 1980.

Dengan menggunakan kekayaannya tersebut Qatar dituding menyokong Ikhwanul Muslimin, berhubungan dekat dengan Taliban dan afiliasi-afiliasi Al-Qaeda, dan menjalin keakraban dengan Iran. Stasiun televisi Al Jazeera yang berbasis di Doha juga dituduh menyokong kubu pemberontak Houthi di Yaman. Sementara di mata negara-negara Teluk, kebijakan luar negeri yang dibuat Qatar seringkali justru berseberangan dengan sikap mayoritas negara GCC, Ali Munhanif pengamat Timur Tengah menyatakan bahwa antara Qatar dan negara-negara Teluk seringkali berbeda dalam memandang “persepsi ancaman terorisme”, jika Saudi melihat kelompok oposisi yang harus dibantu adalah Suriah, maka Qatar justru mendefinisikan bahwa Bashar Assad yang harus dibantu karena secara *de jure* dan hukum internasional sebagai rezim yang sah. Kondisi seperti ini membuat negara-negara Teluk, khususnya Arab Saudi memberikan penilaian bahwa Qatar tidak bisa satu suara dengan negara-negara Teluk lainnya, bahkan justru menempatkan Qatar lebih dekat dengan Iran yang menjadi seteru Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya.

### **1.7.1.3 Konsep Pemikiran**

Pemikiran dalam bahasa Inggris disebut *Inference* yang berarti penyimpulan yang berarti mengeluarkan suatu hasil berupa kesimpulan ada juga yang menyebut penuturan dan penalaran. Apa yang dimaksud pembicaraan dalam bagian ini adalah : kegiatan akal manusia, mencermati suatu pengetahuan yang

telah ada, untuk mendapatkan / mengeluarkan pengetahuan yang baru (lain)<sup>22</sup>.  
Terutama dalam konteks rasionalitas *stricto sensu*<sup>22</sup> misalnya dalam ilmu.<sup>23</sup>

Pemikiran adalah aksi (*act*) yang menyebabkan pikiran mendapat pengertian baru dengan perantaraan hal yang sudah diketahui. sebenarnya yang beraksi disini bukan hanya pikiran atau akal budi, yang beraksi sesungguhnya adalah seluruh manusia (*the whole man*). Selanjutnya proses pemikiran adalah suatu pergerakan mental dari satu hal menuju hal lain, dari proposisi satu ke proposisi lainnya, dari apa yang sudah diketahui ke hal yang belum diketahui.

Misalnya dari realitas dunia ini kita dapat membuat pemikiran tentang eksistensi tuhan, dari perbuatan-perbuatan kita, kita dapat membuat pemikiran tentang kemerdekaan kehendak. karena pemikiran merupakan suatu gerak kemajuan, maka juga terjadilah urutan momen-momen, urutan sebelum dan sesudahnya.<sup>24</sup> Jadi, pemikiran adalah sesuatu yang mengkonstruksi apa yang ada dalam benak manusia, yang kemudian mendasari perbuatan, sikap, preferensi terhadap pilihan dan beragam motif lainnya.

Sementara konstruktivisme adalah perspektif psikologis dan filosofis yang memandang bahwa masing-masing individu membentuk atau membangun sebagian besar dari apa yang mereka pelajari dan pahami. Asal kata konstruktivisme adalah *to construct* yang artinya membangun atau menyusun.

---

<sup>22</sup> *Stricto sensu* merupakan salah satu definisi esensial yang memberikan keterangan tentang sifat yang sebenar-benarnya dari hal yang didefinisikan, *in sensu stricto* (dalam arti yang sebenarnya).

<sup>23</sup> Dahri, Sunardji, Ilmu Mantik, Langkah – Langkah Berfikir Logis, Surabaya : PT. Pwu Jawa Timur "Putri" 2009,

<sup>24</sup> *Ibid.* Hal 56

Namun konstruktivisme dalam hubungan internasional, teori ini muncul di tengah perdebatan antara teori-teori yang digolongkan ke dalam aliran materialisme-rasionalisme seperti realisme, neorealisme, neoliberalisme, liberalisme/pluralisme, Marxisme dengan teori-teori radikal yang digolongkan ke dalam aliran reflektivis seperti teori kritis, feminisme dan postmodernisme. Perdebatan kedua aliran tersebut terkait dengan pondasi ilmu hubungan internasional yang dalam bahasa filsafat disebut dengan perdebatan ontologis dan epistemologis.

Aliran rasionalisme menganggap bahwa ada sesuatu di luar sana (fakta materi) yang independen dari pengetahuan kita, sedangkan reflektivis menganggap bahwa tidak ada sesuatu di luar sana yang terpisah dari pengaruh konstruksi pengetahuan subyek dan interaksi dengan lingkungannya. Semua fenomena yang ada adalah hasil dari konstruksi sosial. Dengan kata lain rasionalis menganggap bahwa fakta itu ada sedangkan reflektivis tidak mengakui adanya fakta.

Secara ontologis, konstruktivisme dibangun atas tiga proposisi utama. Pertama, struktur sebagai pembentuk perilaku aktor sosial dan politik, baik individual maupun negara, tidak hanya terdiri memiliki aspek material, tetapi juga normatif dan ideasional. Berbeda dengan neorealis dan marxis, misalnya, yang menekankan pada struktur material hanya dalam bentuk kekuatan militer dan ekonomi dunia yang kapitalis, konstruktivis berargumen bahwa sistem nilai, keyakinan dan gagasan bersama sebenarnya juga memiliki karakteristik struktural dan menentukan tindakan sosial maupun politik. Sumber-sumber material

sebenarnya hanya bermakna bagi tindakan atau perilaku melalui struktur nilai atau pengetahuan bersama. Disamping itu, struktur normatif dan ideasionallah yang sebenarnya membentuk identitas sosial aktor-aktor politik.

Kedua, kepentingan (sebagai dasar bagi tindakan atau perilaku politik) bukan menggambarkan rangkaian preferensi yang baku, yang telah dimiliki oleh aktor-aktor politik, melainkan sebagai produk dari identitas aktor-aktor tersebut. Berbeda para teoretisi neorealis, neoliberal ataupun marxist, yang hanya memberi perhatian pada aspek-aspek strategis dalam arti bagaimana aktor-aktor politik bertindak mencapai kepentingan mereka, teoretisi konstruktivis lebih menekankan pada sumber-sumber munculnya kepentingan, yakni bagaimana aktor-aktor politik mengembangkan kepentingan-kepentingan mereka. Dalam artian ini, terkait dengan proposisi ontologis yang pertama, Alexander Wendt secara jelas mengatakan bahwa, '*Identities are the basis of interests*'.

Ketiga struktur dan agen saling menentukan satu sama lain. Konstruktivis pada dasarnya adalah strukturasionis yakni menekankan peran struktur non-material terhadap identitas dan kepentingan serta, pada saat yang bersamaan, menekankan peran praktek dalam membentuk struktur-struktur tersebut. Artinya, meskipun sangat menentukan identitas (dan oleh karenanya juga kepentingan) aktor-aktor politik, struktur ideasional atau normatif tidak akan muncul tanpa adanya tindakan-tindakan aktor-aktor politik.

Konstruktivis dibangun dari basis ide, norma, budaya, dan nilai. Atas dasar itulah konstruktivis digolongkan ke dalam teori idealis. Formulasi teoritik konstruktivis menyatakan bahwa lingkungan sosial menentukan bentuk identitas

aktor. Identitas kemudian menentukan kepentingan, dan kepentingan akan menentukan bentuk tingkah laku, aksi ataupun kebijakan dari aktor. Pada tahap berikutnya identitas juga akan mempengaruhi bentuk dari lingkungan sosial.

Oleh karena itu, Menurut konstruktivisme, setiap tindakan negara didasarkan pada *meanings* yang muncul dari interaksinya dengan lingkungan internasional. Tindakan negara dalam pandangan konstruktivisme memberikan pengaruh terhadap bentuk sistem internasional, sebaliknya sistem tersebut juga memberikan pengaruh pada perilaku negara-negara.

### **I.7.2 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian eksplanatif yang berusaha penelitian ini berusaha menjelaskan keterkaitan antara kebijakan pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Arab Saudi kepada Qatar.

### **I.7.3 Jangkauan Penelitian**

Penelitian ini dibatasi dengan jangka waktu pada tahun kejadian 2011-2016. Pemilihan jangka waktu ini didasarkan pada peristiwa-peristiwa yang ada antara rentang tahun 2011-2016 sebelum Arab Saudi akhirnya memutuskan melakukan blokade pada Qatar

### **I.7.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan melalui studi literatur yang mencakup buku teks, jurnal ilmiah, berita serta artikel yang berkaitan dengan negara Qatar, Arab Saudi, GCC, dll.

### **I.7.5 Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif karena berupa kasus, artikel-artikel yang dimuat dalam media, maupun pernyataan-pernyataan. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif meliputi tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan<sup>25</sup>.

### **I.7.6 Sistematika Penelitian**

Bab I dimulai dengan rancangan penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran besar mengenai penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini peneliti memberikan gambaran secara umum latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran yang digunakan untuk memahami fenomena tersebut. Pada akhir bab ini akan dijabarkan metodologi yang digunakan untuk melakukan penelitian yang dapat diterima secara ilmiah.

Bab II akan diisi dengan penjabaran tentang dinamika hubungan antara Arab Saudi dengan Qatar, yang awalnya harmonis dalam kerjasama perdagangan, kebudayaan, dll kemudian dikaitkan dengan keberadaan pemikiran salafi dan Ikhwan yang berkembang di kedua negara tersebut sehingga kemudian perbedaan pemikiran yang bersumber dari masing-masing pemikiran tersebut menimbulkan gesekan pada kedua negara. Pada bab ini juga akan dibahas mengenai definisi operasional antara pemikiran Salafi dan Ikhwan di kedua negara tersebut.

---

<sup>25</sup> Uber Silalahi. Metodologi Penelitian Sosial, Bandung : Unpar Press hal 321. 2006.

Bab III peneliti akan melakukan pembuktian hipotesis, dengan menjabarkan peningkatan agresivitas politik Qatar sehingga berpengaruh pada stabilitas keamanan kawasan, sebab Qatar memperjuangkan nilai-nilai demokrasi yang lebih moderat. Termasuk dengan cara menjabarkan beragam upaya Qatar untuk meningkatkan prestise negaranya di mata dunia internasional.

Bab IV peneliti akan menjabarkan hal-hal yang berkaitan dengan sudut pandang Arab Saudi terkait dengan Qatar, khususnya berkaitan dengan pemikiran Ikhwan yang lebih moderat dan tidak sejalan dengan pemikiran Salafi yang cenderung tradisional. Kemudian juga dijabarkan tentang pemikiran Salafi yang cenderung tradisional memiliki pengaruh terhadap kebijakan luar negeri Arab Saudi sementara pemikiran Ikhwani yang mempengaruhi Qatar yang cenderung moderat, sehingga kedua pemikiran tersebut saling menimbulkan kontradiksi.

Bab V Saran dan Kesimpulan.

## BAB II

### DINAMIKA HUBUNGAN ARAB SAUDI DAN QATAR

#### 2.1 Dinamika Hubungan Arab Saudi-Qatar

Pada 5 Juni 2017, Arab Saudi, Mesir, UEA, dan Bahrain memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Transportasi darat dan udara dari negara-negara teluk itu yang menuju ke Qatar juga dibekukan. Negara-negara tersebut menuduh Qatar merusak kestabilan kawasan terkait dukungan Doha terhadap kelompok teroris.

Tudingan bahwa Qatar mendanai para teroris bukanlah isu baru. Pada 2014, negara-negara Teluk juga melakukan pembekuan hubungan diplomatik dengan Qatar atas tuduhan bahwa Doha mendukung Ikhwanul Muslimin yang dianggap organisasi “teroris” oleh Arab Saudi dan UEA. Qatar banyak dikritik oleh negara-negara tetangga terkait dukungannya tersebut.

Hubungan ketiga negara tersebut dengan Qatar kembali membaik setelah delapan bulan, yang ditandai dengan pengembalian duta besar ketiga negara ke Doha. Hubungan Qatar dengan Arab Saudi semakin erat saat Raja Salman dari Arab Saudi berkunjung ke Doha pada 2016 dengan tujuan untuk memperkuat hubungan baik kedua negara. Namun, hubungan baik itu kembali retak dengan adanya pemutusan hubungan diplomatik pada 5 Juni lalu oleh Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain.

Pergolakan hubungan diplomatik antara kedua negara dimulai pada tahun 1995 saat kepemimpinan Qatar diambil oleh Sheikh Hamad atas kudeta kepada

ayahnya Sheikh Khalifah. Pada kepemimpinannya, Sheikh Hamad memutuskan untuk memulai menganut “*Strategic Hedging*” dalam politik luar negerinya<sup>26</sup>.

Tak hanya itu saja kemarahan negara tetangga memang meningkat saat kepemimpinan Emir Hamad. Bersama dengan menteri luar negerinya Sheikh Hamad bin Jassim al Thani, Emir Hamad mulai membangun Qatar dan menjadikan negara terkemuka di Timur Tengah pada tahun 1990an hingga 2000an. Ia mengembangkan infrastruktur gas alam cair dan melakukan perjanjian energi jangka panjang dengan negara-negara industri dan negara berkembang di seluruh dunia, di saat negara Teluk lainnya belum memanfaatkan potensi gas dan menjauh dengan Arab Saudi<sup>27</sup>.

Kerenggangan hubungan ini akibat dari upaya Qatar mendekatkan diri dengan Iran. Upaya yang dilakukan berupa perjanjian yang dilakukan oleh Emir Hammad dengan Iran dalam pengembangan produksi *Liquid Natural Gas* (LNG)<sup>28</sup>. Perselisihan itu meruncing saat Qatar mulai melakukan pengiriman pertama gas alam cair dari cadangan terbesar di dunia. Selain itu, ladang gas Qatar di sebelah utara ternyata dibagi dengan Iran, musuh bebuyutan Arab Saudi. Qatar terus berkembang menjadi salah satu negara terkaya di dunia dengan pendapatan per kapita sebesar 130 ribu dolar AS per tahun.

---

<sup>26</sup> K. Hard. Imad, *Why Qatar? Explaining Contention Issue* dalam Doumar, George dkk. *Crisis In The Gulf Cooperation Council (Challenge and Prospect)*, (Washington DC: Arab Center Washington DC, 2017

<sup>27</sup> <https://tirto.id/rekam-jejak-retaknya-hubungan-qatar-dan-gcc-cqgu> akses pada 27 Juni 2019

<sup>28</sup> Roberts David, “Qatar International Relation Under Emir Tamim”, Norwegian Peace Building Resource Center, (2013): 2, <https://www.files.ethz.ch/isn/170540/Qatar's%20International%20Relations%20under%20Emir%20Tamim.pdf>, 2.

Kekayaan Qatar tak lepas dari posisinya sebagai eksportir LNG nomor satu di dunia. Tahun ini Qatar menggelontorkan 2,7 miliar dolar AS untuk menginvestasikan pada Rosgyft Oil Co milik Rusia. Dengan sumber daya yang dimiliki, Qatar bisa mengembangkan kebijakan luar negerinya yang membuat marah tetangga-tetangganya. Misalnya Qatar mendukung Ikhwanul Muslimin, Hamas di jalur Gaza dan faksi-faksi bersenjata yang ditentang oleh UEA atau Arab Saudi.

Qatar juga mendanai jaringan televisi global Al Jazeera yang dalam pemberitaannya, seringkali menyudutkan pemerintahan negara Arab. Komentar kontroversi pernah dilontarkan saluran Al Jazeera untuk keluarga penguasa Arab Saudi yakni keluarga Al Saud, yang membuat krisis hubungan diplomatik kedua negara semakin memanas. Komentar Al Jazeera ditanggapi Arab Saudi dengan menarik duta besarnya dari Doha, dan membuat Arab Saudi menarik persetujuannya terkait rencana Qatar untuk membangun jaringan pipa gas ke Kuwait yang akan melewati perairan teritorial Arab Saudi<sup>29</sup>.

Perkembangan Qatar fokus mengembangkan gas sedangkan negara tetangga fokus memproduksi minyak yang tergabung dalam GCC sehingga Qatar bebas dan tak terikat dengan Organisasi Negara Pengekspor Minyak, kartel minyak yang didominasi Arab Saudi. Qatar kemudian membangun organisasi dengan memperkuat hubungan dengan Iran yang tentu tak disukai Arab Saudi.

---

<sup>29</sup> Sherif Elashmawy. *The Foreign Policies Of Saudi Arabia And Qatar Towards The Arab Uprisings (The Cases of Egypt, Libya and Bahrain)*.( University of Innsbruck: agustus),18-22. 2014.

Strategi yang dilakukan oleh Qatar pada akhirnya memberikan efek samping pada renggangnya hubungan Qatar dengan Arab Saudi. Kerjasama yang terjadi antara Qatar dengan Iran memicu pada pandangan bahwa Qatar berupaya aktif untuk menekan posisi, kekuatan dan juga keamanan Arab Saudi. Langkah ini kemudian direspon secara negatif oleh Arab Saudi sebab didasarkan pada dua faktor.

Faktor pertama adalah kedekatan Qatar dengan Iran yang merupakan rival bagi negara Arab Saudi di kawasan Timur Tengah. Iran yang menganut Islam Syiah sangat bertentangan dengan Arab Saudi yang menganut Islam Sunni. Berakar dari permasalahan ideologi tersebut, rivalitas ideologi ini kemudian meluas menjadi rivalitas dalam segi pengaruh ekonomi politik serta perebutan kekuasaan di kawasan Timur Tengah.

Faktor kedua adalah saat dimana Qatar membangun kerjasama dengan Iran, penolakan ini dipimpin oleh Arab Saudi dan didukung oleh negara-negara islam lain diluar kawasan Timur Tengah. Selain itu keputusan Qatar untuk membukan kantor perdagangan Israel di Doha pada tahun 1996 menambah panas hubungan Qatar dan Arab Saudi. Arab Saudi tidak lagi bisa menyesuaikan diri dengan elit Qatar yang benar-benar independen dalam pengambilan kebijakannya<sup>30</sup>.

Keputusan Qatar untuk melakukan kerjasama dalam pengembangan gas alam yang dimiliki-nya dengan Iran dan Israel membuat negara-negara teluk terutama negara Arab Saudi merasa tidak di anggap dan tidak diperdulikan oleh

---

<sup>30</sup> Ibid

Qatar. Qatar dianggap mulai menyimpang dari GCC (*Gulf Cooperation Council*) dengan ditemukannya Gas alam dan kian meningkatnya perekonomian dinegara tersebut<sup>31</sup>.

Pada tahun 2002 media Qatar memberitakan bahwa pemerintah Arab Saudi memanggil duta besarnya yang ada di Doha untuk kembali ke Arab Saudi selama enam hari. Pemicunya adalah, pemberitaan oleh kantor berita Al-Jazeera yang memperluas pengaruh Ikhwanul Muslimin di seluruh Jazirah Arab dan juga mengkritik kepemimpinan Arab Saudi dalam politik Timur Tengah<sup>32</sup>.

Hubungan diplomatik antara Qatar dan Arab Saudi kembali membaik pada tahun 2008 dengan adanya jaminan bahwa Al-Jazeera akan membatasi jangkauannya di Arab Saudi. Pada tahun yang sama pula untuk menjaga stabilitas hubungan antara Qatar dengan Arab Saudi, dibentuk Dewan Koordinasi Bersama (JJC) yang bertempat di Jeddah. Komite ini bertujuan untuk mengembangkan hubungan bilateral serta mengamankan kepentingan bersama dari dua suku persaudaraan.

Memanfaatkan momentum Arab Spring, Qatar telah mengubah arah diplomasinya. Pada mulanya Qatar merupakan mediator bagi negara-negara yang tengah bersitegang di kawasan Timur Tengah. Namun. Semenjak adanyamomentum Arab Spring tepatnya pada kasus Libya, Qatar telah mengubah arah kebijakan luar negerinya. Pada kenyataanya, Qatar memberikan campur

---

<sup>31</sup> K.Hard, Imad. “ Why Qatar? Explaining Contention Issue”, in *Crisis In The Gulf Cooperation Council (Challange and Prospect*, ed George Doumor et al. (Washington DC: Arab Center Washington DC, 2017

<sup>32</sup> Philip Gardon dkk, *The Qatar Crisis:Causes, Implications, Risks, and the Need for Compromise* (Tel Aviv: The Istitute for National Scurity Studies.), diakase pada 10 April 2018, <http://www.inss.org.il/publication/qatar-crisis-causes-implications-risks-need-compromise/>, 2006.

tangan pada kerusuhan yang terjadi di Libya. Selain itu Qatar juga melakukan intervensi di negara Suriah<sup>33</sup>.

Pada kasus Suriah, Qatar mendukung partai Oposisi dan melalui pimpinannya, Qatar menyarankan agar Suriah diserahkan pada Oposisinya. Pada 2012 Qatar dilaporkan telah mendukung Ikhwanul Muslimin Suriah sedangkan Arab Saudi mendukung fraksi sekuler dan kelompok salafi. Namun pada akhirnya Qatar menyerah dari Arab Saudi sebagai kekuatan utama di teluk Arab<sup>34</sup>.

Sedangkan pada kasus Mesir, Qatar memberikan dukungan penuh atas pemberontakan yang terjadi di negara tersebut. Pada Januari 2013 perdana menteri Qatar Hamad bin Jazim Al-Thani mengumumkan dukungan untuk Mesir dengan membawa bantuan sebesar US \$ 1 miliar dalam bentuk dana hibah dan US \$ 4 miliar dalam bentuk tabungan di bank sentral. Selain itu negara Qatar masih menyediakan US \$ 3 miliar melalui akuisisi obligasi dan penyediaan gas yang menguntungkan serta untuk membantu kekurangan listrik di musim panas<sup>35</sup>.

Hingga, pada tahun 2014 Arab Saudi kembali menarik duta besarnya dari Doha. Namun, Arab Saudi tidak sendiri dalam memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar. UEA dan juga Bahrain turut serta sebagai aliansi dari Arab Saudi. Pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan oleh ketiga

---

<sup>33</sup> Kristina Kausch, dkk, *Geopolitics and Democracy In Middle East*, (Madrid: Fride Publisher), 73. 2015

<sup>34</sup> Sherif Elashmawy. *The Foreign Policies Of Saudi Arabia And Qatar Towards The Arab Uprisings (The Cases of Egypt, Libya and Bahrain)*. (University of Innsbruck: Agustus), 18-22. 2014.

<sup>35</sup> Broto Wardoyo. *Rivalitas Saudi-Qatar dan Skenario Krisis Teluk*. Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia. *JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL VOL. 7, NO. 1 / APRIL - SEPTEMBER 2018*

negara tersebut didasarkan pada tuduhan bahwa Qatar telah banyak ikut campur dalam urusan rumah tangga negara- negara lain anggota GCC.

Dari serangkain kejadian yang kemudian merujuk pada penarikan duta besar yang dilakukan oleh Arab Saudi, Bahrain dan juga UEA tersebut pada akhirnya memperoleh hasil damai setelah lebih dari delapan bulan melakukan mediasi ekstensif dan juga terdapat beberapa isyarat damai dari pihak Doha yang salah satunya mengusir kembali tujuh pemimpin Ikhwanul Muslimin Mesir yang mengusir di Qatar. Beberapa duta besar dikirim kembali ke Doha termasuk pula duta besar Arab Saudi<sup>36</sup>.

Pemanasan hubungan diplomatik yang terjadi antara Arab Saudi dan Qatar kembali muncul kepermukaan pada tahun 2017. Pemerintah Qatar diwakilkan oleh menteri luar negeri Qatar memberikan konfirmasi resmi bahwa *Qatar News Agency* telah diretas oleh kelompok tidak bertanggung jawab dan menyebarkan berita tanpa dasar yang jelas. Qatar jelas menolak adanya statement tersebut dan mengkonfirmasi bahwa saat itu *Qatar News Agency* telah diluar kendali pemerintah<sup>37</sup>. Pada tanggal 5 Juni 2017, kampanye anti media terhadap Qatar pada akhirnya menjadi keputusan politik resmi mengenai embargo dan juga pemutusan hubungan diplomatik terhadap Qatar yang dilakukan oleh beberapa negara teluk yang dipimpin oleh Arab Saudi.<sup>38</sup>

Perlu kemudian memahami alasan negara-negara Teluk memutuskan hubungan dengan Qatar. Keputusan Saudi merupakan bagian dari usaha menjaga keamanan

---

<sup>36</sup> Kristina Kausch, dkk, *Geopolitics and Democracy In Middle East*,(Madrid: Fride Publisher), 73. 2015

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Ibid.

nasionalnya. Kebijakan-kebijakan Doha dianggap Riyadh menciptakan konflik internal di dalam internal pemerintahan Saudi dan mengancam kedaulatan.

Kebijakan Qatar yang mendukung kelompok-kelompok yang dianggap Arab Saudi sebagai bagian dari teror dan sektarian dapat menciptakan ketidakstabilan di kawasan. Dukungan Qatar terhadap kelompok teror di Provinsi Qatif, Arab Saudi kemudian langkah Doha memberikan dukungan baik secara finansial ataupun perlindungan bagi sejumlah pihak, serta dalam isu Yaman posisi Doha dianggap berlawanan dengan posisi dari pasukan koalisi yang mendukung pemerintahan Abed Rabbo Mansour Hadi di Yaman. Bagi UEA, posisinya jelas mendukung posisi Saudi terhadap Qatar bahwa terdapat ancaman bagi negara-negara Teluk dan juga terhadap stabilitas dan keamanan di kawasan. Posisi serupa dimiliki oleh Bahrain. Bahrain menyatakan bahwa posisi Qatar menciptakan instabilitas di kawasan. Bahrain menuduh Qatar memberikan dukungan terhadap aktivitas terorisme dan menciptakan kekacauan di dalam negeri Bahrain.

Mesir dalam pernyataannya mengatakan bahwa posisi Qatar membawa ideologi Al Qaeda, mendukung gerakan ISIS dan kelompok teror di Sinai. Dukungan Qatar terhadap posisi Ikhwanul Muslimin (IM) juga dianggap mengancam internal Mesir dan keamanan nasional negara-negara Arab yang akan menciptakan pembagian di dalam masyarakat Arab.

Selanjutnya, Yaman menuduh keberadaan Qatar bekerja bersama musuh dari pemerintah Yaman yaitu milisi Houthi yang mendapatkan dukungan dari Iran. Sebelumnya Qatar dan negara-negara GCC memang saling menanda tangani perjanjian yang disebut dengan “Kesepakatan Riyadh” isi dari “Kesepakatan

Riyadh” dalam dokumen pertama adalah komitmen negara-negara Arab untuk tidak memberikan pembiayaan dan dukungan politik terhadap suatu kelompok-kelompok yang melakukan penyimpangan serta menghindari intervensi-intervensi urusan internal setiap negara sedangkan dalam dokumen kedua adalah tekad dan komitmen para pihak yang mendatangi perjanjian untuk mendukung dan meningkatkan stabilitas Mesir dan mencegah Al Jazeera untuk dijadikan sebagai batu loncatan. Tokoh atau kelompok-kelompok yang mengadakan perlawanan atau menentang otoritas Mesir. Hal tersebut telah disepakati oleh Qatar, Bahrain, Arab Saudi, Mesir dan Uni Emirat Arab.

Satu hari kemudian tepatnya pada tanggal 6 Juni 2017, Arab Saudi memberikan 13 tuntutan yang harus disepakati oleh Qatar untuk bisa kembali menjalin hubungan diplomatik dan juga menghentikan embargo kepada Qatar<sup>39</sup>.

Sikap Qatar yang tidak menerima ke-13 tuntutan yang diajukan tersebut membuat hubungan bilateral antara Qatar dengan Arab Saudi hingga saat ini belum menemukan titik terang. Arab Saudi yang menjadi pemimpin dari aliansi 7 negara pemboikot masih bersikeras dengan pendiriannya. Berikut merupakan rangkuman riwayat hubungan Arab Saudi dengan Qatar.

Qatar sendiri menyatakan bahwa tuduhan yang diberikan negara-negara Teluk tidak berdasarkan fakta. “Bagi kami, pilihan strategis Qatar dalam menyelesaikan masalah ini adalah dengan dialog.” penjelasan Menlu Qatar Syaikh Muhammad Bin Abdulrahman al Thani. Dirinya mengatakan bahwa adanya

---

<sup>39</sup> Alex Christoforoud, “24 Hourse ultimatum, Saudi Arabia threatens Qatar to submit to list of demands or face war”, diakses pada 12 september 2017, <http://theduran.com/24-hour-ultimatumsaudi-arabia-threatens-qatar-to-submit-or-else-face-war/>.

ekskalasi ini, Qatar tidak memahami alasan sebenarnya dari krisis ini. Emir Kuwait juga pada Selasa ini mengunjungi Saudi untuk membendung krisis dan akan dilakukan pernyataan resmi oleh Emir Qatar pada Selasa.

**Tabel 1**

**Dinamika Hubungan Arab Saudi dan Qatar tahun 1995-2017**

No	Tahun	Kejadian
1	1995	Sheikh Hammad Bin Khalifa Al-Tahani menanda tangani kebijakan dengan Iran dan Israle dalam pengembangan produksi LNG (Liquid Natural Gas)
2	1996	Qatar menanda tangani perjanjian dengan Israel untuk mendirikan kantor perdagangan Israel di Doha
3	2002	Kantor berita Qatar memberitakan bahwa pemerintah Arab Saudi memanggil duta besarnya yang ada di Doha untuk kembali selama enam hari
4	2008	Hubungan kedua negara kembali membaik dengan perjanjian bahwa Al-Jazeera membatasi mengenai liputan terhadap Qatar
5	2012	Qatar dilaporkan mendukung kelompok Ikhwanul Muslimin di Suriah
6	Januari 2013	Perdana Menteri Qatar Hamad bin Jazim Al-Thani mengumumkan pemberian dan dukungan penuh atas pemberontakan di Mesir
7	Juli 2013	Pihak pemberontak yang didukung Qatar di Mesir kalah dan hubungan antara Qatar dan Mesir memanas
8	2014	Pemutusan Hubungan diplomatik oleh Arab Saudi, Uni Emirate Arab, dan Bahrain terhadap Qatar
9	16 November 2014	Hubungan Qatar dengan ketiga negara kembali membaik
10	23 Mei 2017	Kampanye anti media Qatar yang dilakukan oleh Arab Saudi dan UEA
11	5 Juni 2017	Keputusan resmi mengenai pemutusan hubungan diplomatik antara 7 negara Teluk yang dipimpin oleh Arab Saudi terhadap Qatar
12	6 Juni 2017	Pengajuan 13 syarat terhadap Qatar yang disampaikan kepada Kuwait untuk mengembalikan hubungan diplomatik seperti semula

**BAB III**

**PERANAN IKHWANUL MUSLIMIN DALAM KEBIJAKAN QATAR  
YANG DIANGGAP ARAB SAUDI DAPAT MENGANCAM STABILITAS  
KAWASAN TIMUR TENGAH**

Guna menciptakan stabilitas keamanan di Timur Tengah, Arab Saudi dalam perkembangannya telah menjadi inisiator dalam pembentukan *Gulf Cooperation Council* atau GCC<sup>40</sup>. Berkenaan dengan stabilitas keamanan kawasan, Arab Saudi dan Qatar juga berkomitmen dalam bidang keamanan kawasan melalui sebuah perjanjian keamanan yang dikenal dengan “Perjanjian Riyadh” pada 23 November 2013.<sup>41</sup> Dokumen perjanjian ini, menjabarkan komitmen untuk menghindari setiap intervensi urusan internal negara lain, termasuk melarang dukungan finansial maupun politik untuk kelompok-kelompok menyimpang. Perjanjian Riyadh ini secara spesifik menyebut larangan mendukung Ikhwanul Muslimin di Mesir dan kelompok oposisi di Yaman yang mengancam kawasan.

Kemudian, dokumen kedua ikut ditandatangani oleh seluruh negara anggota GCC pada 16 November 2014 yang diberi kop “*Top Secret*”. Dokumen kedua ini menjelaskan para pihak yang ikut menandatangani perjanjian untuk mendukung stabilitas keamanan kawasan Timur Tengah dengan tidak mendukung kelompok Ikhwanul Muslimin serta mencegah Al Jazeera untuk dijadikan sebagai sarana oleh beberapa tokoh atau kelompok-kelompok yang mengadakan

---

<sup>40</sup> Fouad Al-Farsy. *Saudi Arabia: A Case Study Development*. London: John Wiley & Sons. 1986

<sup>41</sup> Fouad Al-Farsy. *Op.cit* hal 90

perlawanan menentang otoritas Mesir<sup>42</sup>. Namun dalam perjalanannya, ternyata perjanjian tersebut dilanggar oleh Qatar, sehingga membuat Arab Saudi dan negara anggota GCC lainnya memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar.

**Gambar 3**  
**Negara yang Memutuskan Hubungan diplomatik dengan Qatar**



Sumber : CNN.com

### **3.1 Kebijakan Qatar Yang Dinilai Arab Saudi Mengancam Keamanan Kawasan**

Qatar merupakan negara kecil di kawasan Timur Tengah yang memiliki luas wilayah 11,586km<sup>2</sup> dengan populasi sebanyak 2.123.160 jiwa. Namun, Qatar memiliki sumber minyak dan gas yang kemudian memposisikan Qatar sebagai sebuah negara dengan tingkat pendapatan perkapita tertinggi di dunia pada tahun 2007.

Hal tersebut dibuktikan dengan pendapatan perkapita masyarakat Qatar senilai USD 129.700 yang merupakan pendapatan tertinggi di dunia, memiliki

<sup>42</sup> Ibid, hal 89

nilai GDP tertinggi di dunia, bahkan mengalahkan Arab Saudi senilai 48,8% sedangkan GDP Saudi di angka 28,8%<sup>43</sup>.

**Gambar 4**  
**Perbandingan GDP Arab Saudi dan Qatar**

	Arab Saudi	Qatar
Gross national saving	28.8% of GDP (2017 est.) 25.2% of GDP (2016 est.) 26.1% of GDP (2015 est.)	48.8% of GDP (2017 est.) 44% of GDP (2016 est.) 46.6% of GDP (2015 est.)

**Sumber:**<https://www.indexmundi.com/factbook/compare/saudi-arabia.qatar/economy>

Qatar memiliki pandangan politik yang mengadopsi kebijakan luar negeri terbuka, menggunakan *soft power* seperti media, diplomasi, ekonomi, bantuan kemanusiaan dan sumbangan dermawan. Dalam hubungan bilateral, Qatar memiliki hubungan baik dengan beberapa negara tetangganya di kawasan Teluk, salah satunya dengan negara Republik Islam Iran. Negara Iran memiliki sebuah kedutaan di Doha sementara Qatar memiliki sebuah kedutaan di Teheran.

### 3.1.1 Penerimaan Qatar Terhadap Ikhwanul Muslimin

Para anggota GCC menganggap Qatar telah melanggar kesepakatan dalam perjanjian Riyadh, dimana perjanjian tersebut menegaskan bahwa setiap negara atau individu tidak boleh mendukung siapapun yang dapat menjadi ancaman dan

---

<sup>43</sup> Nilai aset yang dimiliki Qatar National Bank senilai 37,7 dan merupakan yang terbesar di Arab. Qatar juga mampu menekan angka pengangguran hingga 0,07%, dalam Global Competitive Index Qatar termasuk peringkat ke 1 negara di kawasan Arab yang memiliki kualitas pendidikan terbaik. Dalam pemberantasan korupsi Qatar peringkat ke 3 setelah UEA dan Israel <https://kumparan.com/@kumparannews/qatar-kecil-nan-kaya-16-fakta-yang-harus-kamu-tahu> akses pada 24 Maret 2019

stabilitas di kawasan Teluk. Poin penting yang dilanggar Qatar adalah bentuk dukungan Qatar pada organisasi Ikhwanul Muslimin (IM) dari Mesir<sup>44</sup>.

Sebagai sebuah organisasi, Ikhwanul Muslimin adalah organisasi muslim namun memiliki pola pikir Islam yang lebih modernis. Pendiri Ikhwanul Muslimin, Hasan Al-Banna, memiliki pemikiran bahwa demokrasi pada dasarnya adalah milik rakyat, dan penguasa hanya menjalankan amanah yang diberikan rakyat kepadanya. Pemikiran inilah yang kemudian diadopsi oleh Al Banna dalam gerakannya saat mengembangkan Ikhwanul Muslimin di Mesir.

Qatar melalui Al-Jazeera memberikan hak istimewa kepada Syeikh Yusuf Qordhowi untuk mengisi program acara yang bertajuk “Al-Syari'ah wa Al-Hayah” (Syariat dan Kehidupan). Acara ini dipandu langsung oleh Syeikh Yusuf Qordhowi yang berisi ceramah dan fatwa beliau serta tanya-jawab dengan para pemirsa<sup>45</sup>.

Dalam dunia pendidikan di Qatar, Qordhowi adalah pendiri Fakultas Syariah Universitas Qatar, pendiri Pusat Kajian dan Sunnah Nabi, dan menjabat sebagai Ketua Asosiasi Ulama seluruh dunia, yang merupakan perkumpulan ulama-ulama yang dekat atau berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin. Yusuf Al Qordhowi, juga dipercaya menjadi Ketua Majelis Fatwa Mesir dan kerap dijuluki Mufti Agung Mesir<sup>46</sup>. Beliau juga dinilai sangat berjasa dalam membangun universitas Qatar, beliau juga memiliki peran penting di kementerian pendidikan, kementerian wakaf dan lembaga lainnya di Qatar.

---

<sup>44</sup>David E. Long and Bernard Reich. *The Government and Politics of the Middle East and North Africa*, Colorado : Westview Press. 1980.

<sup>45</sup>Ibid, hal 66

<sup>46</sup>Mufti ialah pemberi fatwa

Kedekatan antara Syaikh Yusuf Qordhowi beserta jejaring Ikhwanul Muslimin dengan Kerajaan Qatar tentu saja memberi banyak kemudahan bagi aktivis Ikhwanul Muslimin untuk mengakses dan sekaligus memanfaatkan Al Jazeera ataupun akses lain yang dimiliki oleh Qatar. Sehingga kiprah Yusuf Al Qordhowi di Qatar membuatnya memperoleh kewarganegaraan Qatar dan tinggal di ibu kota negara itu, Doha<sup>47</sup>.

Kedekatan antara Qatar dan organisasi Ikhwanul Muslimin ini tentu saja menjadi ketakutan tersendiri bagi Arab dan dianggap membahayakan keamanan kawasan karena latar belakang ideologi yang berbeda antara negara-negara kawasan yang cenderung memiliki sistem negara monarki dan ideologi agama Islam Salafi yang cenderung tradisional, sementara IM membawa ideologi muslim yang lebih modernis, menawarkan demokrasi, revolusi sebagai suatu alternatif bahkan memperbolehkan untuk menciptakan kontrol terhadap kekuasaan<sup>48</sup>.

### **3.1.2 Al Jazeera Sebagai Media Kritik terhadap Arab Saudi**

Sejak Al-Jazeera didirikan pada tahun 1996, pemerintah Qatar, banyak melakukan investasi pada channel tersebut, namun secara terbuka menegaskan bahwa Al Jazeera akan tetap independen dari kepentingan politik ataupun kebijakan Qatar. Qatar menyediakan dana \$ 137 juta untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas Al Jazeera sebagai media dan dana yang digelontorkan tersebut bersifat pinjaman, bukan hibah, dan ditetapkan jangka waktunya, agar Al-

---

<sup>47</sup> <https://kumparan.com/@kumparannews/siapa-yusuf-al-qaradawi-yang-disebut-saudi-pendukung-teroris> akses pada 24 Maret 2019

<sup>48</sup> Hardy, Robert. *The Muslim Revolt : A Journey Through Political Islam*. Columbia University Press. 2010

Jazeera mengembalikan dana pinjaman tersebut dan bisa menjadi stasiun TV yang berdiri sendiri pada tahun 2001.

Al Jazeera mencuri perhatian ketika pasca tragedi 9/11. Al Jazeera menayangkan video Osama Bin Laden. Amerika marah karena menilai sebagai propaganda pro terorisme. Al Jazeera beralasan bahwa tugas jurnalis untuk beri kesempatan bicara kepada semua pihak yang bertikai.

Sejak itu elit barat dan Saudi Arabia menilai Al Jazeera terkait dengan kelompok Al Qaeda di Afghanistan, Ikhwanul Muslimin di Mesir, Hamas di Palestina, dan Hisbullah di Syiria/Libanon. Namun tidak pernah terbukti, malah tudingan tersebut menarik simpati kalangan intelektual independen dunia untuk menjadi kontributor berita, esei, dan analisis.. Kini Al Jazeera mengklaim tak kurang dari 50 juta pemirsa setia per hari. Bahkan 100 juta pemirsa di seluruh dunia<sup>49</sup>.

Al Jazeera kian bergengsi di mata dunia sebagai media alternatif. Awalnya Al Jazeera hanya menempatkan kantor cabang di Kuala Lumpur, London, Washington. Kini Al Jazeera melebarkan sayap ke Bosnia, Pakistan, Turki, India, China, dan Rusia, dan berancang-ancang untuk menerbitkan koran Al Jazeera berskala internasional<sup>50</sup>.

Al Jazeera English kini menjadi saluran berita internasional yang memiliki kontributor dari enam puluh biro di seluruh dunia yang menjangkau enam benua

---

<sup>49</sup> Azran, Tan Samuel. *Al Jazeera, Qatar, and New Tactics in State – Sponsored Media Diplomacy*. Sammy Ofer School of Communications, The Interdisciplinary Center (IDC), Herzliya 46150, Israel. SAGE Publications. 2013

<sup>50</sup> Pourhamzavi, Karim and Philip Pherguson. *AL JAZEERA AND QATARI FOREIGN POLICY: A CRITICAL APPROACH*. Department of Politics, University of Otago, New Zealand. *Journal of Media Critiques [JMC]* – Vol.1 No.2 December 2015.

yang berbeda<sup>51</sup>. Dengan gaya jurnalistik yang mirip dengan CNN ataupun BBC, Al Jazeera mampu membentuk opini para pemirsa Arab.

Saat ini banyak kalangan Arab yang menganggap Al Jazeera bukan lagi suara perubahan di Timur Tengah, Al Jazeera berubah menjadi media propaganda bagi pemiliknya, yaitu Qatar dan mereka sepenuhnya bekerja untuk kepentingan Emir Qatar. Menurut keterangan wartawan Al Jazeera keputusan di televisi tersebut tidak lagi diambil berdasarkan prioritas wartawan, akan tetapi berdasarkan kepentingan Kementerian Luar Negeri Qatar<sup>52</sup>.

Dalam pemberitaannya, Al Jazeera kerap vokal melontarkan kritik pada pemerintah otoriter di kawasan Timur tengah, untuk tema-tema yang berkaitan tentang hak asasi manusia, terorisme dan diplomasi merupakan tiga tema sentral pemberitaan mengenai Saudi yang sering diberitakan selama konflik. Pemberitaan Al Jazeera ini tentunya memberikan pengaruh yang signifikan pada masyarakat Arab menyebabkan suatu pergeseran yang berpengaruh terhadap politik nasional dan internasional dalam kawasan Jazirah Arab.

Konsekuensi lebih lanjut, pemberitaan Al Jazeera ini dengan cepat menciptakan musuh. Dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh salah seorang pengamat media Tan Samuel Azran mengungkapkan pembuktian fakta tersendiri, dimana Al Jazeera memiliki kecenderungan memberitakan Arab Saudi secara negatif. Analisis tersebut mengambil sample 969 sample berita, terdiri dari 456

---

<sup>51</sup> Lynch, M. *Voices of the new Arab public: Iraq, Al-Jazeera, and Middle East politics today*. New York, NY: Columbia University Press. 2006

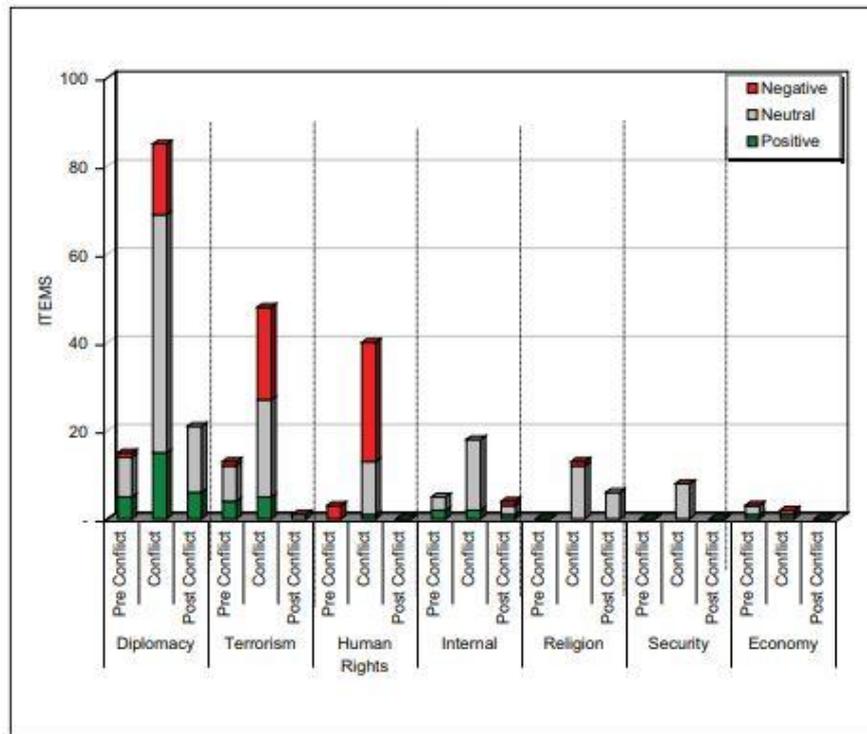
<sup>52</sup> Azran, Tan Samuel. *Al Jazeera, Qatar, and New Tactics in State – Sponsored Media Diplomacy*. Sammy Ofer School of Communications, The Interdisciplinary Center (IDC), Herzliya 46150, Israel. SAGE Publications. 2013.

pemberitaan dari website Al Jazeera berbahasa Inggris dan 513 dari pemberitaan Al Jazeera berbahasa Arab.

Analisis pemberitaan tersebut terungkap kecenderungan Al Jazeera, memberitakan Arab Saudi sebagai aktor utama dalam suatu konflik, menangani konflik dan pasca konflik. Tema yang paling sering diberitakan mengenai Arab Saudi adalah diplomasi atau kebijakan luar negeri Arab Saudi, hak asasi manusia serta sikap Arab terkait terorisme. Hal tersebut nampak pada grafik berikut ini :

**Grafik 1**

**Kecenderungan Pemilihan Topik Pemberitaan Al Jazeera Terhadap Saudi Saat Konflik**

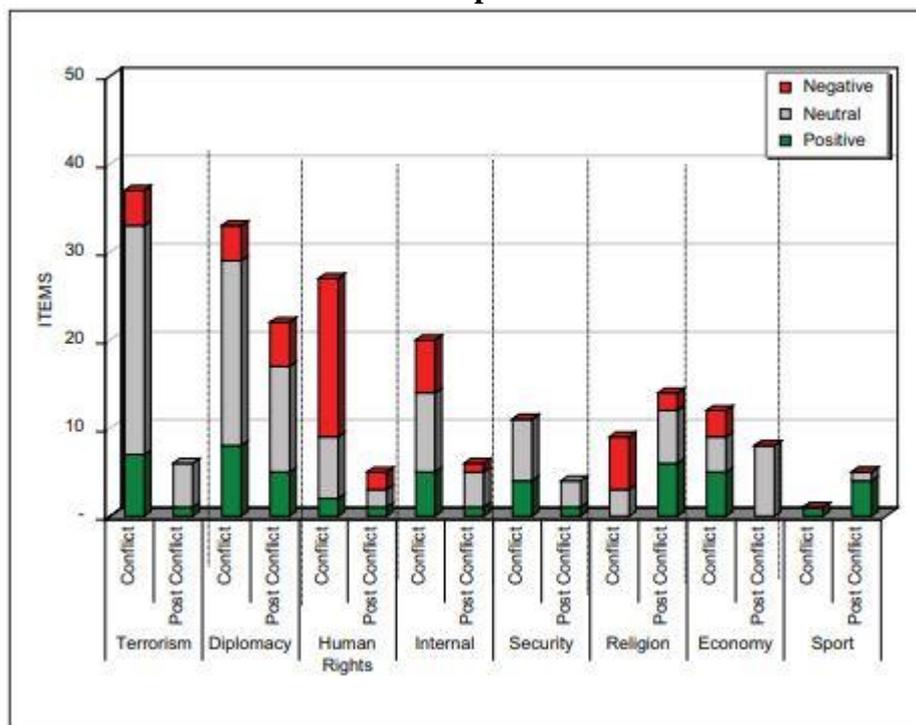


**Sumber : Samuel Azran**

Sedangkan untuk pemberitaan-pemberitaan pasca konflik, juga tidak berbeda jauh Dari 47 artikel ini, 36% (n = 17) adalah netral dan berurusan terutama dengan ekonomi Saudi, 17% (n = 8) bernada positif, terutama mengenai

AS – kerjasama Saudi dalam perang melawan terorisme internasional, dan 47% (n = 22) artikel memiliki nada negatif. Dari 22 artikel dengan nada negatif menuju Arab Saudi, terutama menyangkut dua insiden pelanggaran HAM. Berikut adalah grafiknya<sup>53</sup> :

**Grafik 2**  
**Kecenderungan Pemilihan Topik Pemberitaan**  
**Al Jazeera Terhadap Saudi Pasca Konflik**



**Sumber : Samuel Azran**

Dari analisis pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa website Al-Jazeera Arabic.net secara dramatis meningkatkan artikel yang menggambarkan Arab Saudi dalam sudut pandang negatif ketika konflik meletus dan tetap melakukan kritik pada Saudi meskipun kondisi telah mencapai resolusi konflik<sup>54</sup>.

<sup>53</sup> Ibid, hal 78

<sup>54</sup> Ibid.

Ditambah kasus pemberitaan yang sengaja di *blow up* oleh Al Jazeera sehingga menjadi sorotan internasional, sehingga memperoleh perhatian dari dunia internasional sehingga Saudi mendapatkan tekanan tersendiri atas pemberitaan tersebut. Penelitian tersebut juga memperkuat dugaan bahwa pemberitaan Al Jazeera digunakan sebagai pembentuk opini publik negatif mengenai Arab Saudi. Hal ini juga diperkuat oleh kesaksian reporter Al Jazeera bahwa Qatar memang memerintahkan memberikan liputan negatif mengenai Arab Saudi.

Pemberitaan Al Jazeera ini tentunya membuat Arab Saudi merasa disudutkan sebagai negara besar yang tidak adil pada masyarakatnya, sehingga Arab menilai, pendanaan yang diberikan oleh Emir Qatar untuk Al Jazeera dicurigai sebagai modal Qatar agar dapat menjadi pemimpin dan menguatkan posisinya di blantika jazirah Arab. Pasalnya, tidak sedikit narasumber atau kelompok tertentu yang ditetapkan sebagai teroris oleh negara Arab dan Barat justru diberi panggung oleh Al Jazeera<sup>55</sup>.

Kondisi ini tentunya meresahkan Arab, sebab peran media Al Jazeera tentunya dapat memberikan alternatif ideologi seperti demokrasi, dan beragam ideologi yang membahayakan lainnya negara-negara monarki seperti Saudi Arabia pada masyarakat jazirah Arab.

Pada sisi lainnya, media massa Al Jazeera ini menjadi salah satu pengaruh terbesar terhadap negara negara besar seperti Amerika Serikat dan negara maju lainnya, tentunya Al Jazeera memberikan pengaruh dalam hal *soft diplomasi*

---

<sup>55</sup> Azran, Tan Samuel. Al Jazeera, Qatar, and New Tactics in State – Sponsored Media Diplomacy. Sammy Ofer School of Communications, The Interdisciplinary Center (IDC), Herzliya 46150, Israel. SAGE Publications. 2013.

terhadap negara-negara Eropa dan Barat dalam memandang kawasan Timur Tengah<sup>56</sup>.

### 3.1.3 Kerjasama Qatar dan Iran dalam Perspektif Arab Saudi

Perseteruan antara Iran dan Saudi memiliki sejarah yang panjang, namun secara umum terbagi menjadi 3 hal, pertama adalah ideologi politik Iran yang berpengaruh pada banyak kebijakan luar negeri Iran terhadap Arab Saudi, agama antara Sunni dan Syiah, persaingan harga minyak, dan perang proxy. Posisi Qatar adalah termasuk pihak yang terkena imbas dalam perseteruan tersebut, dimana sebagai anggota GCC Qatar sudah diikat dengan perjanjian Riyadh dalam GCC, namun Qatar sudah melakukan pelanggaran.

Qatar dan Iran sama-sama memiliki ladang Gas Kondensat Selatan *Pars North Dome*, lapangan gas terbesar di dunia, yang memiliki pengaruh besar dalam hubungan Qatar dan Iran. *North Field* dan *South Pars* yang biasa juga disebut Lapangan Utara (Qatar) dan Pars Selatan (Iran) berada di antara batas Qatar dan Iran. Ladang gas tersebut mencakup 97rb km<sup>2</sup> dengan mayoritas (sekitar dua pertiga) berada di perairan Qatar.

---

<sup>56</sup> Iskandar, Adel and Mohammed El Nawawy. *Al Jazeera : The Story of The Networks That is Rattling Governments And Redefining Modern Journalism*. Westview Press-Perseus Books Groups. 2017.

**Gambar 5**  
**Ladang Gas Bersama Qatar dan Iran**



Sumber : <http://caspiabarrel.org>

Pada tahun 2014, antara Qatar dan Iran memperluas hubungan perdagangan dan ekonomi, dengan penandatanganan protokol keamanan, kedua negara mengumumkan pembentukan tiga zona perdagangan bebas gabungan, satu terletak di kota pelabuhan Bushehr di Iran dan dua lainnya di Qatar, di Doha dan pelabuhan Al-Ruwais. Pada tahun 2015, perdagangan Qatar-Iran diperkirakan sekitar \$ 500 juta<sup>57</sup>.

Qatar dan Iran bersama-sama saling mengontrol ladang gas alam tersebut. Qatar yang memiliki 13% cadangan gas di dunia dan memproduksi 650 juta meter kubik gas per hari dari bagian ladangnya, sedangkan Iran dapat memproduksi hingga 5.750 juta meter<sup>3</sup> gas dari ladangnya tersebut. Ladang Gas-Kondensat Selatan Pars / North Dome adalah ladang kondensat gas alam yang terletak di Teluk Persia. Ini adalah ladang gas alam terbesar di dunia, dengan kepemilikan lapangan yang dibagi antara Iran dan Qatar.<sup>58</sup> Kerjasama dalam bidang keamanan

<sup>57</sup> Kamrava, Iran-Qatar Relations, 2017, pp. 167-187

<sup>58</sup> Baldwin, David A. Power and International Relations in Walter Carlsnaes, Thomas Risse, Beth Simmons [eds.]. Handbook of International Relations, London: SAGE. 2002.

diperluas dengan penanda tangan kesepakatan kedua pihak yang berisikan tentang perbatasan kedua negara tersebut dan juga kesepakatan tersebut dirancang untuk memperbaiki usaha pengendalian perairan territorial<sup>59</sup>.

Dalam sektor keamanan negara, Qatar dan Iran telah menandatangani kesepakatan keamanan yang berisikan perlindungan perbatasan, memerangi kejahatan terorganisir, perdagangan manusia, dan obat-obatan yang dimana semuanya adalah tujuan dari kesepakatan tersebut.

Sebaliknya jika dengan Qatar hubungan Iran sangat harmonis, namun hubungan Iran dengan Arab Saudi justru kebalikannya, sebagai konsekuensi hubungan Qatar dengan Iran ini, pada tanggal 5 Juni 2017 ketika beberapa negara secara tiba – tiba memutuskan hubungan diplomatiknya dengan negara Qatar.<sup>60</sup>

Persaingan sebagai produsen utama minyak bumi. Arab Saudi dan Iran adalah salah satu sumber perseteruan antara Iran dengan Saudi. Arab Saudi menjadi pemain kunci dunia dalam perkembangan ekonomi dan politik.

Minyak merupakan sumber pendapatan negara yang paling krusial bagi Arab Saudi dan Iran. Pada akhir tahun 2014, harga minyak brent turun hingga mencapai USD 55.27 per barel atau hampir dari setengah harga awal tahun 2014<sup>61</sup>.

---

<sup>59</sup> Ibid

<sup>60</sup> Gulf News Government, "UAE, Saudi Arabia and Bahrain recall their ambassadors from Qatar" diakses dari <https://gulfnews.com/uae/government/uae-saudi-arabia-and-bahrain-recall-their-ambassadors-from-qatar-1.1299586#> pada 23 Maret 2019

<sup>61</sup> Oweiss, Ibrahim M. 1975, Petrodollars, <http://faculty.georgetown.edu/imo3/petrod/petro2.htm>.

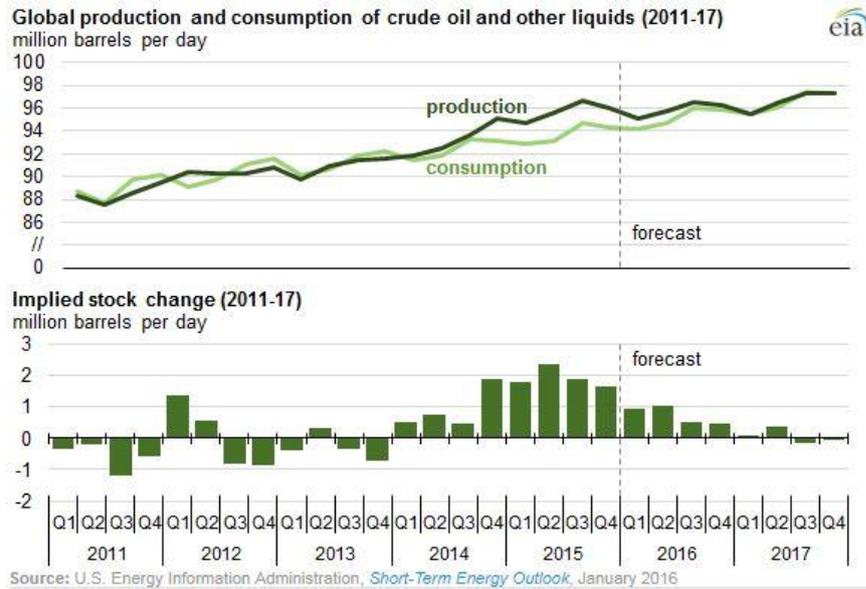
**Tabel 2**  
**Penurunan Harga Minyak Pada tahun 2014**

<b>Bulan</b>	<b>Harga Minyak Brent</b>
Januari	USD 108.16
April	USD 108.63
Juli	USD 104.94
Agustus	USD 101.12
September	USD 94.67
Oktober	USD 84.17
November	USD 71.89
Desember	USD 55.27

Sumber : The Geopolitics of Oil Price, F. Gregory Gause

Pada tahun berikutnya, harga minyak masih terus mengalami penurunan. Adapun pada Februari 2015 harga minyak brent, yang menjadi patokan harga minyak dunia, telah berada di bawah USD 50 per barel, yaitu USD 49.92 per barel. Hingga Desember 2015, harga minyak merosot di level USD 34,50.25. Kemerosotan harga minyak dunia tersebut disebabkan oleh melimpahnya pasokan minyak di pasar global. Pasokan minyak melimpah, sedangkan konsumsi dunia terhadap minyak tidak sebanyak yang diproduksi.

**Grafik 3**  
**Produksi dan Konsumsi Minyak Mentah Global 2011-2017**



**Sumber : <https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=24532>**

Dari grafik tersebut dapat dilihat adanya over produksi antara konsumsi dan produksi minyak sejak tahun 2014, dari grafik ini menunjukkan kondisi dimana pasokan harga minyak yang berlebihan. Hal ini dikarenakan melimpahnya pasokan minyak dari negara yang bukan anggota OPEC seperti Amerika dan Kanada, sehingga diantara keduanya tidak mendapatkan kesepakatan pengurangan produksi.

Faktor lainnya dikarenakan permasalahan geopolitik dikawasan Timur Tengah antara Arab Saudi dan Iran<sup>62</sup>. Situasi ini memberi tekanan terhadap Arab Saudi yang kebanyakan sumber pendapatannya bergantung pada minyak. Maka Iran dalam pasar minyak global merupakan ancaman bagi perekonomian Arab Saudi. Potensi penurunan ekonomi negara ini mendorong Arab Saudi untuk tetap

<sup>62</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ICP Desember 2015 Turun Jadi US\$ 35,47 per Barel, diakses dalam [http://migas.esdm.go.id/post/read/icp-desember-2015-turun-jadi-us\\$-35,47-](http://migas.esdm.go.id/post/read/icp-desember-2015-turun-jadi-us$-35,47-) per-barel diakses pada 25 Maret 2019

mempertahankan produksi minyaknya dan tidak mau memotong jumlah produksi. Iran pun menyalahkan Arab Saudi atas merosotnya harga minyak dunia. Menurut Iran, Saudi adalah negara yang harus bertanggungjawab atas krisis harga minyak karena Saudi tidak mau menurunkan atau memangkas produksi minyaknya<sup>63</sup>.

Selain itu, Saudi dengan mudah memproduksi minyak 6 sampai 12 juta dollar AS barel per hari. Seharusnya Arab Saudi menjadi stabilisator utama harga minyak di pasar bukan mempertahankan banyaknya minyak yang diproduksi. Hal ini dikarenakan Saudi merupakan produsen minyak terbesar dunia yang memiliki pengaruh kuat untuk memberikan pemahaman bagi negara-negara OPEC maupun non OPEC untuk memangkas produksi minyak<sup>64</sup>.

Di sisi lain, Iran membutuhkan harga minyak dunia yang tinggi untuk pendapatan negaranya. Terlebih lagi, sejak tahun 2012 Uni Eropa melakukan embargo terhadap impor minyak Iran atas pengembangan program nuklir Iran. Namun karena Iran melihat Saudi tidak menurunkan produksi minyaknya, Iran pada tahun 2015 mengkonsep ulang anggaran berdasarkan proyeksi minyak menjadi 40 dolar AS per barel dari yang sebelumnya 70 dolar AS per barel. Perang produksi minyak ini pun semakin melemahkan harga minyak, yang kemudian menjadi ancaman serius bagi perekonomian Arab Saudi sebab mengancam kapabilitas perekonomian Arab Saudi.

---

<sup>63</sup> Martin, H. Sours. Saudi Arabia's Role in the Middle East: Regional Stability within the New World Order. Asian Affairs Journal. Taylor & Francis, Ltd Vol. 18 No. 1. 1991.

<sup>64</sup> Al Jazeera Centre For Studies, Power Imbalance: Iran's Gain, Saudi's Challenges, diakses dalam <http://studies.aljazeera.net/en/positionpapers/2015/01/201512512714307969.html> diakses pada 25 Maret 2019

Ketiga adalah perseteruan antara Sunni dan Syiah, perseteruan puluhan tahun di antara mereka diperparah oleh perbedaan agama. Arab Saudi dan Iran masing-masing adalah pengikut salah satu dari dua sekte utama dalam Islam - sebagian besar Iran adalah Muslim Syiah, sementara Arab Saudi melihat negara mereka sebagai kekuatan Muslim Sunni terkemuka.

Dari sekian banyak konflik yang ada di Timur Tengah, sentimen tentang Sunni-Syi'ah seringkali muncul. Ideologi Sunni dan Syi'ah ini tersebar di berbagai negara di Timur Tengah. Secara umum, jurang pemisah antara Sunni dan Syi'ah hingga saat ini adalah mengenai persoalan Imamah. Imamah dalam bahasa Arab berarti kepemimpinan. Kepemimpinan yang dimaksud ini adalah adanya 12 Imam yang dimulai Imamah pertama yang dipegang oleh Ali.

Syi'ah dan Sunni sepakat bahwa seorang nabi merupakan seorang pemimpin yang ma'sum (terbebas dari dosa), dan hanya beliaulah yang ditetapkan kema'sum-annya. Meskipun demikian, Syi'ah juga menerapkan hal serupa kepada imam mereka sehingga memiliki derajat seperti nabi yang ma'sum.

Bagi Sunni, ketaatan kepada pemimpin yang selaras dengan al-Qur'an dan Sunnah merupakan tolak ukur terhadap kepemimpinannya, Sunni dan Syi'ah juga memiliki perbedaan dalam rukun Islam dan Rukun Iman, poin perbedaan tersebut lagi-lagi berkaitan dengan imamah.

Dari segi Sumber hukum Islam, Sunni dan Syiah sama-sama berpendapat bahwa sumber hukum utama adalah Al-Qur'an, Sunnah atau Hadits, Qiyas, Ijma'

dan Ijtihad. Sumber-sumber tersebutlah yang kemudian dibentuk menjadi hukum Syari'ah. Akan tetapi, Hadits Syi'ah berbeda dengan Hadits Sunni<sup>65</sup>.

Sejak tahun 1979, identitas menjadi faktor penting yang mempengaruhi pandangan Arab Saudi dan Iran terhadap satu sama lain. Elemen terpenting dari identitas kedua negara adalah agama. Agama merupakan sumber legitimasi dari Kerajaan Saudi Arabia dan rezim Ayatullah di Iran<sup>66</sup>.

Kedua negara merupakan negara yang sama-sama menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan politik bernegara mereka. Agama resmi di Republik Islam Iran pasca revolusi adalah Islam dan itsna 'asyhariah atau Syi'ah Dua Belas Imam. Ketentuan ini berlaku selamanya dan bersifat mutlak, tidak dapat digantikan. Dalam Konstitusi Republik Islam Iran pasal 12 disebutkan bahwa :

*"The official religion of Iran is Islam and the Twelver Ja'fari school, and this principle will remain eternally immutable."*<sup>67</sup>

Syiah Dua Belas Imam adalah bentuk Syi'ah yang paling banyak diikuti saat ini. Syi'ah Dua Belas Imam ini mengakui adanya 12 imam yang merupakan keturunan dari Ali dan meyakini bahwasanya mereka telah dipilih sejak lahir.

Negara Iran memiliki seorang presiden sebagai pemimpin negara yang mengatur semua urusan kenegaraan. Di sisi lain, Iran juga memiliki seorang pemimpin spiritual atau Imam yang memiliki posisi diatas presiden yang memiliki wewenang yang pendapatnya harus didengar dalam setiap keputusan yang diambil

---

<sup>65</sup> C. M. Blanchard, 'Islam: Sunni and Shiites', Congressional Research Service, 28 Januari 2009

<sup>66</sup> M. Huwaidin, 'The Security Dilemma in Saudi-Iranian Relations' Review of History and Political Science, December 2015, Vol. 3 No. 2, p. 71.

<sup>67</sup> Iran Ministry and Foreign Affair, Constitution, <<http://en.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=3&fkeyid=&siteid=3&pageid=2144>>, akses pada 18 Oktober 2018

oleh negara. Beragam tekanan dan dominasi dari para imperialis yang terus dialami masyarakat Iran di masa lalu dan juga dari pemerintahannya sendiri yang pro-Barat hingga awal tahun 1979 membuat Iran pasca revolusi berusaha untuk membentuk sebuah tatanan baru di kawasan berdasarkan kebijakan anti-hegemoni.

Sejak 1979, Iran mengubah haluan politik luar negerinya dari yang sebelumnya sangat dekat dengan Barat menjadi memusuhi Barat. Hal ini menunjukkan bahwa Republik Islam Iran melakukan interaksi dengan dunia internasional berdasarkan identitasnya sebagai negara antihegemoni, baru kemudian identitas inilah yang menentukan siapa ‘kawan’ dan siapa lawan<sup>68</sup>.

Sebagai contoh, Ayatollah Khomeini menentang sistem bipolar yang ada dalam hubungan internasional, “Kami tidak sejalan dengan kekuatan manapun. Kami tidak akan berada di bawah dominasi dari Amerika dan Uni Soviet”<sup>69</sup>. Iran terus berusaha untuk menyingkirkan pengaruh negara lain di Iran, terutama negara-negara non-muslim. Keyakinan ini didasari oleh Surat An-Nisa ayat 141 yang berbunyi: “... Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman.”<sup>70</sup> Hal ini membuktikan bahwa ideologi Syi’ah yang dituangkan dalam Wilayah AlFakih memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap arah kebijakan luar negeri Iran.

Disisi lainnya, Arab Saudi adalah negara Islam yang dijalankan dengan sistem monarki. Raja adalah pemimpin negara dan pemerintahan. Tidak ada

---

<sup>68</sup> M.M. Nia, ‘Understanding Iran’s Foreign Policy: An Application of Holistic Constructivism’, *Alternatives : Turkish Journal of International Relation*, Vol. 9, No. 1, Spring 2010.

<sup>69</sup> Ibid, Nia hal 159

<sup>70</sup> Al-Qur’an, Surat An-Nisa, ayat 141.

pemisahan antara negara dan agama. Berdasarkan konstitusi tahun 1992, Sunni Islam adalah agama resmi di Arab Saudi konstitusi negara adalah AlQur'an dan Sunnah. Pasal 1 dalam konstitusi Arab Saudi dinyatakan bahwa :

*“The Kingdom of Saudi Arabia is a sovereign Arab Islamic state with Islam as its religion; God's Book and the Sunnah of His Prophet, God's prayers and peace be upon him, are its constitution, Arabic is its language and Riyadh is its capital.”<sup>71</sup>*

Hukum yang digunakan di Arab Saudi adalah Hukum Syariah. Hukum Syariah adalah hukum yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip dan kaidah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah serta fatwa dari para ulama kontemporer. Fatwa adalah hukum yang dikeluarkan oleh para ulama senior tentang suatu kondisi atau peristiwa yang terjadi.

Sumber fatwa harus berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi ,sebagaimana dijelaskan pada pasal 45 yang berbunyi:

*“The source of the deliverance of fatwa in the Kingdom of Saudi Arabia are God's Book and the Sunnah of His Messenger. The law will define the composition of the senior ulema body, the administration of scientific research, deliverance of fatwa and it's (the body of senior ulema's) functions.”<sup>72</sup>*

Seluruh aspek politik di Arab Saudi harus tunduk pada Al-Qur'an dan Sunnah seperti pemerintahan, legislatif dan yudikatif. Seluruh pengadilan telah dimandatkan untuk menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai basis dari peradilan tanpa dibatasi oleh mazhab tertentu<sup>73</sup>.

---

<sup>71</sup> The Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia, Basic Law of Governance, Saudi Arabia Royal Decree, <<https://www.saudiembassy.net/basic-lawgovernance>>,

<sup>72</sup> Saudi Arabia Royal Decree.

<sup>73</sup> Library Congress, Country Profile: Saudi Arabia, Federal Research Division, September 2006, p. 21.

Sistem pengadilan atau hukum di Arab Saudi dijalankan berdasarkan hukum syariah dijelaskan pada artikel 48 dalam konstitusi. Kebijakan luar negeri Arab Saudi di pengaruhi oleh berbagai sumber ideasional yang sangat penting dipahami dalam melihat hubungan Arab Saudi dengan negara lain. Poin paling penting yang menjelaskan hal ini adalah :

*“Are God's Book and the Sunnah of His Messenger. The law will define the composition of the senior ulema body, the administration of scientific research, deliverance of fatwa and it's (the body of senior ulema's) functions.”<sup>74</sup>*

Poin paling penting yang menjelaskan hal ini adalah Arabisme dan Islam. Kedua faktor ini memegang peranan signifikan bagi Arab Saudi dalam menentukan arah kebijakannya. Komitmen Arab Saudi dalam agama Islam adalah untuk menjaga kemurnian Islam dan tauhid. Segala hal yang dianggap menodai kesucian agama Islam. Segala hal yang menyimpang dari ajaran Islam tidak dapat ditolerir karena penyimpangan dan perbuatan ini merupakan sebuah kesalahan dan dosa besar.

Arab Saudi selalu menjadi negara yang berada dalam posisi penting dan strategis serta menjadi pemimpin bagi Islam maupun Arab. Rasa kepemilikan yang tinggi dengan identitas Arab merupakan salah satu elemen penting bagi Arab Saudi di masa kontemporer. Identitas Arab yang didefinisikan sebagai kesamaan bahasa ini sangat erat kaitannya dengan Islam<sup>75</sup>.

Adapun pertentangan ideologi ini yang mempengaruhi hubungan antara Arab Saudi dan Iran semenjak revolusi Islam, Iran berusaha untuk mendirikan

<sup>74</sup> Saudi Arabia Royal Decree.

<sup>75</sup> S.K Majin, 'Iranian and Saudi Cultural and Religious Identities : Constructivist Perspective', Open Journal of Political Science, 2014.

sebuah tatanan baru di kawasan Timur Tengah berdasarkan kebijakan anti-hegemoni<sup>76</sup>. Iran berambisi untuk menyebarkan hal ini sehingga memberikan efek pada negara sekitarnya, Timur Tengah, bahkan dunia. Iran dalam kebijakan luar negerinya mengusung *counter hegemony* yang kuat dan mencoba untuk menghilangkan semua bentuk kolonialisme, despotisme, absolutisme dan imperialisme.

Hal ini merupakan fakta bahwa kebijakan anti-Barat dan anti-Amerika oleh Iran dapat dipahami dalam konteks tujuan dan motivasi Iran. Oleh sebab itu, Arab Saudi memandang Iran sebagai ancaman karena ambisi Iran untuk menyebarkan ide revolusi dan ideologi Syi'ah mereka kibarkan kembali pasca revolusi merupakan hal yang sangat berbahaya bagi kemurnian agama Islam yang sesungguhnya.

---

<sup>76</sup> Ibid, hal 90

## **BAB IV**

### **PERBEDAAN DASAR PEMIKIRAN IKHWANUL MUSLIMIN YANG DIANUT OLEH QATAR DAN PEMIKIRAN SALAFI OLEH ARAB SAUDI**

Melengkapi penelitian ini, maka dibahas mengenai perbedaan pemikiran mengenai organisasi Ikhwanul Muslimin yang berada di belakang Qatar dan organisasi Salafi yang berada di belakang Arab Saudi. Kedua identitas ini tidak bisa dipisahkan dari negara tersebut, karena masing-masing memiliki peranan yang sangat kuat di masing-masing negara.

#### **4.1 Ikhwanul Muslimin dan Qatar**

Ikhwanul Muslimin dan Qatar, memiliki hubungan yang sangat erat, hal ini terkait dengan kemajuan-kemajuan di Qatar yang secara keseluruhan terdapat peranan organisasi ataupun secara personal dari Ikhwanul Muslimin. Hal ini tak lepas dari peranan Yusuf Al Qordhowi, salah seorang tokoh Ikhwanul Muslimin yang telah tinggal di Qatar. Syekh Yusuf al-Qordhowi meninggalkan Mesir pada tahun 1961, selama satu tahun saat Presiden Gamal Abdul Nasser melakukan represi terhadap Ikhwanul Muslimin, Syekh Yusuf al-Qordhowi kemudian hijrah ke Qatar.

Saat itu, Qatar adalah negara kecil dan secara perekonomian sangat lemah, perekonomian Qatar masih bergerak di sektor perikanan dan mutiara. Qatar tidak memiliki lembaga pendidikan agama yang mampu bersaing. Dalam kondisi tersebut, Syekh Yusuf al-Qordhowi, bersama-sama dengan teman seangkatannya

mendirikan Madrasah Ma'had ad-Din (Institut Agama). Madrasah inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Fakultas Syari'ah Qatar yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar dengan beberapa fakultas. Yusuf Qardhawi sendiri duduk sebagai Dekan Fakultas Syariah Pada Universitas tersebut<sup>77</sup>.

**Gambar 6**  
**Kedekatan Yusuf Al Qordhowi dan Emir Qatar**



**Sumber : aljazeera.com**

Perubahan yang diterapkan Syekh Yusuf al-Qordhowi ternyata diperhatikan oleh Emir Qatar saat itu, Ahmad 'Ali Al Thani. Dari kedekatan ini kemudian Syekh Yusuf al-Qordhowi mendapatkan kewarganegaraan Qatar.

Syekh Yusuf al-Qordhowi juga terkenal dengan programnya di Al Jazeera, televisi Qatar, yakni "Sharia and Life" yang diperkirakan menyedot 60 juta penonton di seluruh dunia<sup>78</sup>. Jasa Syekh Yusuf Al Qordhowi terhadap Qatar terutama keilmuan Islam di Qatar dinilai menjadi penghalang negara tersebut menyerahkan Qordhowi kepada Arab Saudi.

---

<sup>77</sup> Yusuf Qardhawi, *Ummatuna Baina Qarnain*, terj. Yogi Prana dan Ahsan Takwim "Umat Islam Menyongsong Abad ke-21". Surakarta : Inter Media, 2001.

<sup>78</sup> <https://kumparan.com/@kumparannews/siapa-yusuf-al-qardawi-yang-disebut-saudi-pendukung-teroris> diakses pada 7 Maret 2018

Oleh karena itu meskipun Arab Saudi melakukan blokade terhadap Qatar memasukkan ulama pendukung Ikhwanul Muslimin, Yusuf Qardhawi, dalam daftar teroris, namun hal tersebut tidak membuat Qatar bergeming atau melakukan tindakan apapun atas keberadaan Syeikh Yusuf Al Qordhowi<sup>79</sup>.

Pihak Qatar sendiri melakukan pembelaan terhadap tuduhan Arab Saudi tersebut, yang menyatakan bahwa pihaknya tidak akan melakukan ekstradisi terhadap Yusuf Al Qordhowi, melalui Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani menyatakan pada *Middle East Monitor*, dimana pihak Qatar menegaskan bahwa Al Qordhowi bukanlah seorang teroris, melainkan hanya lawan politik yang memiliki sudut pandang yang berbeda.

**Gambar 7**  
**Menlu Qatar Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani**



Sumber : arrahmah.com

Setelah pihak Qatar mengeluarkan sikap politiknya, tak lama kemudian, pada Ahad, 10 Oktober 2017 Badan kepolisian internasional (INTERPOL)

---

<sup>79</sup> <https://dunia.tempo.co/read/882896/krisis-qatar-yusuf-qardhawi-masuk-daftar-teroris-arab-saudi-cs/full&view=ok> akses pada 28 April 2019

akhirnya menghapus Ketua Persatuan Ulama Muslim Dunia, Syeikh Yusuf al Qordhowi dari daftar cekal (DPO).

Dari pembelaan terhadap Yusuf Al Qordhowi, Qatar menunjukkan bahwa kedekatan antara kedekatan antara Qatar dengan organisasi Ikhwanul Muslimin sangatlah dekat. Kebijakan luar negeri Qatar dengan Ikhwanul Muslimin di dibaliknya memang menarik, contoh lain yang bisa dilihat adalah bagaimana sikap Qatar pada saat peristiwa Arab Spring.

#### **4.1.1 Sikap Ikhwanul Muslimin terhadap Demokratisasi**

Pandangan Ikhwanul Muslimin tentang demokrasi, hal tersebut tercermin dalam pemikiran Hassan Al Banna mengenai pemerintahan, dimana pemerintahan islam adalah pemerintah yang terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah yang beragama Islam, melaksanakan kewajiban Islam dan tidak melakukan maksiat secara terang-terangan, melaksanakan hukum-hukum dan ajaran-ajaran Islam. Hassan Al Banna menjelaskan kewajiban dan fungsi pemerintahan islam yakni ; menjaga keamanan dan melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan pendidikan, mempersiapkan kekuatan, memelihara kesehatan, memelihara kepentingan umum, mengembangkan kekayaan dan memelihara harta benda, mengkokohkan akhlak, menyebarkan dakwah.

Pedoman dalam organisasi ikhwanul muslimin, menurut Hassan Al Banna mencakup beberapa dimensi, yakni :

“Suatu organisasi politik yang menyerukan untuk mengadakan reformasi pemerintahan di dalam negeri, memperbaiki hubungan masyarakat Islam dengan masyarakat asing lainnya, dan membekali masyarakat tersebut dengan perasaan terhormat dan percaya diri (sebagai hamba Allah) diantara

masyarakat manusia lainnya, serta menghimbau mereka agar tetap teguh mempertahankan identitas (aqidah)<sup>80</sup>.

Ikhwanul Muslimin sendiri telah memiliki ketetapan landasan demokrasi dan komitmennya dengan mengajak partai-partai serta kekuatan-kekuatan politik lainnya untuk mendukung dalam bentuk dan wadah “Piagam Nasional”.

Poin-poin dalam “Prinsip Nasional Ikhwanul Muslimin” tersebut memiliki kesamaan dengan trias politica mengenai demokrasi dan arti kekuasaan. Dimana Ikhwanul Muslimin membagi kekuasaan menjadi tiga cabang, yakni kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Hal ini kemudian sejalan dengan langkah-langkah politis yang diambil oleh Ikhwanul Muslimin dalam beberapa aktivitasnya sebagai organisasi keagamaan.

Hal tersebut nampak pada langkah-langkah politik yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin dalam fenomena Arab Spring ini. Misalnya adalah pendirian FJP (*Freedom Justice Party*) pada tahun 2012 dan kemenangan partai tersebut pada pemilu di Mesir, sehingga mengantarkan Dr. Muhammad Mursi sebagai Presiden Mesir.

#### **4.1.2 Sikap Qatar Terhadap Fenomena Arab Spring di Beberapa Negara**

Peristiwa Arab Spring yang memberikan efek berantai di negara-negara kawasan, diawali di Tunisia. Apa yang terjadi di Tunisia kemudian memicu munculnya semangat di berbagai negeri Arab. Rakyat di Oman, Yaman, Mesir, Suriah, dan Maroko turun ke jalan menuntut perubahan dan perbaikan nasib

---

<sup>80</sup> Ayoob, Mohammed. *The Many Faces of Political Islam, Religion and Politics in the Muslim World*. Ann Arbor: The University of Michigan Press. 2008.

rakyatnya, sebab mereka merasa tidak mendapatkan penghidupan yang layak dari pemerintahan yang dianggap tiran oleh mereka<sup>81</sup>.

Hal ini berawal dari peristiwa ketika seorang pedagang kaki lima Mohammed Bouazizi (26 tahun) membakar diri sebagai bentuk protes ketidakadilan rezim Ben Ali dan berbuntut demonstrasi yang memaksa Presiden Ben Ali turun dari kekuasaannya.

Bouazizi sebagai pedagang buah dan sayur, mewakili kalangan terpinggirkan di Tunisia, ia menjadi tulang punggung keluarga sejak berusia 10 tahun. Terlahir dari keluarga menengah ke bawah, dan tidak sampai menamatkan pendidikan setingkat SMA, Boauzizi kemudian bekerja sebagai pedagang buah dan sayur keliling.

Ia dikenal sebagai sosok yang jujur, pekerja keras dan baik hati kepada orang-orang disekitarnya. Setiap hari ia harus dengan membawa gerobak sayurnya berjalan lebih dari dua kilometer untuk menjajakan dagangannya. Ia tak jarang juga memberikan dagangannya pada keluarga yang sangat miskin di lokasi yang ia kelilingi<sup>82</sup>.

Secara umum kondisi masyarakat Tunisia dalam kalangan internasional cukup stabil dan tidak banyak menarik perhatian. Namun, fakta lain terbuka dengan peristiwa yang melibatkan Boauzizi. Saat menjalankan pekerjaannya, hampir setiap hari ia diganggu oleh polisi lokal. Teman dekat Boauzizi, Hajlaoni

---

<sup>81</sup> <https://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/17/12/09/p0o3gn440-arab-spring-musim-semi-atau-musim-gugur> akses pada 27 Juni 2019

<sup>82</sup> Chamki T : Neo-Islamism post Arab Spring. Australian Political Studies Association Annual Conference Murdoch University 2013.

Jafer menyatakan bahwa ia menyaksikan sendiri bagaimana Boauzizi seringkali dipermalukan. Sejak kecil, Boauzizi selalu dianiaya dan dilecehkan harga dirinya sampai ia terbiasa dengan perlakuan tersebut.

Perlakuan yang dimaksudkan antara lain semacam kedzaliman birokrasi, dimana polisi akan menyita timbangan dan barang dagangannya, kemudian polisi itu akan mendendanya dengan alasan tidak memiliki izin dagang. Enam bulan sebelum aksi bakar dirinya, polisi mengirimkan padanya denda sebesar 400 dinar atau 280 dollar kerumahnya, dimana jumlah tersebut setara dengan jumlah penghasilannya selama 2 bulan<sup>83</sup>.

**Gambar 8**  
**Peristiwa Bakar Diri Mohammed Boauzizi**



**Sumber : aljazeera.com**

Hingga kemudian pada tanggal 17 Desember 2010, tindakan para polisi tersebut dirasa pada puncak kecewa Boauzizi terhadap sistem di negara tersebut. Pagi hari, saat ia dalam perjalanan menuju pasar, seorang polisi wanita mengusiknya dan meminta timbangan miliknya, namun ditolak. Tindakan tersebut

---

<sup>83</sup> Ibid hal 90

kemudian membuat polisi perempuan tersebut marah. Mereka beradu mulut, hingga polis tersebut menamparnya dan membekuknya ke tanah.

Ia merasa bahwa tindakan semua aparat birokrat, baik polisi wanita itu atau para pejabat di kotamadya tersebut sangat melampaui batas ketahanannya, akhirnya untuk menarik perhatian mereka, ia membakar dirinya di depan kotamadya. Apa yang dilakukan oleh Boauzizi ini adalah puncak dari perasaan frustrasi, putus asa dan kecewanya sebagai rakyat kecil yang diperlakukan semena-mena. Boauzizi membakar dirinya, bukan karena kecewa karena pengangguran, atau kondisi ekonomi yang sulit, namun karena muak diperlakukan tidak adil oleh para birokrat tersebut hanya karena dirinya pedagang sayur dan buah semata mencari nafkah.

Sejak aksi bakar diri Mohammed Boauzizi, di Zidi Bouzid, kemudian memicu demonstrasi yang mengarah pada tuntutan pengunduran diri Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali. Rakyat Tunisia sudah tidak percaya lagi kepada pemerintahnya, Korupsi dinilai telah menodai nilai perjuangan rakyat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Imbasnya adalah pengangguran merata dan tingginya biaya hidup turut mengobarkan rakyat Tunisia untuk bangkit dari keterpurukan akibat tidak adanya perhatian dari pemerintah yang berkuasa<sup>84</sup>.

---

<sup>84</sup> Ibid hal 91

**Gambar 12**  
**Demonstrasi Tunisia Memprotes Pemerintahan Rezim Ben Ali yang**  
**Dipicu Peristiwa Bakar Diri Mohammed Bouazizi**



**Sumber : aljazeera.co**

Sejak peristiwa tersebut, terjadi aksi demonstrasi menuntut pengunduran diri Presiden Tunisia, aksi tersebut dilakukan oleh masyarakat Tunisia yang sudah bosan dan jenuh terhadap kondisi di negaranya, setelah beberapa hari melakukan aksi demonstrasi, kekuasaan Presiden, akhirnya lepas pada tanggal 14 februari 2011.

**Gambar 10**  
**Pidato Pengunduran Diri Presiden Tunisia Ben Ali**



**Sumber : aljazeera.com**

Kesuksesan rakyat Tunisia menumbangkan rezim penguasa mereka, mengilhami rakyat Mesir untuk melakukan hal yang sama mengingat mereka

memiliki persoalan yang sama yaitu pengangguran, kemiskinan dan kleptokrasi penguasa mereka dan akhirnya rakyat Mesir mengulang sukses yang sama dengan Tunisia dan berhasil memaksa pengunduran diri Presiden Hosni Mubarak. Mesir dinilai memiliki persoalan yang sama, yakni kemiskinan dan pengangguran yang merajalela, serta sifat kekuasaan otoriter Presiden Hosni Mubarak yang telah berkuasa selama tiga puluh tahun lebih<sup>85</sup>.

Revolusi di Mesir merupakan kumpulan kekecewaan publik yang selama puluhan tahun dikekang oleh rezim Hosni Mubarak, kumpulan kekecewaan ini paralel dengan krisis politik di Tunisia, sehingga rakyat Mesir menemukan momentum yang tepat untuk segera menggulingkan rezim Mubarak, setelah aksi demonstrasi di Mesir, akhirnya Presiden Mesir Hosni Mubarak mengundurkan diri sebagai Presiden pada tanggal 11 Februari 2011<sup>86</sup>.

**Gambar**  
**Pidato Pengunduran Diri Presiden Hosni Mubarak**



Sumber : [aljazeera.com](http://aljazeera.com)

---

<sup>85</sup> Hassan H : Islam, SMOs, and the arab spring: A new perspective on social movements in the Middle East. Thesis. 2012.

<sup>86</sup> Ibid hal 67

Arab Spring tidak hanya berhenti sampai di situ saja, tapi justru semakin meluas dan menghipnotis rakyat di Negara Aljazair, Bahrain, Yaman, Libya dan negara-negara Arab lainnya di Afrika Utara dan Timur Tengah untuk melakukan hal yang sama dan bisa jadi masih ada negara-negara lain di kawasan Timur Tengah menyusul untuk melakukan hal yang sama kemudian<sup>87</sup>.

Faktor bergejolaknya Arab Spring sejak awal Januari 2011 lalu karena dua hal. Pertama, kelompok-kelompok intelektual yang bergerak untuk perubahan rezim (untuk demokrasi) sudah lama tumbuh dan terus bergerak untuk membangun kesadaran masyarakat. Selain itu, inisiatif-inisiatif untuk membangun sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis di negara-negara Arab sudah dilakukan, baik itu datangnya dari pihak luar (asing) maupun dari internal.

Rami G. Khouri berpendapat Arab Spring adalah kelanjutan dari perjuangan yang cukup panjang akan harkat dan hak-hak warga di negara-negara Arab<sup>88</sup>. Di Mesir, pada tahun 2000, mulai muncul dalam pembicaraan apa yang disebut *infithah* atau keterbukaan ke arah Barat, perdamaian dengan Israel, dan pengadopsian model kapitalis neo-liberal sebagai kunci kesejahteraan bangsa Mesir<sup>89</sup>.

Komunitas-komunitas intelektual ini mempunyai pengaruh yang sangat besar sebagai faktor utama dari bergeraknya perlawanan massa terhadap rezim.

---

<sup>87</sup> Hashemi N. The Arab Spring two years on: Reflections on dignity, democracy, and devotion. *Ethics & International Affairs* 27 (2):207-221. 2013.

<sup>88</sup> Laipson, Ellen and Friends, "After The Revolts". Source: *The Wilson Quarterly* (1976-), Vol. 35, No. 4 (AUTUMN 2011), pp. 6-7. Published by: Wilson Quarterly, 2011.

<sup>89</sup> Sau, Ranjit, "Democracy and Reform: Voices in West Asia Sumber: *Economic and Political Weekly*, Vol. 39, No. 38 (Sep. 18-24, 2004), pp. 4232-4234.

Komunitas-komunitas intelektual itulah yang membangun kesadaran rakyat untuk melawan rezim yang menindasnya selama berpuluh-puluh tahun. Arab Spring yang mulai bergejolak pada awal tahun 2011 lalu tidak terlepas dari peran intelektual tersebut. merekalah yang terus bergerak menggugah kesadaran publik akan penindasan oleh rezim yang berkuasa, baik itu di Tunisia, Mesir, dan Suriah. Merekalah yang sudah cukup lama bergerak untuk membangun kesadaran publik serta mengambil langkah-langkah inisiatif untuk melakukan perubahan sosial, termasuk dengan inisiatif untuk membangun pranata politik yang demokratis<sup>90</sup>.

Kedua, peran media massa, atau "*Internet Revolutions*"<sup>91</sup>. Media massa yang berfungsi secara efektif dan masif menyampaikan protes dari rakyat terhadap rezim Ben Ali di Tunisia ke seluruh negara-negara Arab, bahkan dunia. Pemberitaan media itulah yang membangkitkan kesadaran dan gerakan yang sama di beberapa negara-negara Arab, termasuk di Mesir dan Suriah.

Eric Goldstein berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang mendorong lahir dan berlangsungnya protes yang berawal di Tunisia, salah satunya adalah proses pemberitaan dari Al Jazeera yang berlangsung terus-menerus yang diambil dari hasil peliputan rakyat biasa melalui telepon dan kamera yang kemudian disebar melalui YouTube dan Facebook<sup>92</sup>.

Maka menarik benang merah dari peristiwa Arab Spring ini antara Qatar dengan Ikhwanul Muslimin sikap Ikhwanul Muslimin dan Qatar dalam menanggapi Arab Spring ini mereka cenderung mendukung gerakan ini,

---

<sup>90</sup> Said, Edward. W., "Peran Intelektual". Jakarta: Obor, 2014

<sup>91</sup> Ramadan, Tariq, "Islam and the Arab Awakening". New York: Oxford University Press, 2012.

<sup>92</sup> Goldstein, Eric, "A Middle-Class Revolution, dalam buku *Revolution In The Arab World*". Washington: Foreign Policy, 2011.

dimana Aljazeera dijadikan Qatar sebagai corong pendukung gerakan *Arab Spring* dan menjadi konsumsi publik Timur Tengah. Banyak opini dari Aljazeera yang dapat merubah opini publik Timur Tengah. Bagi negara Arab lainnya, apa yang dilakukan Qatar adalah dukungan terhadap gerakan separatis dan makar terhadap pemerintah<sup>93</sup>.

Pada kasus Tunisia, wartawan Al Jazeera yang sedang mencari berita ternyata mendapatkan rekaman video pembakaran diri Boauzizi di facebook, sore itu juga Al Jazeera langsung menayangkannya di saluran Al Mubashir. Sejak saat itu Al Jazeera membuat berita tersebut terus menerus *running* dalam pemberitaannya. Al Jazeera terus menerus memberitakan mengenai perkembangan Tunisia dengan video ataupun foto-foto yang menggugah hati pemirsanya. Bahkan saat program acara lainnya sedang berlangsung Al Jazeera sengaja melakukan jeda untuk memberitakan peristiwa tersebut secara live.

Saat Presiden Tunisia Ben Ali pada akhirnya angkat bicara mengenai peristiwa Boauzizi, melalui pidatonya, ia menyatakan bahwa dirinya tidak akan mencalonkan kembali menjadi presiden setelah masa jabatannya berakhir di tahun 2014. Ia juga memerintahkan penurunan harga sembako, serta menginstruksikan kepada petugas keamanan untuk berhenti menggunakan kekerasan pada masyarakat sipil.

Sementara Presiden Ben Ali memberikan pernyataan demikian untuk meredam gejolak dalam negeri Tunisia, sebaliknya Al Jazeera justru melaporkan hal yang berbeda. Al Jazeera menurunkan laporan bahwa 3 orang sipil kembali

---

<sup>93</sup> <http://www.politik.lipi.go.id/kegiatan/1148-catatan-media-briefing-krisis-diplomatik-qatar-dan-implikasinya-terhadap-geopolitik-timur-tengah-2> akses pada 18 April 2019

menjadi korban tewas di Aquina, pinggiran kota Tunis dalam kurun waktu satu jam setelah Presiden Ben Ali menyatakan sebaliknya.

Hal ini otomatis memantik kembali kemarahan massa, dan semakin menebalkan ketidakpercayaan pada pemerintah Tunisia. Al Jazeera juga mengangkat laporan oleh Federasi Internasional terkait Hak Asasi Manusia / *The International Federation of Human Rights Leagues* (FIDH) yang melaporkan bahwa korban sipil Tunisia dalam protes ini telah mencapai 66 jiwa sejak protes pertama kali muncul pada 17 Desember 2010. Korban termasuk 7 orang yang melakukan bunuh diri saat protes berlangsung karena pengangguran dan masalah ekonomi, sisanya adalah masyarakat sipil yang terbunuh oleh petugas keamanan Tunisia<sup>94</sup>.

Pada poin ini, apa yang dilakukan oleh Al Jazeera tersebut mampu menangkap makna simbolisme dari apa yang dilakukan oleh Boauzizi, kemudian melakukan beragam duplikasi pemberitaan lainnya dan menyebar luaskannya pada beragam media yang mereka miliki sehingga tersebar dan menjadi gerakan yang menginspirasi banyak negara lainnya, baik twitter ataupun facebook yang diunggah oleh para demonstan.

#### **4.1.3 Analisis Kebijakan Qatar yang Dipengaruhi oleh Pemikiran Ikhwanul Muslimin**

Secara teknis dalam peristiwa Tunisia, Al Jazeera adalah adalah satu-satunya media yang dilarang untuk memasuki kawasan tersebut, sebelum

---

<sup>94</sup> Chamki T (2013) Neo-Islamism post Arab Spring. Australian Political Studies Association Annual Conference, Murdoch University. 2013.

lengsernya Ben Ali, sampai dengan lengsernya. Menariknya Al Jazeera justru mendapatkan informasi secara langsung dari para demonstran serta para aktivis yang melaporkan peristiwa revolusi tersebut dari berbagai wilayah di Tunisia. Sehingga karena informasi yang justru di dapat dari tangan pertama tersebut, membuat Al Jazeera menjadi sumber utama rujukan yang terpercaya dibandingkan media-media lokal lainnya<sup>95</sup>.

Sebagai hasil dari pemberitaannya yang gencar mengenai Arab Spring, popularitas Al Jazeera semakin tinggi sebagai sumber berita yang independen dan dapat dipercaya. Sementara dengan gencarnya pemberitaan Al Jazeera terhadap peristiwa Arab Spring tersebut, media barat menilai peristiwa tersebut adalah sebagai sebuah bentuk gelombang protes yang menuntut adanya kebebasan dan demokrasi yang diusung oleh masyarakat yang bertahun-tahun terepresi oleh kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa media Barat juga memiliki penilaian yang sama dengan cara Al Jazeera memandang peristiwa ini<sup>96</sup>.

Terlepas dari peristiwa ini, bahwa dibelakang Al Jazeera adalah milik dari Qatar, dan dibelakang Qatar adalah kelompok Ikhwanul Muslimin. Dari apa yang dilakukan oleh Al Jazeera menunjukkan bagaimana bentuk dukungan yang Qatar dan kelompok Ikhwanul Muslimin dalam peristiwa Arab Spring. Tindakan ini membuat negara Arab Saudi menilai bahwa Qatar dan Ikhwanul Muslimin memiliki peranan yang besar dengan menggunakan Al Jazeera dalam peristiwa

---

<sup>95</sup> Mc Caughey M dan Ayers MD, *Cyberactivism: Online Activism in Theory and Practice*, London: Routledge, h. 71, 2017.

<sup>96</sup> Tim Eaton, *Internet Activism and The Egyptian Uprisings: Transforming Online Dissent Into Offline World*, *BBC Media Action vol. 9*, April 2013, h. 5

Arab Spring yang mendorong meluasnya revolusi mengenai demokrasi di wilayah kawasan.

Pengaruh lain yang ditunjukkan Ikhwanul Muslimin terhadap kebijakan luar negeri Qatar adalah pelanggaran Qatar terhadap perjanjian Riyadh yang telah disetujui bersama-sama dengan anggota GCC lainnya untuk tidak mendanai kegiatan kelompok-kelompok yang oleh anggota GCC ditandai sebagai kelompok organisasi teroris, salah satunya adalah Ikhwanul Muslimin. Namun kedekatan Qatar dengan Yusuf Al Qordhowi adalah indikator dimana Qatar berpihak.

Bentuk dukungan Qatar dengan menampung Jamaah Ikhwanul Muslimin di Doha, memberikan hak istimewa kepada Yusuf Qordhowi, leluasa menyuarakan ide-ide Ikhwanul Muslimin ke seluruh penjuru Timur-Tengah dan dunia internasional melalui Aljazeera dan mendanai anggaran dan investasi besar-besaran dalam proyek-proyek kepada kelompok Ikhwanul Muslimin.

Aliran dana tersebut terungkap dari buku yang ditulis wartawan investigasi Prancis, Georges Malbrunot dan Christian Chesnot dalam laporan investigasi *Qatar Papers; How the State Finances Islam in France and Europe* (Dokumen Qatar; Bagaimana Negara Membiayai Islam di Prancis dan Eropa). Buku Qatar Papers memuat sejumlah bukti cek dan transfer uang dari Qatar untuk menanggung proyek-proyek yang terkait dengan Ikhwanul Muslimin di seluruh Eropa. buku itu disebut memuat 140 dokumen yang merinci pendanaan Qatar dari puluhan masjid dan masyarakat Islam untuk mempromosikan pengaruh Ikhwanul Muslimin di negara-negara Eropa, seperti Prancis dan Swiss.

Tak hanya itu saja, Menteri luar negeri Qatar menyediakan dukungan untuk Ikhwanul Muslimin sebesar US\$ 5milyar dukungan ekonomi. Program bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial, serta menyediakan perumahan kepada Ikhwanul Muslimin, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pelayanan publik<sup>97</sup>.

#### **4.2 Salafi dan Arab**

Antara Wahabisme atau dikenal juga dengan Salafi dan Arab Saudi telah terjalin hubungan yang saling membutuhkan, antara satu pihak dengan pihak lainnya tidak bisa eksis tanpa keterkaitan antara keduanya. Semenjak pemerintahan King Abdul Aziz hingga sekarang, kaum Salafi melayani negara atau setidaknya mereka yang memegang kekuasaan, dan begitu juga dengan negara melayani kaum Salafi, jadi diantara mereka ada timbal balik.

Hubungan antara Arab Saudi dan Salafi berlangsung dengan sangat baik, lebih dari sekedar hubungan pragmatis dan saling memberi dukungan. Saudi dan Salafi memiliki kesepahaman untuk menjawab persoalan tentang bagaimana negara Islam, khususnya Arab Saudi, seharusnya bertindak dan menyikapi sebuah permasalahan di dunia modern.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, antara Arab dan Qatar memang memiliki latar belakang keislaman yang sama, yakni sama-sama sebagai Islam yang Sunni. Namun latar belakang organisasi di belakang negara ini menimbulkan

---

<sup>97</sup>[http://www.peacebuilding.no/var/ezflow\\_site/storage/original/application/ac81941df1be874ccbda35e747218abf.pdf](http://www.peacebuilding.no/var/ezflow_site/storage/original/application/ac81941df1be874ccbda35e747218abf.pdf) akses pada 6 April 2019

corak yang berbeda dan mempengaruhi masing-masing negara dalam menentukan arah kebijakan-kebijakan mereka.

#### **4.2.1 Sikap Salafi Terhadap Proses Demokratisasi**

Arab Saudi menjadikan Islam sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan luar negerinya. Konstitusi negara Arab Saudi adalah Islam dalam website kementerian luar negeri Saudi disebutkan bahwa Islam menempati posisi penting dan berpengaruh dalam politik luar negeri Arab Saudi.

Orang-orang salafi dikenal sebagai kelompok yang sangat keras dan tidak mau berkompromi dalam memegang prinsip doktrin salafi. Mereka tidak segan untuk mengkritik dan memandang sesat kumpulan lain yang dipandang tidak mengamalkan ajaran agama sesuai dengan kaedah dasar mereka<sup>98</sup>.

Ciri lainnya tentang Salafi adalah gerakan dakwah salafi ini juga dikenal sebagai gerakan Islam yang anti Barat. Mereka tidak mau mengamalkan segala bentuk ide dan gagasan yang ada kaitan ideologis dengan Barat, terutama demokrasi. Dalam pandangan mereka, ide-ide Barat merupakan bentuk nyata dari upaya penyelewengan dan penyimpangan ajaran agama Islam yang sebenar. Ide-ide Barat merupakan ide yang berasal dari musuh-musuh Islam, utamanya Yahudi dan Kristen untuk menghancurkan Islam<sup>99</sup>.

Salah satu gagasan Barat yang mendapat kritik tajam kaum salafi adalah demokrasi. Mereka tidak mau mengamalkan demokrasi. Dalam sistem demokrasi

---

<sup>98</sup> Binder, Leonard.. *Islamic Liberalism: A critique of development ideologies*, Chicago: University of Chicago Press. 1988.

<sup>99</sup> Ba'abduh, Luqman bin Muhammad. 2005. *Mereka adalah Teroris*, Malang: Pustaka Qaulan Sadida, 2016.

pemilihan pemimpin dilakukan oleh setiap individu dalam masyarakat sehingga pemimpin merupakan wakil suara mayoritas. Menurut mereka, cara seperti ini bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam Islam kekuasaan adalah milik Allah dan pemerintahan dalam Islam harus diasaskan kepada keyakinan tersebut. Muslim dilarang untuk menyerahkan kekuasaannya kepada kaum mayoritas masyarakat karena tidak ada jaminan kaum mayoritas tidak berbuat kesalahan dan kesesatan. Mayoritas juga belum tentu berjuang untuk kejayaan Islam<sup>100</sup>.

Oleh karena itu, demokrasi bukan jalan yang tepat untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat Islam sekarang. Bahkan sistem ini membuka peluang untuk menciptakan kesesatan dan kerusakan. Akibat penolakan terhadap demokrasi, kaum salafi menolak segala bentuk cara bernegara yang lahir dari sistem demokrasi. Mereka menolak pemilu sebagai cara memilih pemimpin.

Bagi kaum salafi, satu-satunya jalan untuk memecahkan persoalan Umat Islam adalah kembali kepada ajaran Islam yang terkandung Al-Qur'an dan Sunnah. Islam telah memberikan cara bagi memilih pemimpin. Menurut mereka, Islam mengajarkan pemimpin mesti dipilih oleh sebuah lembaga yang beranggotakan para cerdik pandai (sarjana) dalam bidang politik dan agama yang bekerja atas bimbingan Allah dan rasul-Nya.

Kelompok cerdik ini disebut dengan *ahl al-hall wa al-'aqd*. Para cerdik pandai inilah yang memilih pemimpin (*ulu al-amr*) yang memimpin masyarakat. Karena pemimpin dipilih oleh kaum cerdik pandai di bawah bimbingan Tuhan dan RasulNya, ketaatan masyarakat terhadap mereka merupakan ketaatan

---

<sup>100</sup> Norhaidi Op Cit. 89

terhadap Allah dan Rasul-Nya, baik pemimpin tersebut mampu memberikan kesejahteraan dan perlindungan kepada mereka ataupun pemimpin otoriter.

#### **4.2.2 Respon Arab Saudi Terhadap Fenomena Arab Spring di Beberapa Negara**

Selanjutnya akan dibahas dari sudut pandang Arab Saudi dan Salafi dalam menyikapi Arab Spring tersebut. Apa yang dilakukan oleh Boazizi, kemudian gelombang protes di Tunisia yang mampu menumbangkan kepemimpinan Ben Ali, disusul kemudian dengan bombardir pemberitaan oleh Al Jazeera ternyata menginspirasi Mesir dan negara-negara Timur Tengah untuk melakukan protes yang sama terhadap pemerintahan di negara mereka.

Rata-rata protes tersebut berkaitan dengan hal yang sama, yakni isu kesejahteraan dan kebebasan atas hak asasi manusia. Salah satunya adalah revolusi di Mesir yang kemudian menggulingkan pemerintahan Husni Mubarak sebagai rentetan dari Arab Spring.

Salah satu pemicu terkuat gerakan politik warga Mesir adalah pasca pembunuhan brutal Khaled Said (28) oleh Polisi Mesir pada tahun 2010 dimana kenyataan penyebab kematiannya berusaha ditutup-tutupi media nasional. Peristiwa itu membangkitkan kemarahan para aktivis. Wail Ghanim, seorang eksekutif Google membuat sebuah grup di Facebook untuk merespons kematian Khaled Said yang dinamakannya WAAKS (*We Are All Khaled Said*) atau *Kullina Khaled Said* yang mengajak para *member* melawan kebrutalan para polisi.

**Gambar 15**  
**Wael Ghanim Aktivistis Revolusi Mesir**



**Sumber : aljazeera.com**

Ia dan Mohammed Ibrahim, seorang teknisi IT, membuka ‘pendaftaran’ *online* kepada siapa saja yang ingin terlibat untuk melakukan aksi protes. Mulai Juli 2010, mereka telah merancang secara aksi protes diam. Awalnya hanya sekitar 300 orang di Aleksandria dan 20 di Kairo. Namun, jaringan media sosial dengan cepat menyebarkan aktivitas mereka.

**Gambar 16**  
**Tampilan Laman Facebook “We Are All Khaled Said”**



**Sumber : facebook**

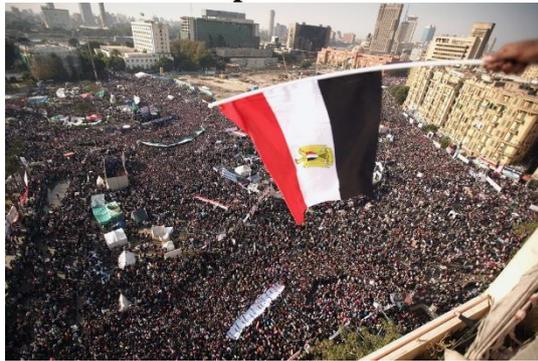
Aktivitas dunia maya terus berlanjut dan para pengikut halaman WAAKS meningkat. Asma'a Mahfoudz memposting di halaman bahasa Arab WAAKS ajakannya untuk melakukan revolusi, yang berbunyi: 'Saya ingin menyampaikan sebuah pesan sederhana. Jika kalian semua hendak mempertahankan harga diri kalian, saya mengajak anda untuk bergabung merebut hak-hak kalian di Tahriri Square pada tanggal 25 Januari' selain juga merekam dirinya memberikan orasi di Youtube<sup>101</sup>.

Keesokan harinya, sebuah *link* muncul di halaman WAAKS yang meminta alamat *email* dari para anggota grup untuk mendapatkan instruksi lebih jauh soal kegiatan revolusi. Sekitar 27.000 mendaftarkan keterlibatan dengan aksi protes. Tanggal 17 Januari 2011, WAAKS versi Bahasa Inggris menyerukan protes di seluruh dunia didepan Kedutaan Mesir (New York, Madrid, London, dan Bologna) tanggal 23 Januari. Dua setengah minggu kemudian pasca protes itu,

<sup>101</sup> *Asma'a Mahfoudz: The Video That Fueled the Egyptian Revolution*, <http://www.youtube.com/watch?v=RIuiWLTMonY>

massa melancarkan gerakan protes di jalan yang berujung pada tumbangnya kekuasaan otoriter Hosni Mubarak<sup>102</sup>.

**Gambar 17**  
**Revolusi People Power di Mesir**



Sumber : [bbc.uk](http://bbc.uk)

Protes di Tahriri Square juga berbeda dari protes-protes sebelumnya. Dengan melibatkan warga dari berbagai kelas, *middle class* dan *working class*, berpendidikan tinggi dan tidak. Selanjutnya, tindak pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah Mesir dengan cara memutus jaringan Internet pada tanggal 28 Januari sampai 2 Februari. Ketika pemerintah menyangka *blackout* itu akan melemahkan kegiatan politik dunia maya yang terjadi justru sebaliknya. Para aktivis beralih dari dunia maya ke penyebaran lewat mulut ke mulut membuat sebagian besar warga yang penasaran ikut turun ke jalan untuk melihat dengan mata mereka sendiri<sup>103</sup>. Hingga kelak Presiden Hosni Mubarak harus membubarkan kabinetnya, dan untuk pertama kalinya mengangkat wakil presiden sejak 30 tahun terakhir.

Salah satu oposisi kuat dalam usaha menjatuhkan Mubarak adalah Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin berhasil membuat revolusi semakin

<sup>102</sup> Tim Eaton, h. 11

<sup>103</sup> Wawancara dengan Sherif Mansour, kepala senior Freedom House MENA oleh Tim Eaton (19 Juni 2011)

membara dalam diri masyarakat Mesir, alhasil seluruh rakyat Mesir menginginkan Revolusi Mesir cepat dilakukan dan hal ini menyebabkan demonstrasi besar-besaran sehingga bentrok antara warga Mesir yang pro Mubarak dan yang Anti Mubarak tidak dapat dihindarkan.

Revolusi Mesir 2011 memberi ruang gerak yang besar bagi kelompok kepentingan di Mesir. Ikhwanul Muslimin merupakan kelompok Islam yang tertua dan paling terorganisir di Timur Tengah bergerak mengambil peran dalam berbagai bidang politik untuk membangun Mesir pasca revolusi<sup>104</sup>.

Ikhwanul Muslimin telah mampu merebut kekuasaan di Mesir dengan membentuk sayap politiknya yaitu mendirikan partai *Hizb Al-Hurriya Wal'Adalah (Freedom and Justice)*. Lewat FJP kelompok Ikhwanul Muslimin berhasil mengantarkan Muhammad Mursi sebagai Presiden yang pertama dipilih secara demokratis di Mesir pada puncak kekuasaan. Arab Saudi merasa munculnya kelompok

Ikhwanul Muslimin menjadi penguasa di Mesir sebagai ancaman bagi negaranya. Ditakutkan, gerakan Ikhwanul Muslim akan menambah pengaruh yang kuat dalam membawa perubahan reformasi dengan corak pemerintahan demokrasi yang pada akhirnya akan menghapus rezim-rezim diktator dan kekuasaan Raja-Raja khususnya bagi Raja Abdullah.

Lengsernya Husni Mubarak pada tahun 2011 menandakan awal mula berdirinya sistem demokrasi di Mesir. Melalui pemilihan umum (pemilu) maka terpilihlah Mursi sebagai presiden Mesir yang dipilih secara demokratis. Pada

---

<sup>104</sup> Kuncahyono, Trias. *Tahrir Square Jantung Revolusi Mesir*. Kompas Media Nusantara, Jakarta. 2013.

masa awal pemerintahan Mursi, stabilitas politik Mesir masih tetap bergejolak. Hal ini ditandai demonstrasi yang setiap hari terjadi, bentrok antara pendukung dan penentang pemerintah, protes-protes terhadap dekrit presiden, dan pelaksanaan referendum.

Pada 22 November 2012, Mursi menerbitkan dekrit tentang kekuasaan baru buat dirinya sendiri. Namun, dia membatalkan dekrit itu pada 8 Desember setelah ada penolakan luas. Ketika Mursi berada dalam kursi kepresidenan, terlihat jelas bagaimana ketidak sukaan negara-negara Arab yang masih bersifat monarki, terlebih Arab Saudi.

Mursi dinilai membawa arus modernisasi dan pemikiran progresif yang dinilai bisa mengganggu stabilitas negara lain. Hal ini terwujud kemudian ketika Arab Saudi mendukung kudeta Mursi. Gelombang krisis politik di Mesir kembali mencapai puncaknya pada tanggal 3 Juli 2013.

Militer Mesir yang di pimpin oleh panglima Angkatan Bersenjata, Abdel Fattah al-Sisi, mengkudeta tampuk kepresiden Mursi. Kudeta atas Presiden Mursi lebih didasarkan pada dua kubu. Kubu pertama, adalah kelompok Ikhwanul Muslim yang merupakan pendukung dalam memotori kemenangan Presiden Mursi dalam pemilu demokratis pertama di Mesir.

Sedangkan kubu kedua mengambil posisi sebagai anti Mursi yang menuntut agar Presiden Mursi mundur dari jabatannya, karena Mursi dinilai tidak mampu melakukan transformasi terhadap institusi yang bersifat otoriter dan mereformasi sistem ekonomi menjadi sistem yang adil, jujur dan pantas. Mursi

juga dianggap tidak mampu menjalin kesepakatan dengan militer dan enggan menanggapi suara keberatan pihak oposisi terhadap rancangan konstitusi baru.

Kudeta militer Mesir atas Presiden Mursi menimbulkan berbagai respon yang serius dari negara-negara Timur Tengah. Salah satu negara Timur Tengah yang memberikan respon atas kudeta Mesir adalah Arab Saudi. Arab Saudi memberikan respon dengan mendukung kudeta di Mesir.

Dukungan ini disampaikan oleh Raja Abdullah melalui berbagai pemberitaan baik nasional maupun internasional. Sikap Arab Saudi ini telah menimbulkan keprihatinan yang mendalam bagi pemerintahan Mursi. Padahal, Arab Saudi merupakan negara yang pertama yang dikunjungi oleh presiden Mursi sesudah dilantik menjadi presiden Mesir. Arab Saudi melihat kelompok Ikhwanul Muslim yang membawa Mursi pada puncak kekuasaan di Mesir lebih sebagai ancaman dibandingkan teman.

Rasa takut itu semakin menjadi-jadi setelah pengulingan atas Presiden Husni Mubarak pada tahun 2011. Dukungan Saudi bagi rezim baru di Kairo secara proporsional terkait dengan ketidaksetujuan atas Ikhwanul Muslimin sebagai imbas dari pemilu 2012, ketika menjadi semakin jelas bahwa Ikhwanul Muslimin telah menjadi penguasa di Mesir dan akan membentuk sistem pemerintahan dengan konsep-konsep Ikhwanul Muslimin, Arab Saudi melakukan upaya untuk mengakomodasi Ikhwanul Muslim dalam kebijakan luar negerinya dengan menunjukan sikap yang tidak begitu dekat dengan Ikhwanul Muslimin.

Meskipun Ikhwanul Muslimin, melalui Presiden Mursi berupaya untuk menjaga hubungan baik dengan Riyadh. Baik dalam rangka membangun

kerjasama maupun menjaga kehangatan hubungan sesama muslim yang dibutuhkan untuk membangun rasa saling percaya. Tetapi Saudi tetap menganggap bahwa Ikhwanul Muslimin merupakan tantangan ideologis otoritas Islam di dunia khususnya Arab Saudi, kemudian rasa tidak percaya Arab Saudi dengan Ikhwanul Muslimin ditambah lagi semakin dekatnya hubungan Mursi dengan Turki yang siap mendukung Ikhwanul baik dibidang politik maupun ekonomi<sup>105</sup>.

#### **4.2.3 Analisis Kebijakan Arab Saudi Yang Dipengaruhi Oleh Pemikiran Salafi**

Mencermati sepak terjang Arab Saudi dan Salafi dalam konflik yang terjadi di Tunisia dan Mesir. Bila di Tunisia para penguasa Arab Saudi terkesan tidak ambil peduli, namun tidak demikian ketika terjadi kebangkitan rakyat di Mesir. Arab Saudi secara transparan memberikan dukungannya kepada rezim Hosni Mubarak dan menentang sikap rakyat yang ingin menumbangkan kekuasaan Mubarak<sup>106</sup>.

Lengsernya Mubarak sama artinya semakin melemahnya kelompok negara-negara moderat Arab di Timur Tengah. Dengan alasan ini, keluarga Al-Saud tetap bersikeras mendukung Hosni Mubarak hingga saat ini. Dukungan ini tidak lepas dari fatwa-fatwa Ulama Salafi yang mengkategorikan tindakan yang

---

<sup>105</sup> Steinberg, Guido. *Leading the Counter-Revolution Saudi Arabia and the Arab Spring*, SWP Research Paper, Jerman. 2014.

<sup>106</sup> Kumar Pradhan, Prasanta. *Post-Morsi Egypt: Saudi Manoeuvring and Iranian Dilemma*, Associate Fellow at the Institute for Defence Studies & Analyses, New Delhi. 2013.

dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin sebagai *bughat* atau makar, bahkan pada perkembangan selanjutnya vonis teroris disematkan Salafi terhadap Ikhwanul Muslimin.

Ini adalah cara penguasa Arab Saudi tidak membiarkan nilai-nilai ideologis Ikhwanul Muslimin dan demokrasi berkembang di lingkungan Arab yang pengaruh itu muncul akibat pergeseran politik ke arah demokrasi dari Ikhwanul Muslimin yang dapat menyebabkan tuntutan serupa apa yang telah terjadi di Mesir bisa terjadi di Arab Saudi.

Ketika muncul bahwa demokrasi sebagai sistem politik dan Ikhwanul Muslimin sebagai partai politik yang menetap di Mesir, menjadi penyebab ancaman yang serius terhadap Saudi dan seluruh keluarga kerajaan, khususnya Wahabi karena tentu demokrasi bisa melunturkan ketaatan yang mereka peroleh atas rakyat selama ini.

Salah satu kekuatan inti yang dimiliki oleh Wahabi dibandingkan yang lain adalah, kedekatan historis mereka dengan para penguasa yang sudah terjalin ratusan tahun sehingga terbentuk kepercayaan dan interdependensi yang kuat. Setiap kebijakan Arab Saudi tidak akan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat bila tidak ada fatwa-fatwa yang dikeluarkan lembaga hukum agama oleh para ulama Wahabi.

Bahkan gelombang demokrasi berupa Arab Spring di Arab Saudi tidak begitu menggema, dikarenakan para Ulama telah berhasil merangkul hati para masyarakat dengan kharisma mereka. Ini membuktikan bahwa instrumen agama merupakan salah satu faktor kuat dalam politik luar negeri sebuah negara

khususnya di Timur Tengah, karena Islam bukan lain sebatas Agama, melainkan identitas yang melekat pada bangsa Arab.

Bercermin dari sikap dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Arab Saudi dalam menyikapi fenomena Arab Spring tersebut, khususnya di negara Mesir dan dibandingkan dengan Tunisia, ada salah satu poin utama yang perlu untuk digaris bawahi terkait dengan tindakan blokade yang dilakukannya pada Qatar. Poin tersebut adalah kelompok Ikhwanul Muslimin dibelakang Qatar yang secara terus-menerus mengobarkan ideologi demokrasi, dimana hal ini tentunya sangat bertentangan dengan identitas Arab Saudi, yang tetap ingin menjaga keberlangsungan dinasti keluarga Al Saud dalam pemerintahan monarki Arab Saudi.

#### **4.3 Konklusi**

Ikhwanul Muslimin (IM) adalah organisasi yang didirikan Hasan al-Banna di Mesir dengan menganut aliran Islam modernis. Ikhwanul Muslimin juga merupakan salah satu elemen penting yang berperan dalam melakukan mobilisasi massa dalam revolusi 25 Januari di Tunisia. Ikhwanul Muslimin juga merupakan elemen penting penggagas berdirinya partai politik Keadilan dan Kesejahteraan, yang memenangkan Mohammed Mursi pada pemilu pertama usai jatuhnya Mubarak, kemenangan Mohammed Mursi di tahun 2012 sebagai pengganti Mubarak. Tentunya hal ini semakin menambah simpati rakyat dan bentuk eksistensi Ikhwanul Muslimin.

Kemenangan Mohammed Mursi dalam pemilihan Presiden Mesir adalah sebuah momentum dari dominasi Ikhwanul Muslimin dalam politik Mesir. Ide Ikhwanul Muslimin sangat terinspirasi dari agama menempatkan Ikhwan sebagai gerakan yang dapat dikategorikan sebagai *religious movement*. Identitas keagamaan yang dibawa oleh Ikhwanul Muslimin sangat membantu dan mempermudah langkah Ikhwanul Muslimin dalam mencapai tujuan politik. Basis massa yang dibangun oleh Ikhwanul Muslimin juga sangat kuat karena identitas yang mempersatukannya adalah identitas fundamental yakni identitas keagamaan. Apa yang menjadi prinsip dasar dari Ikhwanul Muslimin ini sangat bertolak belakang dengan apa yang diyakini Salafi.

Jika Ikhwanul Muslimin cenderung toleran dengan istilah-istilah seperti ‘demokrasi’, maka Wahabi justru sebaliknya, mereka cenderung intoleran dengan hal-hal yang berbau demokrasi. Hal ini terlihat sangat jelas dari cara-cara kelompok Wahabi dalam menjaga Arab Saudi tetap memiliki mode pemerintahan monarki, dan sebaliknya Ikhwanul Muslimin justru berusaha menggunakan demokrasi untuk mencapai tujuan mereka.

Kedua organisasi ini (Ikhwanul Muslimin dan Salafi) meskipun memiliki perbedaan, mereka juga memiliki persamaan, yakni memandang bahwa sebuah negara wajib menjalankan syariat Islam secara Kaffah (sempurna). Wahabi dan Ikhwanul Muslimin juga percaya bahwa pentingnya membawa agama kepada ranah politik, dalam arti Wahabi dan Ikhwanul Muslimin merasa perlunya memperoleh kekuasaan di dalam politik dan kenegaraan agar dapat menegakkan “Khilafah”.

Pada akhirnya, khilafah ini akan mengarahkan doktrin “politisasi agama” kepada non-Muslim, termasuk muslim yang dianggap sebagai “sesat/kafir”, sehingga doktrin ini lebih dikenal dengan istilah takfiri. Jika Wahabi melakukan politisasi agama dengan cara konservatif seperti, berbahasa dengan jargon-jargon agama ataupun syiar-syiar agama dalam bentuk lain, bahkan cara berpakaian pun cenderung berbeda dengan pakaian sehari-hari umat lainnya, misalnya dengan pakaian Thawab, celana cingkrang untuk pria, dan Abaya, Cadar, Niqab untuk wanita.

Ikhwanul Muslimin cenderung lebih melakukan pendekatan yang lebih pragmatis dan akomodatif terhadap modernisasi, walaupun itu sebenarnya hanyalah kedok belaka supaya terlihat sebagai sahabat modernisasi, padahal tujuan dan cita-cita Ikhwanul Muslimin juga mempolitisasi agama seperti Wahabi. Dibanding wahabi, Ikhwanul Muslimin lebih liberal dalam pengertian memahami teks secara kontekstual dan mengakomodasi istilah-istilah Barat ke dalam terminologi Islam, seperti ‘demokrasi’, ‘revolusi’, dan ‘demonstrasi’.

Apabila revolusi Timur Tengah dipahami secara mendalam, menyatakan bahwa terdapat dua faktor utama yang bisa memicu terjadinya revolusi di Arab Saudi, dua faktor pemicu revolusi yang dimaksud adalah isu demokratisasi yang disandingkan dengan isu kesejahteraan dan konflik agama yakni konflik antara Sunni dan Syi’ah.

Faktor pertama, isu demokratisasi Arab Saudi. Pemerintahan Arab Saudi adalah pemerintahan monarki absolut, sehingga isu demokratisasi merupakan suatu hal yang dapat membahayakan sistem pemerintahan monarki absolut Arab

Saudi karena demokratisasi akan melemahkan bahkan menghancurkan kekuasaan monarki.

Pendukung demokratisasi Arab Saudi merupakan kelompok yang memiliki hubungan erat dengan kelompok Ikhwanul Muslimin di Mesir yang mendukung dan menganjurkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan terbaik. Kelompok pendukung demokratisasi Arab Saudi menamakan dirinya Al-Sahwa yang berarti kebangkitan.

Keadaan negara yang berbentuk monarki yang tidak sesuai dengan demokrasi menjadikan Arab Saudi negara yang tidak bisa menerima demokrasi diterapkan dinegaranya. Faktor pemicu revolusi kedua yang juga terdapat di Arab Saudi adalah konflik Sunni-Syi'ah. Arab Saudi adalah negara yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam Sunni yang sering disebut sebagai kelompok Wahabi.

Arab Saudi merupakan negara Islam yang mengambil pokok ajaran Islam yakni Al-Qur'an dan Sunnah menjadi konstitusi negaranya. Konsekuensi dari konstitusi tersebut adalah Arab Saudi menerapkan ajaran Islam di dalam sistem pemerintahannya. Konstitusi yang berlandaskan inti ajaran Islam juga memiliki konsekuensi berupa keterlibatan ulama Wahabi Arab Saudi di dalam pemerintahan Arab Saudi.

Selain itu, latar belakang historis Arab Saudi yang tidak bisa dipisahkan dari peran kelompok Wahabi baik dalam pendirian negara maupun pemerintahannya. Arab Saudi sebagai negara monarki absolut tidak dapat menerima masuknya demokrasi yang dibawa oleh Arab Spring ke dalam sistem

pemerintahannya dengan berbagai pertimbangan, seperti demokrasi dapat mengakibatkan masuknya kekuatan yang dapat merusak stabilitas pemerintahan Arab Saudi seperti Syi'ah dan pertimbangan lainnya.

Momentum Arab Spring dimanfaatkan kelompok pro-demokrasi yang berafiliasi dengan kelompok Ikhwanul Muslimin di Mesir untuk menyampaikan tuntutan Saudi. Akibat tuntutan yang terus disampaikan pihak pro-demokrasi menjadikan Arab Saudi mengambil strategi untuk menekan langsung pada pusat pergerakan paham pro-demokrasi tersebut. Arab Saudi memilih sikap konfrontasi terhadap kelompok Ikhwanul Muslimin di Mesir yang dianggap sebagai penyebab kerusakan kawasan Timur Tengah<sup>107</sup>.

Demikian pula alasan mendasar dibalik sikap politik yang kemudian diambil oleh Arab Saudi saat melakukan blokade Qatar dan 13 tuntutannya tersebut. Jika di cermati lebih mendalam, tindakan blokade Qatar yang dilakukan oleh Arab Saudi adalah bentuk dari upaya Arab Saudi untuk membendung pengaruh demokrasi di kawasan timur tengah. Misalnya dengan Arab Saudi meminta agar Qatar memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran. Seperti diketahui bahwa Iran adalah negara syiah yang mana Iran juga terkenal dengan upaya-upayanya untuk mentransfer nilai-nilai Syiah dan nilai-nilai demokrasi berusaha untuk mengeskpor paham revolusi mereka.

Iran pasca runtuhnya rezim Pahlevi adalah Iran yang baru, dimana Ayatollah Khomeini menggaris bawahi bahwa ekspor revolusi harus dilakukan karena dua alasan. Pertama, pada prinsipnya Islam adalah agama yang anti

---

<sup>107</sup> Holsti, K. J. *National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy*, Blackwell Publishing. 1970.

penindasan. Apabila perlawanan terhadap penindasan berhasil dilaksanakan di Iran lewat Revolusi Islam 1979, maka hal tersebut sudah sepatutnya dilakukan di wilayah Islam lainnya.

Iran juga cukup agresif melakukan ekspor revolusi di negara-negara lainnya dengan cara memanfaatkan jaringan radio milik pemerintah Iran untuk penyebaran berita secara global dan memiliki cabang di 45 negara. Apalagi Iran semakin aktif dan rekat menggalang kerjasama dengan Qatar karena kesamaan mereka memiliki gas bumi. Maka ketakutan Arab Saudi terhadap pengaruh Iran tentunya menjadi wajar.

Ditambah pula dengan organisasi Ikhwanul Muslimin di belakang Qatar yang seperti dijelaskan memiliki ideologi yang sangat bersebrangan dengan monarki absolut oleh negara Arab. Al Jazeera adalah perpanjangan tangan upaya-upaya Ikhwanul Muslimin untuk menanamkan paham demokrasi dalam kawasan dengan berbagai cara. Hal tersebut sudah dibuktikan dengan keberhasilan Al Jazeera menggiring opini publik dalam peristiwa Arab Spring yang kemudian membuat perubahan tatanan struktur pemerintahan di beberapa negara kawasan dengan menggunakan mobilisasi *people power*.

Tentunya pola yang sama menjadi hal yang paling ditakutkan oleh Arab juga akan meruntuhkan pemerintahan monarki absolut yang dimiliki oleh Arab dan berujung pada runtuhnya dinasti Al Saud yang telah menguasai Arab selama 200 tahun. Maka tindakan blokade terhadap Qatar adalah tindakan pencegahan paling logis untuk membendung itu semua, sebab Qatar dengan perekonomiannya

yang semakin kuat dan organisasi Ikhwanul Muslimin, serta Iran dibelakangnya ditakutkan Arab Saudi menjadi kekuatan untuk meruntuhkan negaranya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Blokade Arab Saudi atas Qatar menimbulkan banyak pertanyaan. Hal ini karena kedua negara tersebut adalah negara kawasan yang memiliki hubungan erat karena terikat dengan organisasi Dewan Kerjasama Teluk di kawasan Arab. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menjabarkan mengenai alasan-alasan Arab Saudi melakukan tindakan tersebut. Dari penelitian ini didapatkan beberapa kesimpulan mengapa Arab Saudi mengambil langkah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar.

Kesimpulan ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan oleh peneliti bahwa faktor yang menjadi pendorong pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi sebagai negara yang berpengaruh dalam keanggotaan Dewan Kerjasama Teluk (GCC) melakukan blokade terhadap Qatar adalah peningkatan agresivitas politik Qatar yang dapat mengancam stabilitas keamanan Kawasan Timur Tengah.

Dalam tuntutan yang diminta oleh Arab Saudi kepada Qatar, ada tiga tuntutan utama yang dianggap oleh Arab Saudi membuat stabilitas keamanan kawasan Timur Tengah terancam, pertama berkaitan dengan penerimaan Qatar terhadap organisasi Ikhwanul Muslimin yang dalam perjanjian Riyadh secara jelas melarang anggota GCC untuk memberikan bantuan apapun pada pihak Ikhwanul Muslimin.

Hal ini dikarenakan ideologi Ikhwanul Muslimin yang cenderung pro demokrasi bertentangan dengan ideologi monarki, berupa kepemimpinan dinasti

yang banyak dianut oleh negara-negara Teluk. Dalam hal ini, posisi politik Qatar di belakangnya didukung oleh Ikhwanul Muslimin yang cenderung moderat berseberangan dengan kebijakan-kebijakan anggota GCC lain, khususnya Arab Saudi yang cenderung dipengaruhi pemikiran salafi sehingga menimbulkan keresahan pada negara tersebut.

Kedua, permintaan Arab Saudi untuk menutup Al Jazeera. Hal ini dikarenakan keberadaan Al Jazeera yang sangat vokal melakukan kritik dan melakukan beragam bombardir pemberitaan yang dianggap malah memperkeruh suasana panas akibat Arab Spring di Timur Tengah.

Momentum Arab Spring yang berawal dari Tunisia semakin memanas dan merembet ke negara Arab lainnya, Mesir, Bahrain, bahkan Syria sampai sekarang rakyat masih bergolak untuk meruntuhkan rezim Bassar Al Asad. Arab Saudi menilai hal tersebut ada campur tangan pemberitaan dari Al Jazeera. Al Jazeera juga dianggap Arab Saudi sebagai alat penyebar ideologi pro demokrasi Ikhwanul Muslimin karena Yusuf Al Qordhowi sebagai tokoh besar Ikhwanul Muslimin setiap Jumat mendapatkan acara untuk siaran mengenai "Syariaa and Life" di Al Jazeera.

Ketiga adalah tuntutan Arab Saudi agar Qatar memutus kerjasama dengan Iran, dimana Iran adalah rival terbesar Arab Saudi sejak dulu. Rivalitas Arab Saudi dengan Iran dikarenakan banyak hal, antara lain karena perseteruan terkait dengan harga minyak, kemudian perseteruan aliran agama antara Sunni dan Syiah, dimana perseteruan agama ini kemudian juga mengarahkan mereka pada perseteruan terkait dengan ideologi. Iran dengan dasar agama Syiah-nya memiliki

ideologi tentang ekspor revolusi Islam yang bertentangan dengan ideologi dari Arab Saudi.

Bila ditarik garis dari peristiwa Arab Spring dapat diketahui bahwa tindakan blokade Qatar yang dilakukan oleh Arab Saudi adalah bentuk dari upaya Arab Saudi untuk membendung pengaruh revolusi demokrasi Islam syiah di kawasan timur tengah. Sebagai gambaran, Arab Saudi meminta agar Qatar memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Iran. Seperti diketahui bahwa Iran adalah negara syiah yang mana Iran juga terkenal dengan upaya-upayanya untuk mentransfer nilai-nilai Syiah yang digunakan untuk mengekspor paham revolusi mereka.

Meninjau lebih lanjut, Iran pasca runtuhnya rezim Pahlevi adalah Iran dengan bentuk pemerintahan yang baru, dimana Ayatollah Khomeini menggarisbawahi bahwa ekspor revolusi harus dilakukan karena dua alasan. Pertama, pada prinsipnya Islam adalah agama yang anti penindasan. Apabila perlawanan terhadap penindasan berhasil dilaksanakan di Iran lewat Revolusi Islam 1979, maka hal tersebut sudah sepatutnya dilakukan di wilayah Islam lainnya.

Kedua, Iran harus agresif melakukan ekspor revolusi di negara-negara lainnya kemudian kekuatan armada, keluasan wilayah, dan kekuatan politik Iran hampir sama dengan Saudi Arabia di jazirah Arab. Apalagi Iran semakin aktif dan rekat menggalang kerjasama dengan Qatar karena kesamaan mereka memiliki gas bumi. Maka ketakutan Arab Saudi terhadap pengaruh Iran tentunya menjadi wajar.

Sehingga imbasnya, apabila Qatar dekat dengan Iran, yang ditakutkan Saudi adalah Iran akan memberikan pengaruh demokrasi ataupun revolusi kepada Qatar, apalagi Qatar sekarang menjelma menjadi negara kaya, sehingga kelak akan mempengaruhi negara-negara kawasan lainnya dan dinasti Al Saud.

Jika dirunut, dari 13 tuntutan yang dituntut pada Qatar, kesemuanya adalah bentuk ketakutan dari Arab Saudi terkait dengan ideologi demokrasi yang dibawa oleh Ikhwanul Muslimin di belakang Qatar. Kemudian benang merah pro demokrasi juga nampak pada ideologi revolusi yang dibawa oleh Iran. Upaya blokade terhadap Qatar tersebut adalah upaya untuk membendung pengaruh tersebut. Pola yang sama yang digunakan dalam Arab Spring, yakni *people power* menjadi hal yang paling ditakutkan oleh Arab Saudi karena akan meruntuhkan pemerintahan monarki absolut yang dimiliki oleh tersebut dan berujung pada runtuhnya dinasti Al Saud yang telah menguasai Arab selama 200 tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Thalibi, Abu Abdirrahman *Dakwah Salafiyah Dakwah Bijak: Meluruskan Sikap Keras Dai Salafi*. Jakarta: Hujjah Press. 2006.
- Al-Banna, Hasan, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin Jilid I*, Solo: Era Intermedia, , 2005
- Andersen, Roy R., et al., *Politics and Change in the Middle East*. New Jersey: Prentice Hall. 1998.
- Ayatollah Khomeini, Sahifeh-ye Imam, *An Anthology of Imam Khomeini's Speeches, Messages, Interviews, Decrees, Religious Permissions, and Letters vol. 12*, Tehran The Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Work, 2008.
- Ayoob, Mohammed, *The Many Faces of Political Islam, Religion and Politics in the Muslim World*. Ann Arbor: The Univesity of Michigan Press. 2008.
- Baldwin, David A. Power and *International Relations* in Walter Carlsnaes, Thomas Risse, Beth Simmons [eds.]. *Handbook of International Relations*, London: SAGE. 2002.
- Binder, Leonard. *Islamic Liberalism: A critique of development ideologies*, Chicago: University of Chicago Press. 1988.
- Ba'abduh, Luqman bin Muhammad. *Mereka adalah Teroris*, Malang: Pustaka Qaulan Sadida. 2005.
- Barnes, Samuel, et al., *Political Action: Mass Participation in Five Western Democracies*. Beverly Hills, CA: Sage Publications. 1979
- C. M. Blanchard, 'Islam: *Sunni and Shiites*', Congressional Research Service, 28 Januari 2009.
- Chamki T. *Neo-Islamism post Arab Spring*. *Australian Political Studies Association Annual Conference 2013*, Murdoch University. 2013.
- David E. Long and Bernard Reich, *The Government and Politics of the Middle East and North Africa*, Colorado : Westview Press. 1980.
- David Faris, *Revolutions Without Revolutionaries? Social Media Network and Regime Responses in Egypt*, tesis doktoral University of Pennsylvania, Philadelphia. 2015.
- Dennen & JMG Van Der. *Problems in the Concepts and Definitions of Aggression, Violence, and Some Related Terms*. University of Groningen. 1980.
- Drew, Phillips Jeffrey. *An Analysis of The Legality of Maritime Blockade in The Context of Twenty-First Century Humanitarian Law*. Canada: Queen University. 2012.
- Elashmawy, Sheriff. *The Foreign Policies of Saudi Arabia and Qatar Towards The Arab Uprisings The Cases of Egypt, Libya, and Bahrain*. Paris: University og Innsbruck Sciences Po Paris. 2014.
- Echagüe, Ana, Saudi Arabia: *Supply-Side Reform? FRIDE Policy Brief*, No. 15, July 2009

- Ezzedine, Abdelmoula, *Al Jazeera Democratizing Role and the Rise of Arab Public Sphere. Thesis for the degree of Doctor Philosophy in Politics* University Exter, 2012.
- Fouad Al-Farsy. *Saudi Arabia: A Case Study Development*. London: John Wiley & Sons. 1986.
- Goldstein, Eric, "A Middle-Class Revolution, dalam buku *Revolution In The Arab World*". Washington: Foreign Policy, 2011.
- Hassan H : *Islam, SMOs, and the Arab Spring: A new perspective on social movements in the Middle East*. Thesis. 2012.
- Hardy, Robert. *The Muslim Revolt : A Journey Through Political Islam*. Columbia University Press. 2010.
- Hashemi N : *The Arab Spring two years on: Reflections on dignity, democracy, and devotion. Ethics & International Affairs* 27 (2):207-221. 2013.
- Holsti, K. J. *National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy*, Blackwell Publishing. 1970.
- Iskandar, Adel and Mohammed El Nawawy. *Al Jazeera : The Story of The Networks That is Rattling Governments And Redefining Modern Journalism*. Westview Press-Perseus Books Groups. 2017.
- J.Steans & L. Pettiford. 2009. *Hubungan Internasional Perspektif dan Tema*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. p. 52.
- Kalevi J, Holsti. *International Politics: A Framework for Analysis*. Edisi ke 6. New Jersey: Prentice Hall International. 1992.
- Kuncahyono, Trias. *Tahrir Square Jantung Revolusi Mesir*. Kompas Media Nusantara, Jakarta. 2013.
- Kumar Pradhan, Prasanta. *Post-Morsi Egypt: Saudi Manoeuvring and Iranian Dilemma, Associate Fellow at the Institute for Defence Studies & Analyses*, New Delhi. 2013.
- Lynch, M. *Voices of the new Arab public: Iraq, Al-Jazeera, and Middle East politics today*. New York, NY: Columbia University Press. 2006.
- Laipson, Ellen and Friends, "After The Revolts". Source: *The Wilson Quarterly* (1976-), Vol. 35, No. 4 (AUTUMN 2011), pp. 6-7. Published by: Wilson Quarterly, 2011.
- Mochtar, Masoed & Collin, Mac Andrew. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. pp. 3-20. 1990.
- McSparren, J., & Besada, H. *Qatar's Global Investment Strategy for Diversification and Security in The Post-Financial Crisis Era*. Centre on Governance Research Paper Series, 1. 2017.
- Martin, H. Sours, *Saudi Arabia's Role in the Middle East: Regional Stability within the New World Order*. *Asian Affairs Journal*. Taylor & Francis, Ltd Vol. 18 No. 1. 1991.
- M. Huwaidin, 'The Security Dilemma in Saudi-Iranian Relations' *Review of History and Political Science*, December 2015..
- M.M. Nia, 'Understanding Iran's Foreign Policy: An Application of Holistic Constructivism', *Alternatives : Turkish Journal of International Relation*, Vol. 9, No. 1, Spring 2010.

- Maryam Panah, *The Islamic Republic and the World: Global Dimensions of the Iranian Revolution*. London: Pluto Press, 2007.
- Mc Caughey M dan Ayers MD, *Cyberactivism: Online Activism in Theory and Practice*, London: Routledge, h. 71, 2015.
- Noor Afif Maulana, *Revolusi Islam Iran dan Realisasi Wilayah al-Faqih*, (Cet, I: Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002
- Noorhaidi, *Laskar Jihad: Islam, militancy and the quest for identity in post-New Order Indonesia. Tesis Dr. Falsafah. Faculteit der Letteren en International Institute for the Study of Islam in the Modern World. Universiteit Utrecht. 2005.*
- Pourhamzavi, Karim and Philip Pherguson. *AL JAZEERA AND QATARI FOREIGN POLICY: A CRITICAL APPROACH*. Department of Politics, University of Otago, New Zealand. *Journal of Media Critiques [JMC]* – Vol.1 No.2 December 2015.
- Rivlin, Paul. Arab Spring. *Middle East Arise*. Tel Aviv University. 2014.
- Rapucom. *Emerging Giants Defning the trend: How increasing investment from Asia and the Middle East is turning them into sport's Emerging Giants*. Repucom, 5. 2014.
- Ramadan, Tariq, “*Islam and the Arab Awakening*”. New York: Oxford University Press, 2012.
- Silalahi, Uber. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press. p. 321. 2006.
- Sorkhabi, R. *The Qatar Oil Discoveries. Middle East: Why So much Oil in The Middle East?*, hal. 40. 2010.
- Siddiqa, Arhama. “*Qatar-Gulf Rift: Going Beyond a War of Words*”. *Islamabad. Institute Of Strategic Studies*. 2017.
- Sahidin, ‘*Memahami Sunni dan Syi’ah : Sejarah, Politik dan Ikhtilaf*’, *Jurnal MAARIF*, Vol. 10, no. 2, Desember 2015.
- Sau, Ranjit, “*Democracy and Reform: Voices in West Asia Sumber: Economic and Political Weekly*, Vol. 39, No. 38, pp. 4232-423. Sep. 18-24, 2004.
- Steinberg, Guido. *Leading the Counter-Revolution Saudi Arabia and the Arab Spring*, SWP Research Paper, Jerman. 2014.
- S.K Majin, ‘*Iranian and Saudi Cultural and Religious Identities : Constructivist Perspective*’, *Open Journal of Political Science*
- Yusuf Qardhawi, *Ummatuna Baina Qarnain*, terj. Yogi Prana dan Ahsan Takwim “*Umat Islam Menyongsong Abad ke-21*”, Surakarta : Inter Media, 2001.
- Yusuf Qardhawi, *al-Madkhal fi Dirasat al-Syari’ah al-Ismlamiyah*, terj. M. Zakki dan Yasir Tajid “*Membumikan Syari’at Islam*”, Cet. I Surabaya: Dunia Ilmu, 1997

**Artikel Jurnal**

- Affan, Ramli. “Krisis Qatar, Keruntuhan Proxy dan Ikhwanisme Indonesia”, dalam Jaringan Survey Inisiatif. 2017.
- Azran, Tan Samuel. *Al Jazeera, Qatar, and New Tactics in State – Sponsored Media Diplomacy*. Sammy Ofer School of Communications, The Interdisciplinary Center (IDC), Herzliya 46150, Israel. SAGE Publications. 2013.
- Doumar, George et al. *Crisis in The Gulf Cooperation Council: Challenges and Prospect*”, dalam *Arab Center Washington DC Publication*. 2017. “
- Harb, K. Irnad. 2017. “Why Qatar? Explaining Contentious Issues”, dalam *Arab Center Washington DC*.
- Hitcock, Mark “Iran: The Coming Crisis: Radical Islam, Oil, and The Nuclear Threat”. Mutlnohah Publisher, Inc. 2006.
- Jahnsan E, Khalil. “Crisis in The Gulf Cooperation Council”, dalam *Arab Center Washington DC*. 2017.
- Terill, Andrew W. “The Saudi-Iranian Rivalry And The Future of Middle East Security”, dalam *US Army War College: Strategies Studies Institute*. 2011.
- Watts, Meredith W. “Are There Typical Age Curves in Political Behavior: The Age Invariance Hypothesis and Political Socialization”, dalam *Political Psychology*, 20, pp. 477-523. 1999.
- Wehrey, Frederic et al “Saudi-Iranian Relations Since the Fall of Saddam : Rivalry, Cooperation, and Implication for US. Policy”, dalam *National Security Research Division*. 2009.

**Artikel Online**

- Arabian Bussiness. (2017, May 17). *Revealed: Qatar Investment Authority’s investments across the world*. Diambil kembali dari Arabian Bussiness: <http://www.arabianbusiness.com/revealed-qatarinvestment-authority-s-investments-across-world674254.html> diakses pada 17 Februari 2019.
- Alex Christoforoud, “24 Hourse ultimatum, Saudi Arabia threatens Qatar to submit to list of demands or face war”, diakses pada 12 september 2017, <http://theduran.com/24-hour-ultimatumsaudi-arabia-threatens-qatar-to-submit-or-else-face-war/>.
- Al-Khuwari, G. (2014, October 14). *What Will Qatar Be Like in 2030?* Diambil kembali dari SlideServe: <https://www.slideserve.com/corby/what-will-qatar-belike-in-2030> diakses pada 17 Februari 2019
- CBC News Report. “Where the Arab Spring protests still rage: Latest developments from the Middle East and North Africa”. (CBC, 2013), Ed.13 Feb. Diakses melalui [www.cbc.ca](http://www.cbc.ca) pada 11 Januari 2019
- Doherty, R., & Nair, D. (2012, August 16). *Qatar Telecom offers \$2.2 billion for Wataniya stake*. Diambil kembali dari Reuters:

- <https://www.reuters.com/article/us-qtelwataniya/qatar-telecom-offers-2-2-billion-forwataniya-stake-idUSBRE87F07B20120816> akses pada 17 Februari 2019
- Haryono, Willy. 2017. “*Qatar Tegaskan akan Menahan Diri di Tengah Kisruh Diplomatik*” [Online], dalam <http://internasional.metrotvnews.com/dunia/Rb1OzY1K-qatar-tegaskan-akan-menahan-diri-di-tengah-kisruh-diplomatik> [di akses pada 28 Maret 2018].
- Hayat, R. (2014, December 2). Country Report Qatar. Diambil kembali dari Rabobank:<https://economics.rabobank.com/publications/2014/november/country-report-qatar/> diakses pada 17 Februari 2019
- Helman, C. (2009, July 13). *Will Americans tune to Al Jazeera? Forbes*. Retrieved from <http://www.forbes.com/forbes/2009/0713/comcast-al-qaeda-will-americans-tune-to-al-jazeera.html>
- Jennifer Preston, *Movement Began in Outrage and a Facebook Page That Give It An Outlet*, artikel diakses pada 5 Februari dari The New York Times online <http://www.nytimes.com/2011/02/06/world/middleeast/06face.html?page-wanted=all&r=0>
- Maulana, Victor. 2017. “*Inggris Serukan Saudi Cs Cabut Blokade Qatar*” [Online], dalam <https://international.sindonews.com/read/1219075/43/inggris-serukan-saudi-cs-cabut-blokade-qatar-1499582297> [di akses pada 29 Maret 2018].
- Ministry of Business and Investment Promotion Department of Qatar, “*Rise with Qatar*”. diakses pada 11 Februari 2019
- Nader, S. (2013, July 12). *Emir Replaces Head of Qatar Investment Authority*. Diambil kembali dari AlMonitor: <https://www.almonitor.com/pulse/originals/2013/07/qatar-emirtamim-investment-fund-new-approach.html> akses pada 17 Februari 2019
- Sindo, 2017. “*Krisis Qatar akan Hantui Pasar Energi Uni Eropa*” [Online], dalam <https://economy.okezone.com/read/2017/06/15/320/1716868/krisis-qatar-akan-hantui-pasar-energi-uni-eropa> [di akses pada 29 Maret 2018]
- Sam Sanders, Wilson Andrews, Frank Yonkof. “*Middle East dan North Africa in Turmoil*”. (The Washington Post. 2011), Ed.13 Juli. Diakses melalui [www.washingtonpost.com](http://www.washingtonpost.com) pada 11 Januari 2019. 2018].
- Snoj, J. (2017, February 7). *Population of Qatar by nationality - 2017 report*. Diambil kembali dari Priya Dsouza Communication: <http://priyadsouza.com/populationof-qatar-by-nationality-in-2017/>
- Roberts, D. (2011, September 28). *Behind Qatar's Intervention In Libya*. Diambil kembali dari Foreign Affairs: <https://www.foreignaffairs.com/articles/libya/2011-09-28/behind-qatars-intervention-libya> akses pada 17 Februari 2019
- Tempo.co. 2017. “*Krisis Diplomatik Qatar-Negara Arab, Turki Siap Menengahi*” [Online], dalam

- [https://dunia.tempo.co/read/881828/krisis-diplomatik-qatar-negara-arab-turki-siap menengahi](https://dunia.tempo.co/read/881828/krisis-diplomatik-qatar-negara-arab-turki-siap-menengahi) [di akses pada 28 Maret 2018].
- 9<https://news.detik.com/internasional/d-3556253/qatar-dan-arab-saudi-cspernah-tandatangani-perjanjian-rahasia>, diakses pada 30 Oktober 2018
- <https://kumparan.com/@kumparannews/qatar-kecil-nan-kaya-16-fakta-yang-harus-kamu-tahu> akses pada 24 Maret 2019
- Al Jazeera Centre For Studies, *Power Imbalance: Iran's Gain, Saudi's Challenges*, diakses dalam <http://studies.aljazeera.net/en/positionpapers/2015/01/201512512714307969.html> diakses pada 25 Maret 2019
- CEIC. PDB Perkapita Qatar pada tahun 2000-2016, diakses pada 30 November 2018, diakses dari <https://www.ceicdata.com/id/indicator/qatar/gdp-per-capita>
- <https://kumparan.com/@kumparannews/siapa-yusuf-al-qaradawi-yang-disebut-saudi-pendukung-teroris> diakses pada 24 Maret 2019
- Aljazeera, "More countries back Saudi Arabia in Iran dispute" diakses dari <https://www.aljazeera.com/news/2016/01/nations-saudi-arabia-row-iran-160106125405507.html> pada 23 Maret 2019.
- <https://kumparan.com/@kumparannews/siapa-yusuf-al-qaradawi-yang-disebut-saudi-pendukung-teroris> akses pada 24 Maret 2019
- Gulf News Government, "UAE, Saudi Arabia and Bahrain recall their ambassadors from Qatar" diakses dari <https://gulfnews.com/uae/government/uae-saudi-arabia-and-bahrain-recall-their-ambassadors-from-qatar-1.1299586#> pada 23 Maret 2019
- Oweiss, Ibrahim M. 1975, *Petrodollars*, <http://faculty.georgetown.edu/imo3/petrod/petro2.htm>.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ICP Desember 2015 Turun Jadi US\$ 35,47 per Barel, diakses dalam [http://migas.esdm.go.id/post/read/icp-desember-2015-turun-jadi-us\\$-35,47- per-barel](http://migas.esdm.go.id/post/read/icp-desember-2015-turun-jadi-us$-35,47-per-barel) diakses pada 25 Maret 2019
- Iran Ministry and Foreign Affair, Constitution, <<http://en.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=3&fkeyid=&siteid=3&pageid=2144>>, akses pada 18 Oktober 2018
- Saudi Arabia Ministry of Foreign Affair. History of the Kingdom, <http://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/aboutKingDom/Pages/CountryDevelopment36143.aspx>
- "Wahhabis." dalam The Oxford Dictionary of Islam, edited by John L. Esposito. Oxford Islamic Studies Online, <http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e2467>
- The Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia, *Basic Law of Governance, Saudi Arabia Royal Decree*, <<https://www.saudiembassy.net/basic-lawgovernance>>,  
Library Congress, Country Profile: *Saudi Arabia, Federal Research Division*, September 2006, p. 21.

- <https://kumparan.com/@kumparannews/qatar-terjepit-kobar-api-perseteruan-saudi-iran> akses pada 26 Maret 2019
- <https://kumparan.com/@kumparannews/siapa-yusuf-al-qaradawi-yang-disebut-saudi-pendukung-teroris> diakses pada 7 Maret 2018
- <https://dunia.tempo.co/read/882896/krisis-qatar-yusuf-qardhawi-masuk-daftar-teroris-arab-saudi-cs/full&view=ok> akses pada 28 April 2019
- <https://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2017/09/11/123391/interp-ol-hapus-nama-syeikh-al-qaradhawi-dari-daftar-dpo.html> akses pada 28 April 2019
- <http://www.politik.lipi.go.id/kegiatan/1148-catatan-media-briefing-krisis-diplomatik-qatar-dan-implikasinya-terhadap-geopolitik-timur-tengah-2> akses pada 18 April 2019
- <https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/ppmzr5320/buku-baru-ungkap-skandal-qatar-ikhwanul-muslimin-dan-tariq> akses pada 6 April 2019
- [http://www.peacebuilding.no/var/ezflow\\_site/storage/original/application/ac81941df1be874ccbda35e747218abf.pdf](http://www.peacebuilding.no/var/ezflow_site/storage/original/application/ac81941df1be874ccbda35e747218abf.pdf) akses pada 6 April 2019
- Asma'a Mahfoudz: *The Video That Fueled the Egyptian Revolution*, <http://www.youtube.com/watch?v=RIuiWLTMonY>
- Tim Eaton, *Internet Activism and The Egyptian Uprisings: Transforming Online Dissent Into Offline World*, BBC Media Action vol. 9, April 2013.